

**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 80);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 273);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005 - 2025.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2023 - 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan

tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa basil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian basil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai basil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/ basil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), basil (*outcome*), dampak (*impact*).

28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berlungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kedudukan;
- b. sistematika, isi dan uraian;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. ketentuan peralihan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

RPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. secara substansial, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) tahun;
- b. secara normatif, menjadi dasar Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

- c. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan RKPD adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum;
 - c. Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. Tujuan dan Sasaran;
 - f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Penutup.
- (2) Sistematika, isi dan uraian RPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sebelum terbentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Wali Kota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 APRIL 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun tujuan Pembangunan Daerah menurut Pasal 258 Ayat (1) adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui proses pembangunan yang diawali dengan tahapan perencanaan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sehingga Pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan Atau RKPD Tahun 2023 Terjadi "Kekosongan".

Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2021 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-3026.



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. RPD ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, yaitu Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat, dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan di sektor lainnya, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan lingkungan hidup.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator kedepan seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7



Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

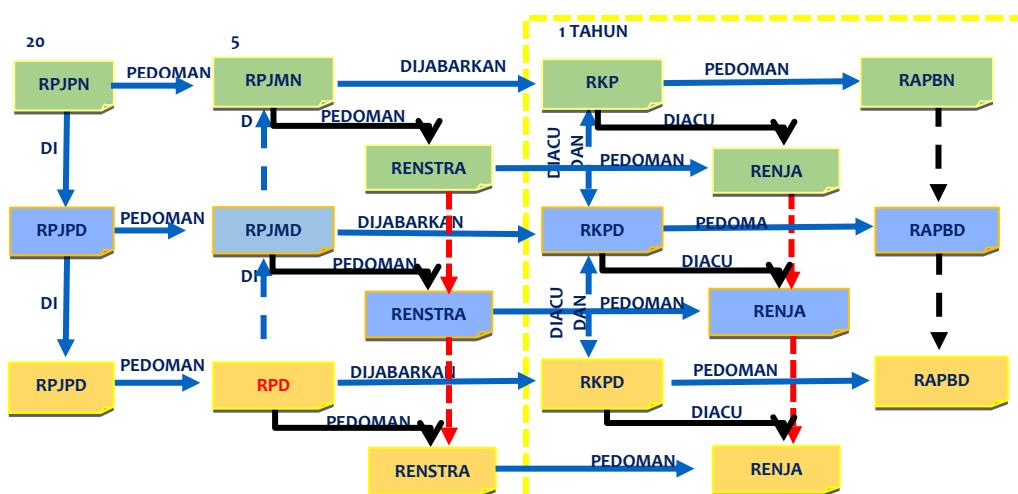
27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis serta politis sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan untuk mengisi kekosongan RPJMD Kota Tasikmalaya sehubungan dengan berakhirnya RPJMD periode 2017-2022 dan belum adanya Kepala Daerah Definitif hasil Pemilukada.
 2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023-2026.
 3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah.
 4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
 5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun.
 6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



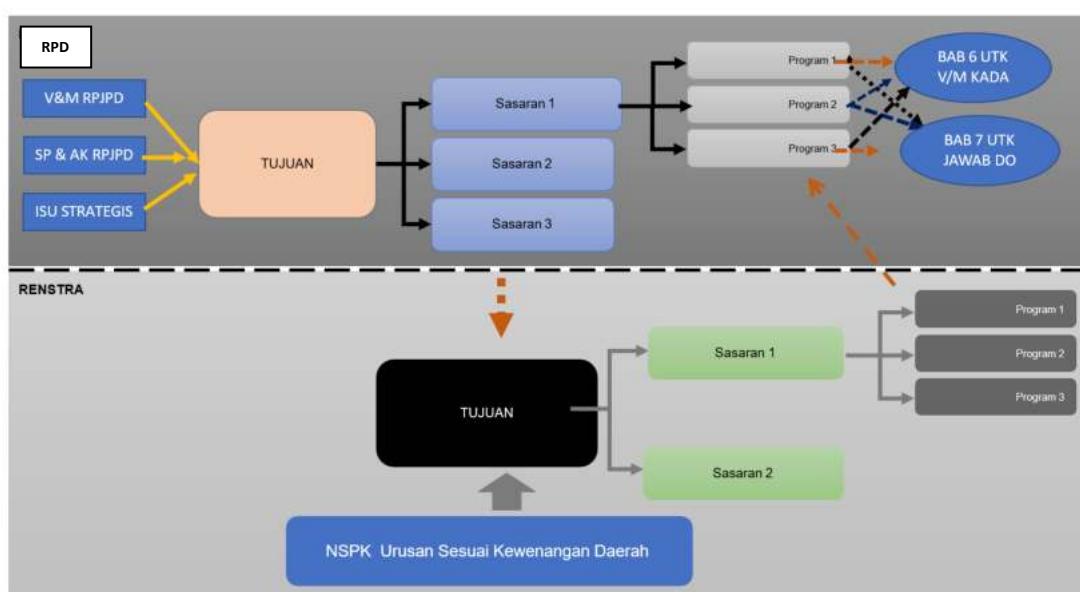
Gambar 1.2.

Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 serta Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3. Hubungan RPD dan Renstra

Selanjutnya, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.
4. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan nasional
7. Regulasi yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk menyusun dan menjabarkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka Panjang serta memberikan gambaran tentang kerangka perekonomian daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;



2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana penganggaran;
3. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
4. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Tasikmalaya;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tasikmalaya secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Tasikmalaya untuk jangka menengah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS



Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

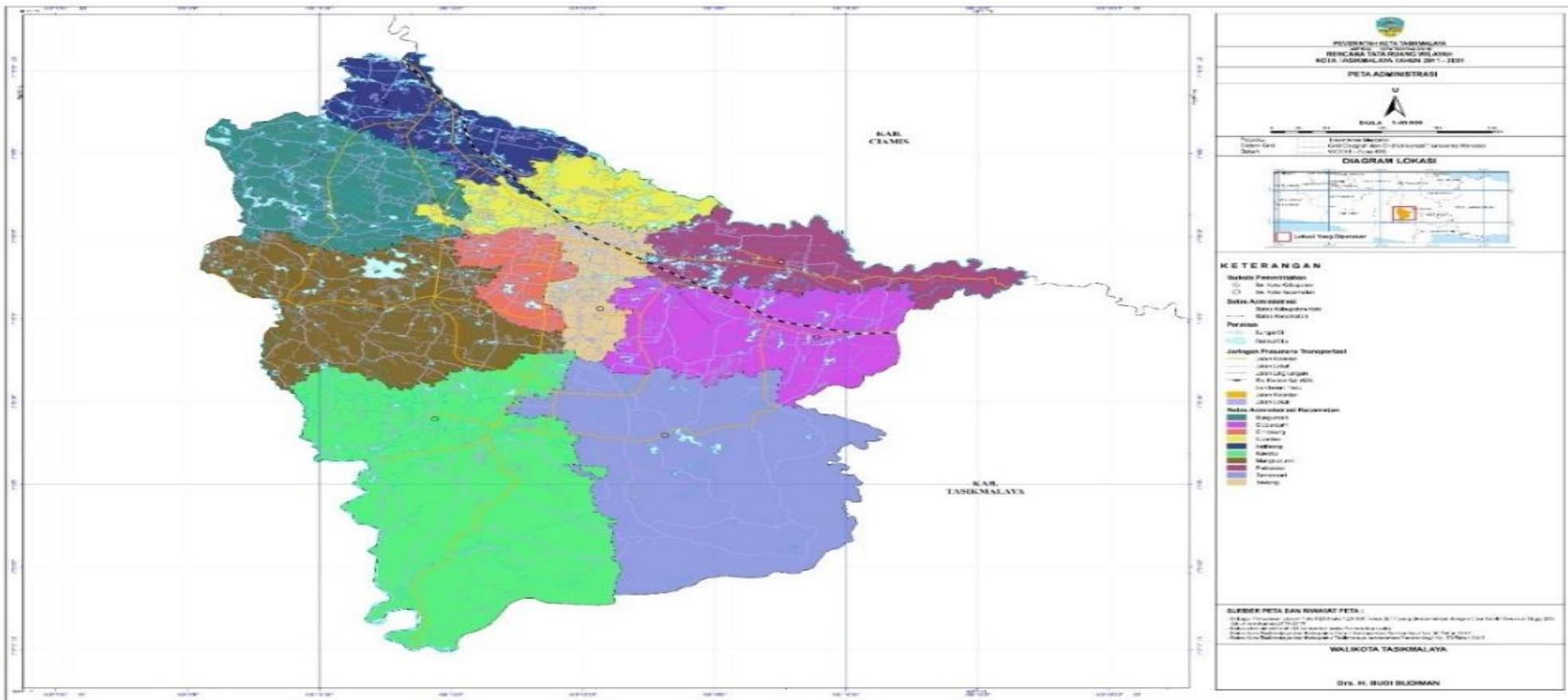
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara $108^{\circ}08'38''$ BT- $108^{\circ}24'02''$ BT dan antara $7^{\circ}10'$ LS- $7^{\circ}26'32''$ LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya



2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

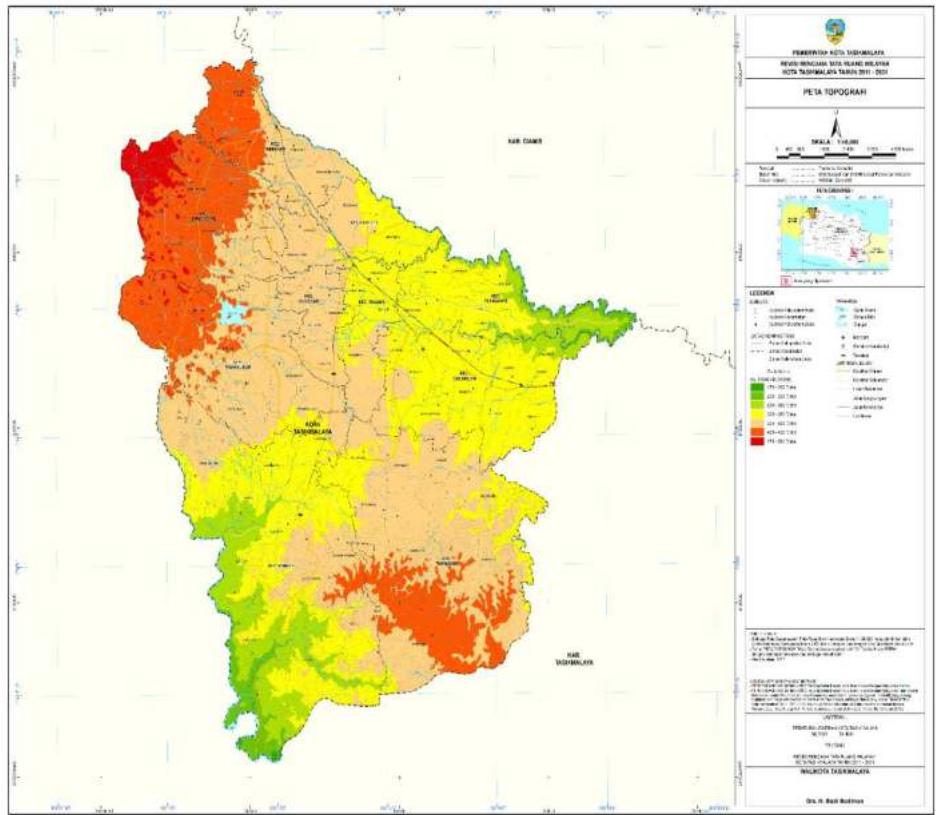
Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 1.2). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1.
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

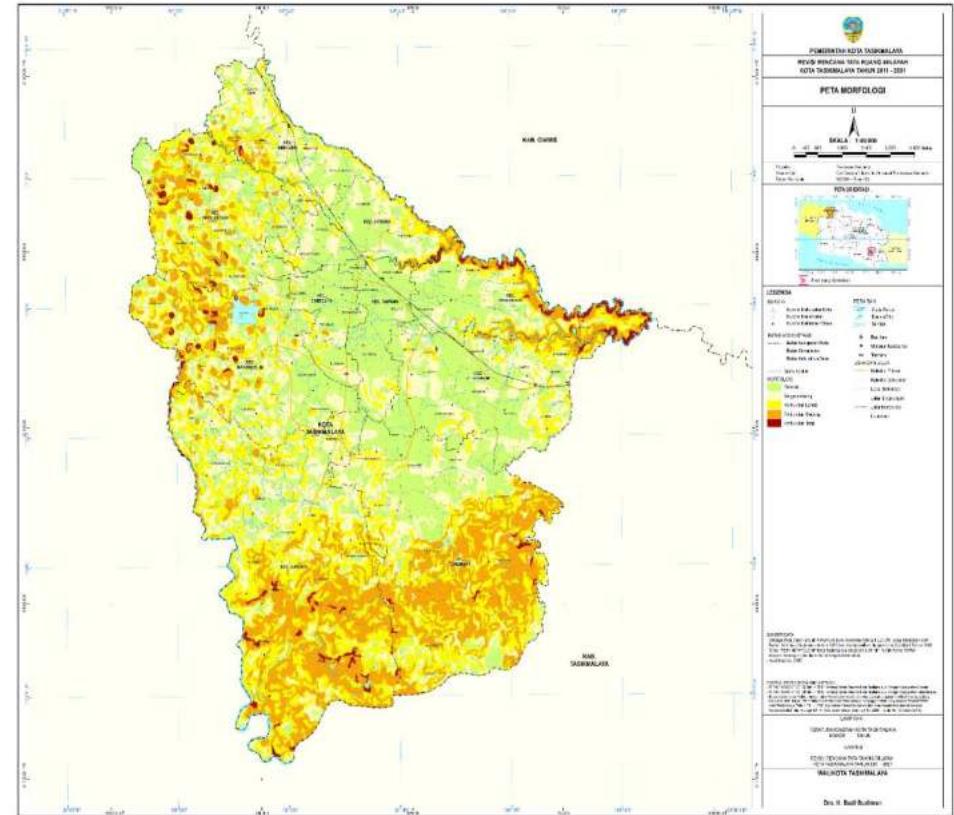
Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Tasikmalaya



Gambar 2.3.
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya



2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar $17 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau rata-rata harian sekitar $5,5 \text{ m}^3/\text{detik}$, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar $13,7 \text{ m}^3/\text{detik}$. Jumlah kedua limpasan adalah $1.658.880 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar $1.646.750 \text{ m}^3$. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi ($6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari ($6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang



merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem aquifer tunggal pada unit vulkanik, sistem aquifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem aquifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

2.1.1.5. Klimatologi

Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 24,9°C. dengan suhu terendah sebesar 17,4°C yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 17,4°C terjadi pada bulan Maret dan April sebesar 33,0 °C dengan kelembaban udara rata-rata 84,1% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara
Tahun 2021

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
Januari/January	17,4	24,9	32,0	62		
Februari/February	20,4	24,3	32,8	63		
Maret/March	20,4	25,3	33,0	61		
April/April	20,4	25,5	33,0	60		
Mei/May	19,0	25,4	32,2	64		
Juni/June	20,4	25,2	32,6	65		
Juli/July	19,0	25,1	32,0	65		
Agustus/August	19,0	24,4	31,6	71		
September/September	19,4	24,4	31,4	70		
Okttober/October	20,0	24,9	31,6	72		
November/November	20,0	24,7	31,6	78		
Desember/December	20,0	25,1	32,0	73		
Rata-rata/Average	19,6	24,9	32,2	67,1	84,1	92,5

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan November yaitu 32 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei Juli yaitu 1 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Bulan Month (1)	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari/January	8	22
Februari/February	2	17
Maret/March	5	22
April/April	1	12
Mei/May	1	9
Juni/June	3	12
Juli/July	1	8
Agustus/August	-	-
September/September	2	20
Okttober/October	2	10
November/November	4	27
Desember/December	4	19
Rata-rata/Average	3	14,83

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemakaman	24,88	0,135
Permukiman	5277,20	28,646
Sawah	6493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042



Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Pengunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;



3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g.

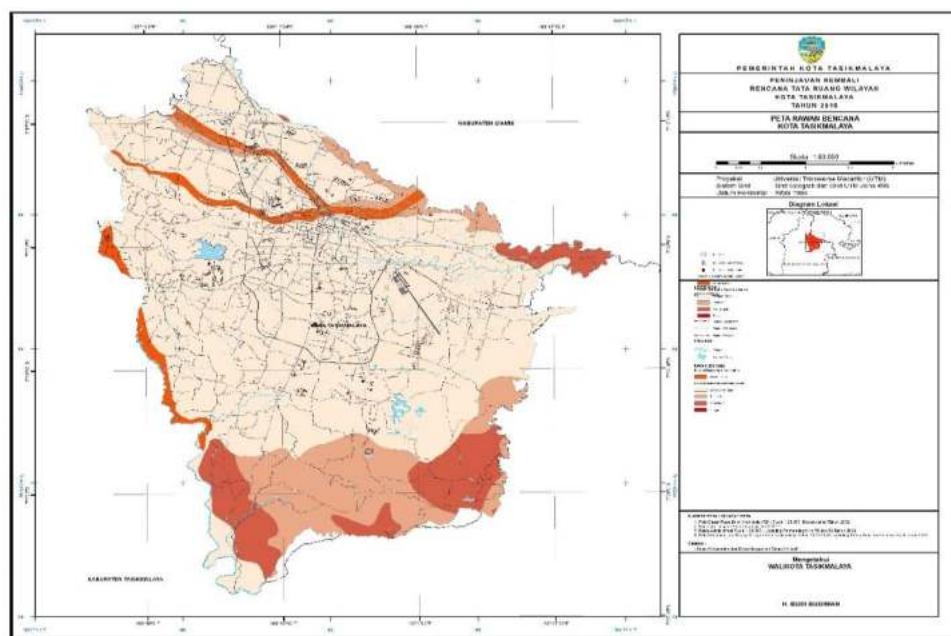
Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor. Selain itu bangunan harus berkontruksi tahan gempa (anti seismik) dan di desain tata letaknya yang aman terhadap bencana gempa.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal >45°. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhan tanah penutup, jatuh tanah bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuh atau runtuhan bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun



(arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Gambar 2.4.
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya

2.1.1.8. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,2 % per tahun, bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 1,20 %. Berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2013-2021.

Tabel 2.5.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2013-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2013	651.676	0,54
2014	654.794	0,48
2015	657.477	0,41
2016	659.606	0,32
2017	661.404	0,27
2018	662.723	0,20
2019	663.517	0,12
2020	716.155	1,20
2021	723.920	0,81

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.



Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2022.

Gambar 2.5.
Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2013-2021

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 723.920 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 367.563 jiwa dan perempuan sebanyak 356.358 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 98.810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 44.850 jiwa.

Berikut Tabel 1.2 menyajikan distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Kawalu	97,59	13,48	2.305	105,57
Tamansari	78,25	10,81	2.115	104,74
Cibeureum	69,06	9,54	3.755	102,51
Purbaratu	44,85	6,20	3.551	104,36
Tawang	60,81	8,40	8.801	99,65
Cihideung	72,73	10,05	13.345	101,60
Mangkubumi	98,81	13,65	4.119	102,82
Indihiang	58,39	8,07	5.377	102,25
Bungursari	61,55	8,50	3.493	103,50
Cipedes	81,88	11,31	9.057	103,44
Kota Tasikmalaya	723,92	100,00	3.930	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah ,2022.



Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2021 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3.930 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.345 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.115 jiwa/km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 98.810 jiwa pada tahun 2021 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 8.801 jiwa/km² pada tahun 2021, Kecamatan Cihideung 13.345 jiwa/km² dan Kecamatan Cipedes 9.057 jiwa/km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.115 jiwa/km² hingga 5.337 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,27 sampai dengan 103,14 untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2016-2021

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Ratio		
	Laki-laki		Perempuan					
	Jumlah	%	Jumlah	%				
2016	331.885	50,32	327.721	49,68	659.606	101,27		
2017	332.579	50,28	328.825	49,72	661.404	101,14		



2018	333.102	50,26	329.621	49,74	662.723	101,05
2019	333.321	50,24	330.196	49,76	663.517	100,95
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	31.122	29.643	60.765
5 – 9	28.591	27.493	56.084
10 – 14	31.819	29.646	61.465
15 – 19	31.604	30.012	61.616
20 – 24	30.414	29.696	60.110
25 – 29	29.910	28.634	58.544
30 – 34	29.274	27.652	56.926
35 – 39	27.662	26.352	54.014
40 – 44	26.324	24.577	50.901
45 – 49	23.455	22.803	46.258
50 – 54	20.341	20.322	40.663
55 – 59	17.764	17.805	35.569
60 – 64	13.605	13.779	27.384
65 – 69	10.425	10.685	21.110
70 – 74	6.089	6.817	12.906
75 +	5.341	6.499	11.840
JUMLAH	363.740	352.415	716.155

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain.



Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
 - b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien
- Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut :
- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:
 - kawasan pusat kota;
 - kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 - kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
 - kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;
 - b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi :
 - kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
 - kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.
 - c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

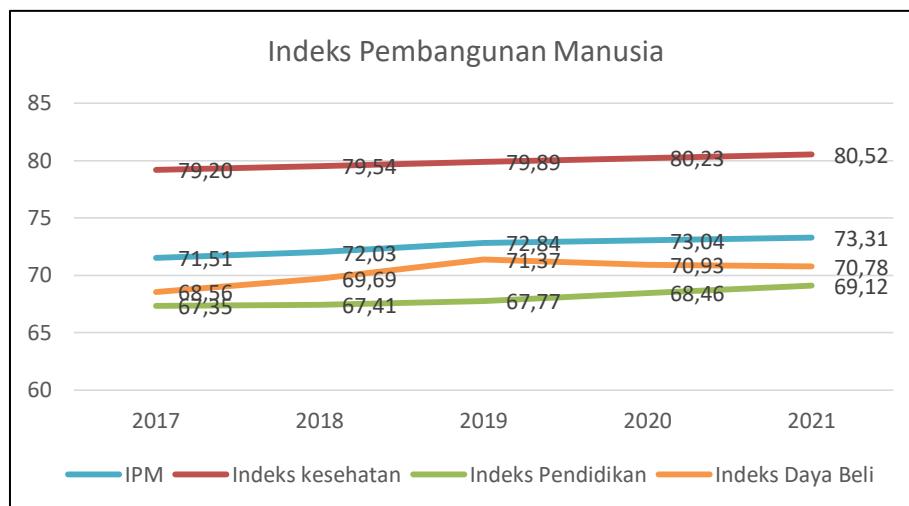
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990



dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 71,51 poin pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2021. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 79,20 poin pada tahun 2017 menjadi 80,52 poin pada tahun 2021, Indeks Pendidikan 67,35 pada tahun 2017 menjadi 69,12 poin pada tahun 2020, serta Indeks Daya Beli dari 68,56 poin pada tahun 2017 menjadi 70,78 poin pada tahun 2021. Dari ketiga komponen penghitungan IPM yang mengalami penurunan hanya Indeks daya beli, hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemic Covid-19.

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

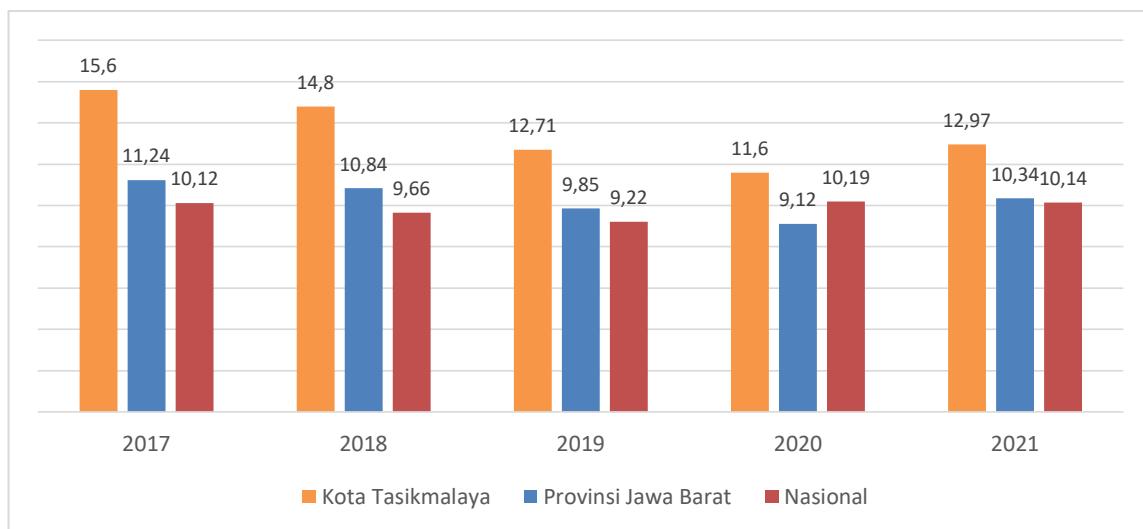


Tabel 2.9.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	14,80	12,71	11,60	12,97	13,13
Penduduk Miskin (ribu orang)	97,85	84,22	76,98	86,13	89,46
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	416,837	447,008	457,899	470,150	480,341
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,01	1,52	1,98	1,75	2,41
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42	0,31	0,53	0,39	0,69

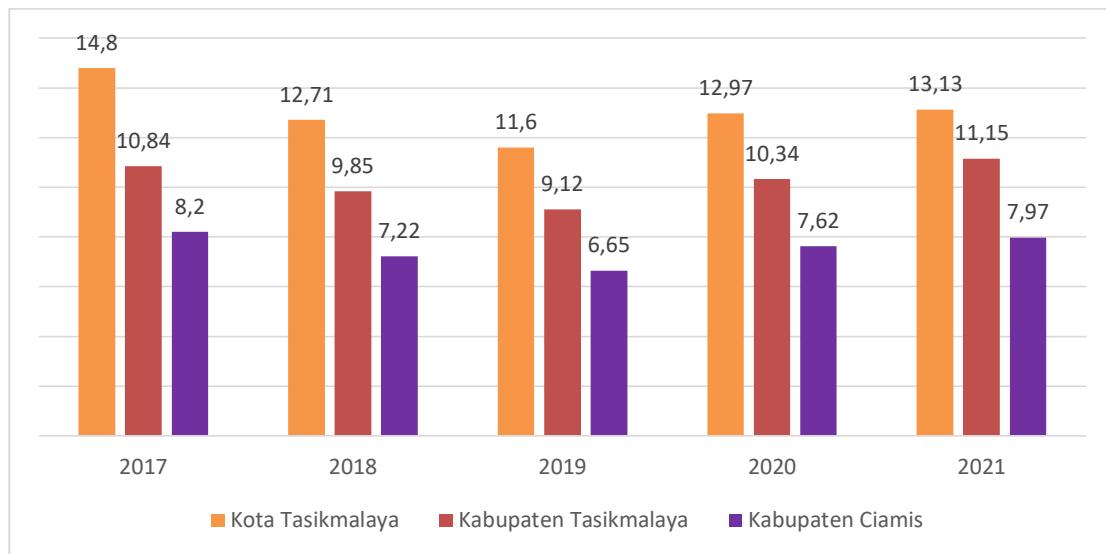
Sumber : BPS RI, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 13,13% pada tahun 2021. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.7.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah tetangga yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis maka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8.

Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 16.751,10 Milyar pada tahun 2016 dan menjadi 22.845,56 pada tahun 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12.

Tabel 2.10.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020 x	2021 x x
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	931,1	959,7	1 011,2	1 054,8	1 079,4	1 100,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,91
C	Industri Pengolahan	2 359,7	2 523,8	2 783,3	3 067,4	3 051,3	3 159,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,1	2,6	2,8	3,0	2,9	2,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	61,0	68,2	76,6	82,8	90,7	96,31
F	Konstruksi	2 603,1	2 859,7	3 175,1	3 474,5	3 341,1	3 700,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3 819,3	4 148,8	4 493,5	4 944,1	4 719,3	4 954,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1 610,3	1 764,3	1 942,1	2 084,4	2 028,6	2 072,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	782,1	887,0	1 008,5	1 150,6	1 148,6	1 209,65
J	Informasi dan Komunikasi	510,8	576,6	624,4	685,2	915,2	978,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 835,3	2 005,5	2 166,2	2 245,5	2 201,9	2 396,31



Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
L	Real Estat	254,1	283,6	317,7	351,7	360,6	397,89
M,N	Jasa Perusahaan	159,6	178,0	203,8	250,7	222,2	240,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	791,1	826,1	864,9	897,8	895,5	921,48
P	Jasa Pendidikan	301,1	348,0	389,0	444,9	483,9	511,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	330,4	372,5	414,1	468,2	501,0	547,86
R,S,T, U	Jasa Lainnya	398,2	459,9	502,8	543,7	545,5	553,75
Produk Domestik Bruto		16 751,1	18 266,0	19 977,6	21 750,9	21 589,5	22 845,56

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Keterangan : * Angka sementara ** Angka Sangat Sementara

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	641,3	645,8	644,6	644,5	658,9	660,75
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,36
C	Industri Pengolahan	1 829,6	1 908,7	2 038,7	2 196,0	2 153,5	2 194,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,4	1,5	1,6	1,7	1,6	1,68
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	46,6	49,4	52,1	54,7	59,6	63,01
F	Konstruksi	1 973,9	2 138,9	2 296,0	2 436,9	2 333,3	2 475,68
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 217,5	3 411,5	3 567,9	3 812,4	3 575,0	3 681,31
H	Transportasi dan	1 275,3	1 352,6	1 459,4	1 543,2	1 435,1	1 439,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613,7	667,5	724,8	781,5	753,5	771,50
J	Informasi dan Komunikasi	498,0	552,0	596,8	651,2	869,8	932,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 365,8	1 418,8	1 483,5	1 499,5	1 470,0	1 552,58
L	Real Estat	216,1	237,2	261,4	285,2	290,4	319,77
M,N	Jasa Perusahaan Activities	138,3	151,1	165,1	182,2	156,6	168,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	557,1	560,9	565,0	585,4	579,3	591,46
P	Jasa Pendidikan	239,2	261,9	280,0	294,0	306,5	314,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Activities	266,1	290,8	314,9	347,7	361,1	386,04



Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
R,S,T,U Jasa Lainnya Activities	344,0	378,2	405,8	428,8	424,4	425,66
Produk Domestik Bruto	13 225,2	14 027,9	14 859,1	15 746,1	15 430,0	15 981,25

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13.

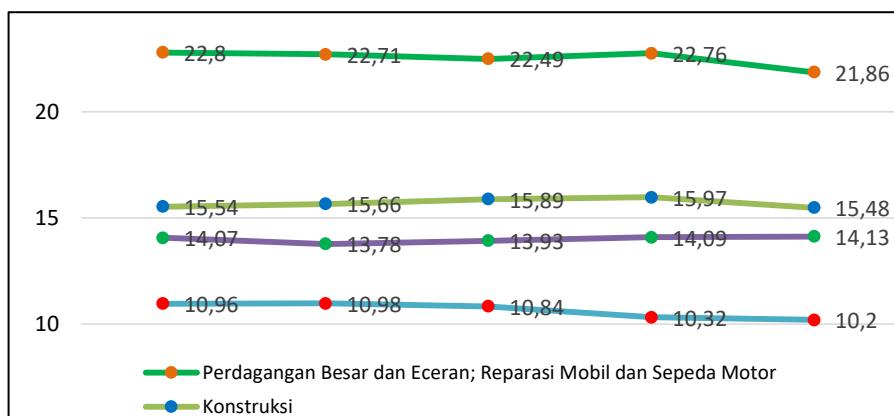
Tabel 2.12.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	5,25	5,06	4,85	5,00	4,82
B Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C Industri Pengolahan	14,09	13,82	13,93	14,10	14,13	13,83
D Pengadaan Listrik dan Gas/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Ulang	0,36	0,37	0,38	0,38	0,42	0,42
F Konstruksi	15,54	15,66	15,89	15,97	15,48	16,20
G Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	22,80	22,71	22,49	22,73	21,86	21,69
H Transportasi dan Pergudangan	9,61	9,66	9,72	9,58	9,40	9,07
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67	4,86	5,05	5,29	5,32	5,29
J Informasi dan Komunikasi	3,05	3,16	3,13	3,15	4,24	4,28
K Jasa Keuangan dan	10,96	10,98	10,84	10,32	10,20	10,49
L Real Estat	1,52	1,55	1,59	1,62	1,67	1,74
M,N Jasa Perusahaan	0,95	0,97	1,02	1,15	1,03	1,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	4,72	4,52	4,33	4,13	4,15	4,03
P Jasa Pendidikan	1,80	1,91	1,95	2,05	2,24	2,24
Q Jasa Kesehatan dan	1,97	2,04	2,07	2,15	2,32	2,40
R,S,T Jasa Lainnya	2,38	2,52	2,52	2,50	2,53	2,42
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.



Selama lima tahun terakhir (2016-2021) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2016 s.d. 2021 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2016 s.d 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

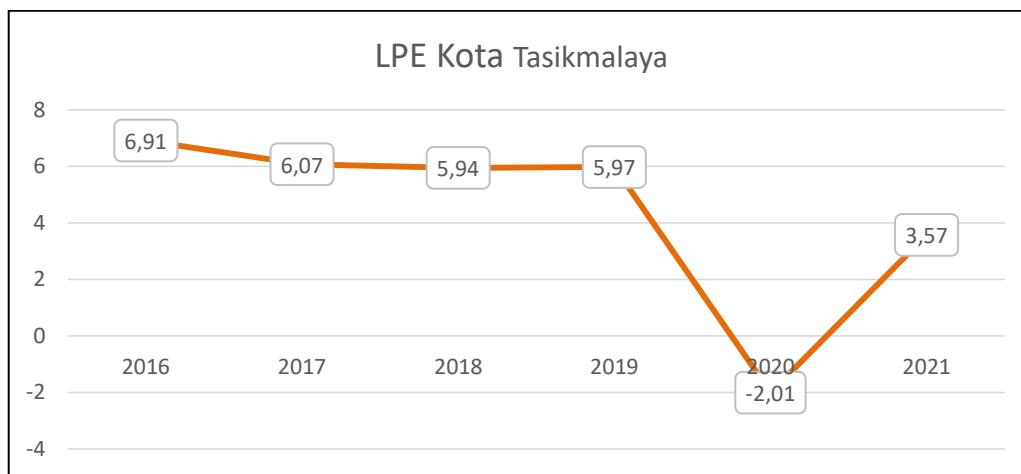
Gambar 2.9.

Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2016-2020 (Persen)

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,20 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,49 persen.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

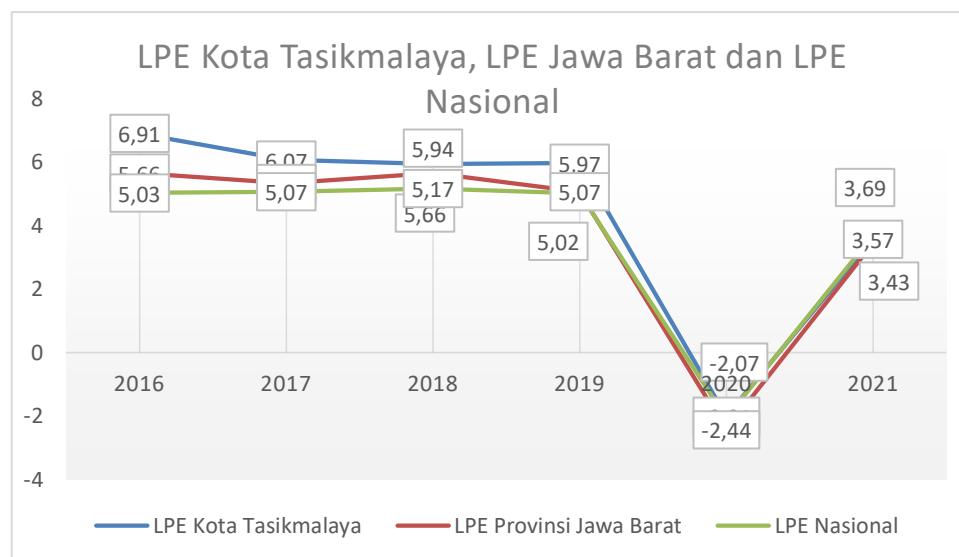
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana tahun 2016-2021, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada pertumbuhan diatas 6% namun pada tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97%. Namun seiring dengan terjadinya pandemic covid-19, sektor ekonomi mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya 2016 - 2021

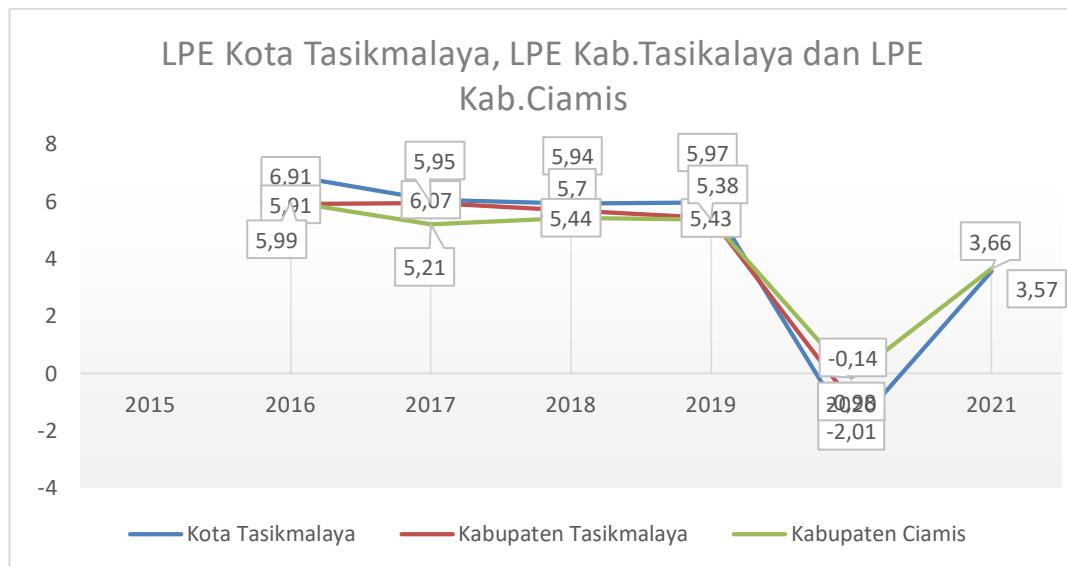
Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2020 lebih baik. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.11.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.12.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2016 - 2021

6. PDRB Menurut Penggunaan

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku), maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 13.354,04 miliar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 14.502,89 miliar rupiah (2018), 15.710,37 miliar rupiah (2019), 15.559,84 miliar rupiah (2020) dan 15.915,40 miliar rupiah (2021). Selama periode 2017-2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi,



yaitu 73,11 persen (2017); 72,60 persen (2018); 72,22 persen (2019), 72,07 persen (2020) dan 69,66 persen (2021). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 73,11 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,66 persen.

Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,82 persen s.d. 4,88 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun -2,45 persen dan 0,69. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,54 persen s.d. 4,75 persen, namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 turun -2,52% dan -7,62.

Tabel 2.13.
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya,
2017 - 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	13.354,04	14.502,89	15.710,37	15.559,84	15.915,40
b. ADHK	9.435,73	9.879,99	10.361,74	10.107,68	10.177,77
Proporsi terhadap PDRB (persen)	73,11	72,60	72,22	72,07	69,66
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	20,19	21,88	23,68	23,43	21,98
b. ADHK	14,27	14,91	15,62	15,22	14,06
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi RT	4,82	4,71	4,88	-2,45	0,69
b. Konsumsi Perkapita	4,54	4,50	4,75	-2,52	-7,62

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

b. Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 2.14.
Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)
Kota Tasikmalaya, 2017-2021



URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)					
a. ADHB	398,24	477,62	519,37	508,27	523,52
b. ADHK	306,10	347,06	362,56	350,78	356,67
Proporsi terhadap PDRB (persen)	2,18	2,39	2,39	2,35	2,28
Pertumbuhan (persen)	4,54	13,38	4,47	-3,25	1,68

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017- 2021 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT sebesar 398,24 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 447,62 miliar rupiah (2018), 519,37 miliar rupiah (2019), 508,27 miliar rupiah (2020) dan 523,52 miliar rupiah (2021).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 4,54 persen (2017), 13,38 persen (2018), 4,47 persen (2019), -3,24 persen (2020) dan 1,68 persen (2021).

c. Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara total, konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.229,88 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.270,74 miliar rupiah (2018), 2.435,33 miliar rupiah (2019), 2.463,08 miliar rupiah (2020) dan 2.483,17 miliar rupiah (2021).

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.



Tabel 2.15.
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya
2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	2.229,88	2.270,74	2.435,33	2.463,08	2.483,17
b. ADHK	1.439,57	1.429,28	1.515,98	1.510,16	1.497,68
Proporsi terhadap PDRB (persen)	12,21	11,37	11,19	11,41	10,86
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	3,37	3,43	3,67	3,71	3,43
b. ADHK	2,18	2,16	2,28	2,27	2,07
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi Pemerintah	6,67	(0,71)	6,07	-0,38	1,91
b. Konsumsi Pemerintah Perkapita	6,38	(0,91)	5,94	-0,45	0,56

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.16.
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)
PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	5.901,59	6.519,97	7.121,01	6.844,41	7.573,28
b. ADHK	4.433,46	4.749,10	5.029,51	4.800,18	5.095,88
Proporsi terhadap PDRB (persen)	32,31	32,64	32,73	31,70	33,14
Struktur PMTB (persen)					
a. Bangunan	96,41	96,59	96,76	97,12	97,21
b. Non Bangunan	3,59	3,41	3,24	2,88	2,79



URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan (persen)	8,18	7,12	5,90	-4,58	6,16

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

e. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2.17.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Tasikmalaya, 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventori (Miliar Rp)					
a. ADHB	690,91	733,24	752,84	293,91	-149,56
b. ADHK	438,44	442,04	447,57	167,52	-83,41
Proporsi terhadap PDRB (persen)	3,78	3,67	3,46	1,36	-0,006

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

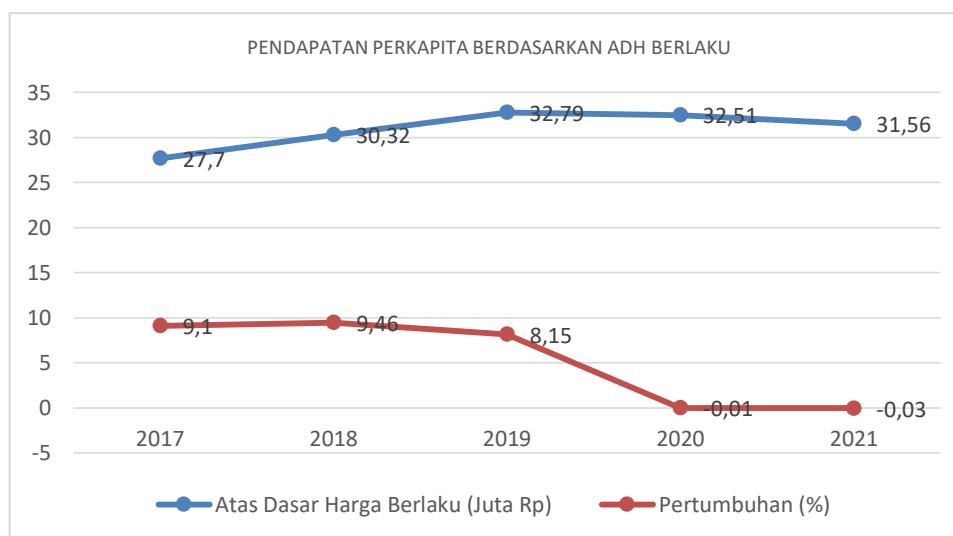
Pada tahun 2017, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 690,91 miliar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya



menjadi sebesar 733,24 miliar rupiah (2018), 752,84 miliar rupiah (2019), 293,91 miliar rupiah (2020) dan -149,56 miliar rupiah (2021). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi. yaitu 3,78 persen (2017), kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 2020, nilainya masing-masing sebesar 3,67 persen (2018), 3,46 persen (2019), 1,36 persen (2020) dan -0,006 persen (2021).

7. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya tahun 2020 sebesar Rp.32,51 juta mengalami penurunan sebesar -0,01%, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.32,79 juta. Penurunan PDRB Perkapita ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid-19, berikut capaian dari tahun 2016-2020.

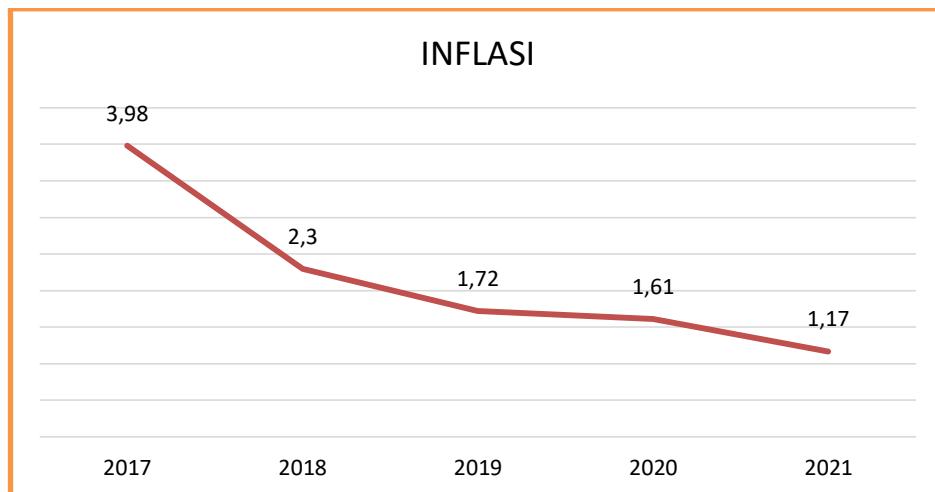


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

Gambar 2.13.
Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2017-2021

8. Inflasi

Angka inflasi Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 inflasi berada pada angka 3,98 selanjutnya terus menurun menjadi 2,23 pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,17. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.16.

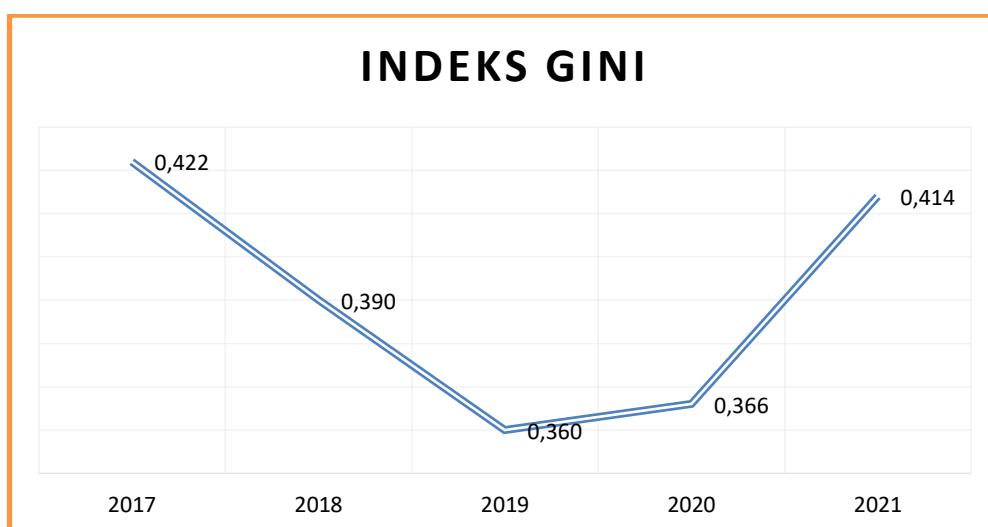


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.14.
Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (Year on year)

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.15.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2020



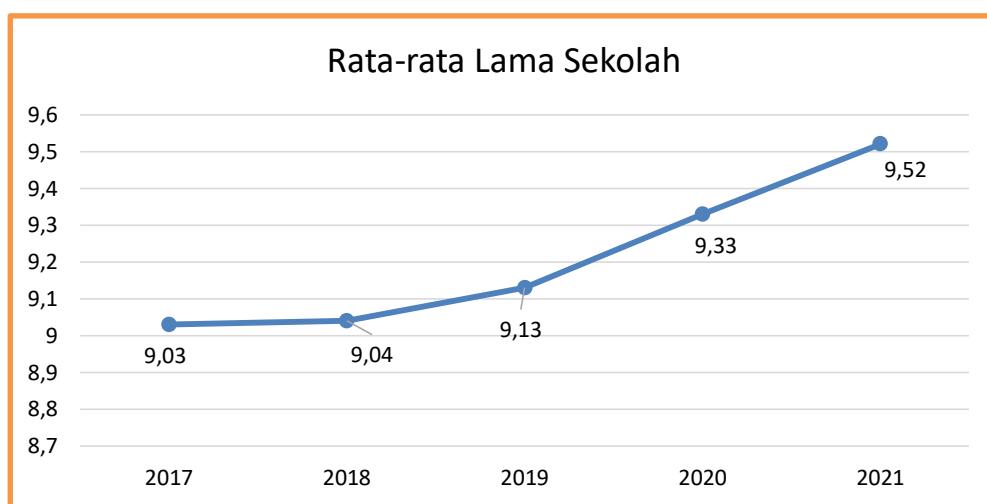
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,03 tahun meningkat menjadi 9,52 tahun pada tahun 2021 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,52 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

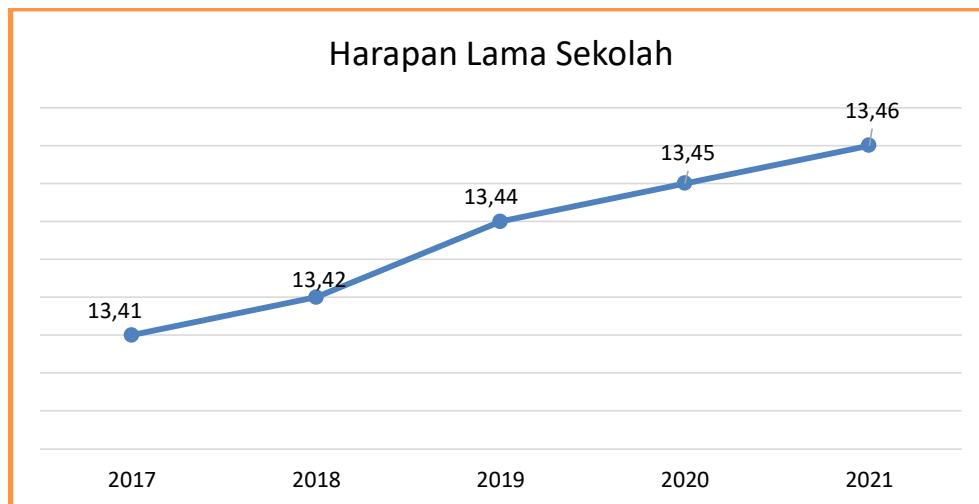


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.16.
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,4 tahun sampai 13,46 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Capaian Harapan Lama Sekolah di Kota Tasikmalaya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.17.
Capaian Harapan Lama Sekolah

2.1.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut:

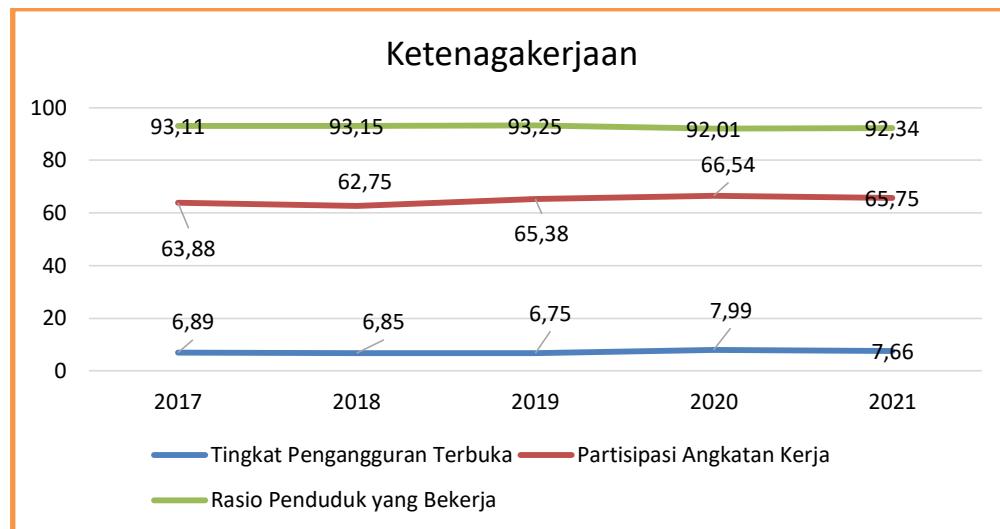
Tabel 2.18.
Gambaran Umum Kesehatan

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.	Angka Usia Harapan Hidup(thn)	71,48	71,70	71,93	72,35	72,34
2.2.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,21	0,38	0,54	1,02	0,82
2.3.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	116,75	101,00	80,00	162,25	303,87
2.4.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	6,09	5,72	5,29	6,15	8,5
2.5.	Prevalensi Stunting (persen)	12,3	11,00	10,50	20,10	14,81

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Capaian rasio penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.18.
Indikator Ketenagakerjaan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 0,33% yaitu dari 7,99% pada tahun 2020, menjadi 7,66 pada tahun 2021.

2.1.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.19.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah grup kesenian (buah)	189	173	173	173	173
Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2017 sampai dengan 2018, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang.



Tabel 2.20.
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga (buah)	260	260	260	260	260
Jumlah gedung olahraga (unit)	71	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

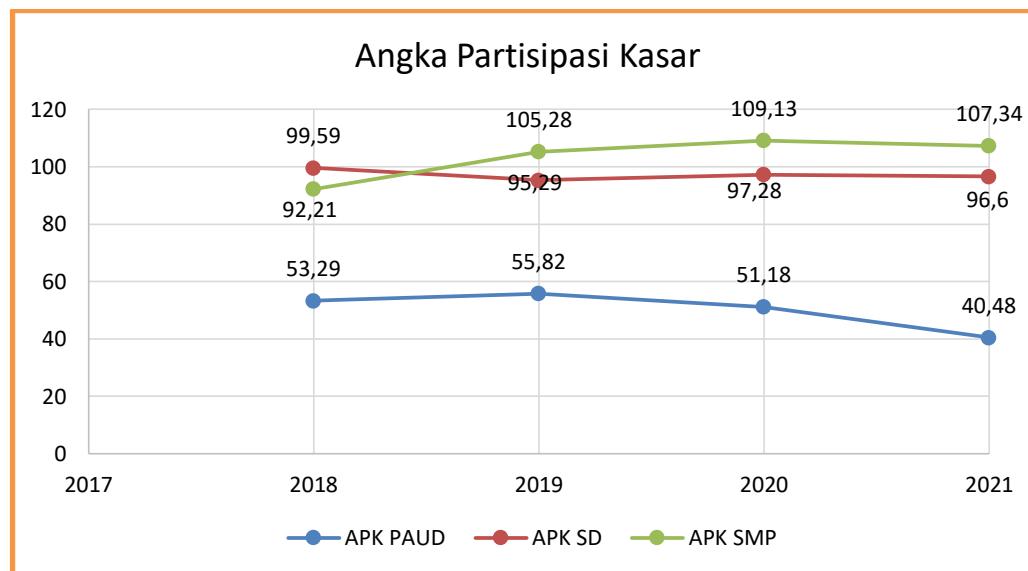
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Secara umum, persentase APK di Kota Tasikmalaya terhitung cukup tinggi. Capaian APK Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

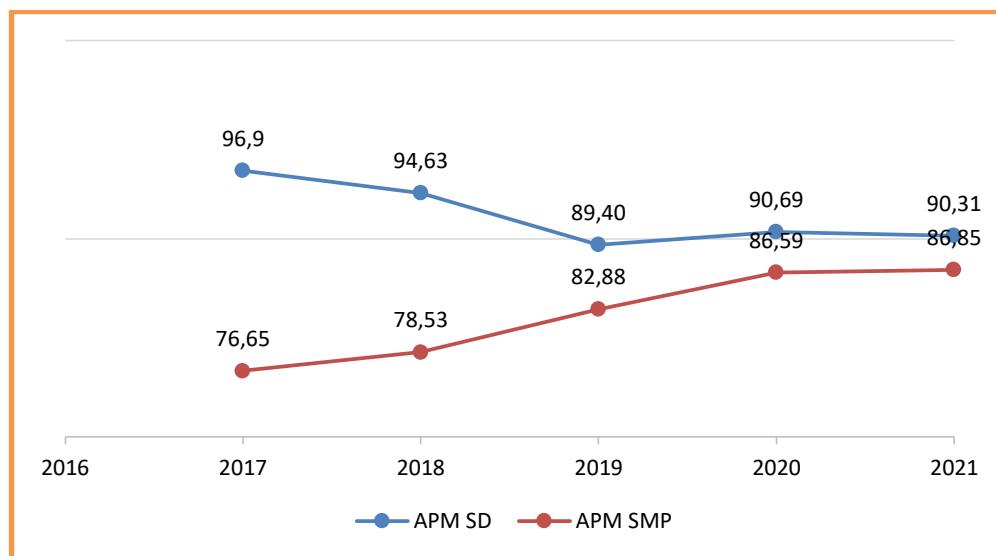
Gambar 2.19.
Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021



APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Demikian halnya di tahun 2021 kembali terjadi penurunan kembali sebesar 4,46 persen, menjadi 40,48 persen. Penurunan pun terjadi pada APK SD dan SMP, tahun 2021 APK SD sebesar 96,6 artinya turun sebesar 0,68 persen dari tahun sebelumnya, dan APK SMP sebesar 107,34 persen atau turun sebesar 1,79 persen dari tahun sebelumnya.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

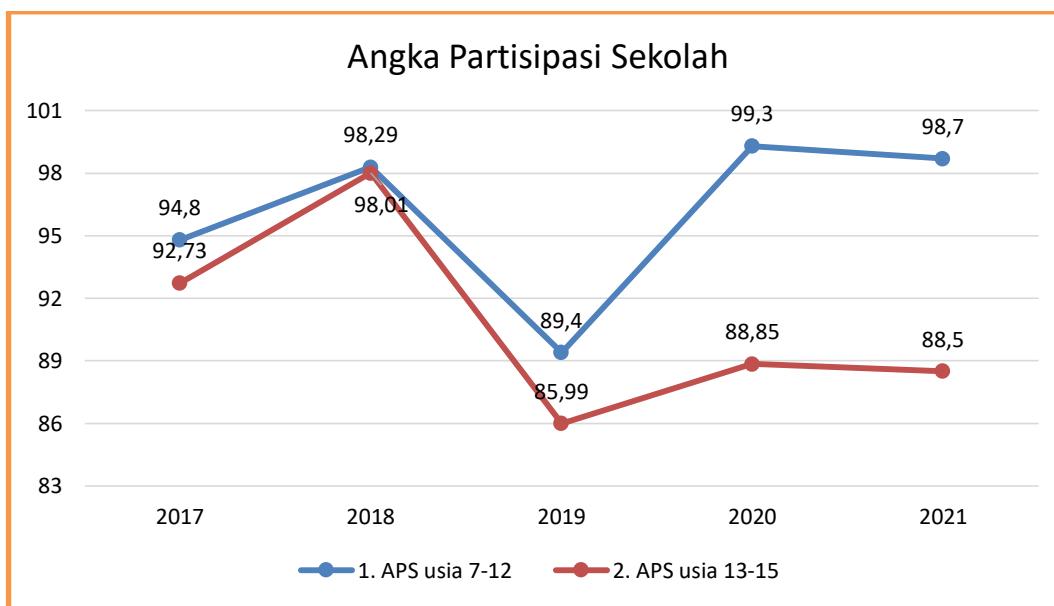
Gambar 2.20.
Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 90,31 persen sedangkan tahun sebelumnya 90,69 persen atau dengan kata lain turun sebesar 0,38 persen, yang berarti bahwa terdapat 90,31 persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat. Dan APM SMP sebesar 86,59 persen pada tahun lalu dan 86,65 persen pada tahun 2021 dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 86,65 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat.



3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Perbandingan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2021 dan 2021 untuk usia SD/MI mengalami penurunan 06 persen, yakni dari sebesar 99,30 persen menjadi 98,7 persen. Nilai APS sebesar 98,7 persen artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,7 persen, sisanya 1,3 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 88,5 persenn terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 88,85 persen. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Tasikmalaya termasuk tinggi. Semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2021

4. Ketersediaan Sekolah

Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dapat dilihat Pada tabel 2.22 berikut.

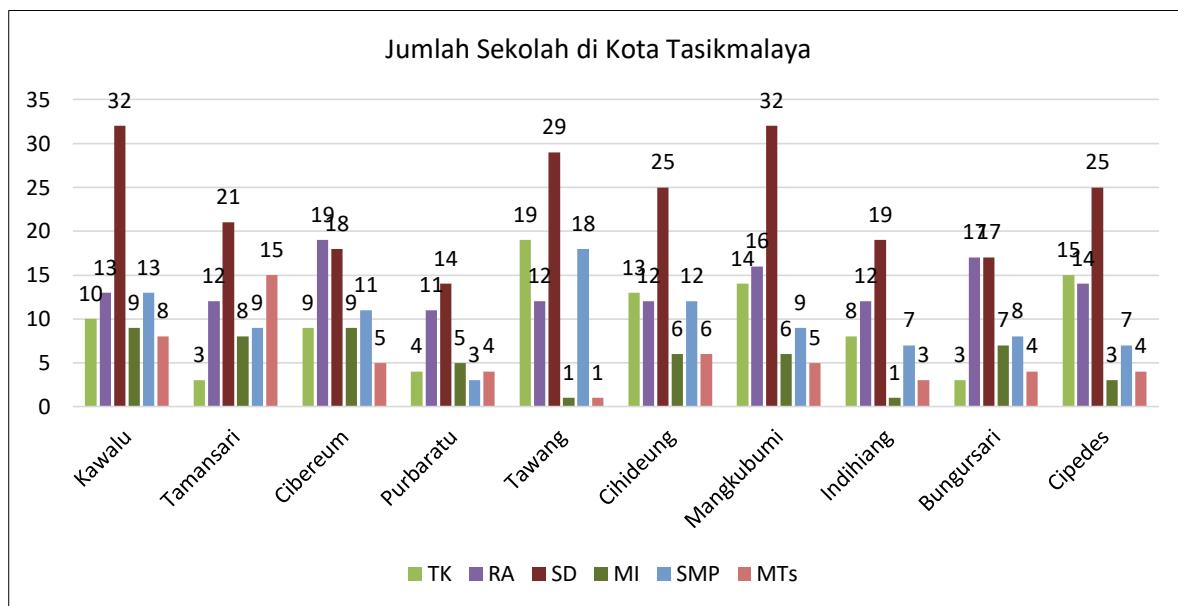


Tabel 2.21.
Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

No	Tahun	SD/MI				SMP/MTs			
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP
		Negeri	Swasta				Nege ri	Swast a	
1	2017	199	27	226	53	279	21	52	73
2	2018	199	30	229	53	282	21	53	74
3	2019	199	30	229	53	282	21	54	75
4	2020	199	32	231	55	286	21	76	97
5	2021	199	33	232	55	286	21	60	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

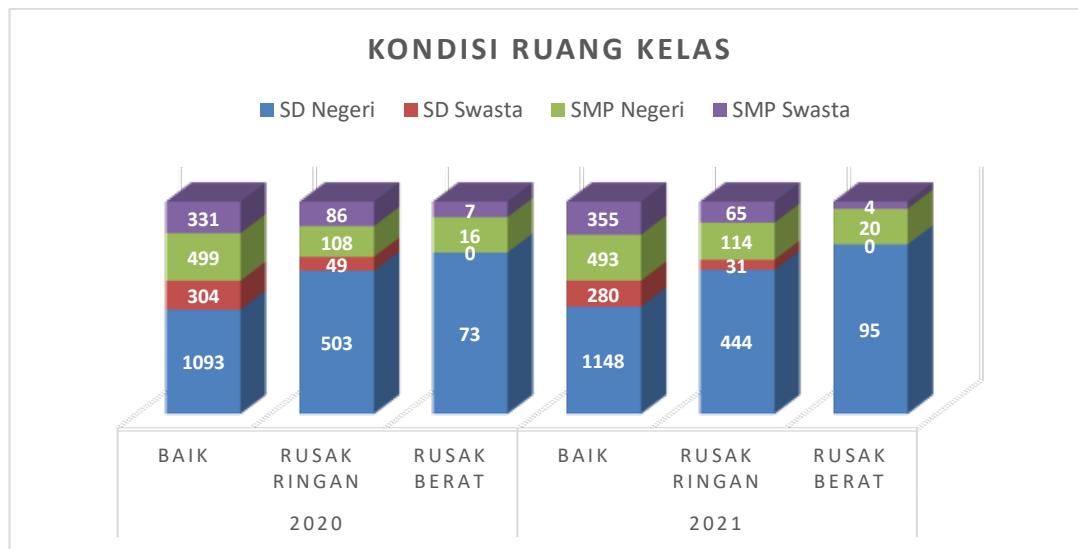
Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.21, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.22.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021

Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2022.

Gambar 2.23.
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021

5. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2.22.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	2.975	64.278	2.299	1 : 21,60	1 : 28,00
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82

Sumber: : Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan 2022

Tabel 2.23. di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 19,58. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1: 30,82, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.



Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel walaupun kembali mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio guru dengan murid menunjukkan penurunan yaitu 1:16,17 dari tahun sebelumnya 1 :17,2. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 16 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1:27,19 sedangkan tahu sebelumnya 1: 23,8 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.23.
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid
SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2017	1.628	28.755	964	1 : 17,7	1 : 29,8
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1: 27,19

Sumber: : Dinas Pendidikan, 2022

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.

Tabel 2.24.
Jumlah Murid Program Paket A, B dan C
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Kecamatan	2019			2020			2021		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cihideung	7	57	262	6	33	128	10	84	271
2	Cipedes	-	20	131	-	112	254	-	81	217
3	Tawang	-	42	180	8	34	129	10	39	105
4	Indihiang	-	82	177	-	86	275	1	39	95
5	Kawalu	-	118	439	-	135	400	8	114	296
6	Cibeureum	7	159	377	2	175	363	-	98	281
7	Tamansari	19	157	431	20	201	486	1	241	464
8	Mangkubumi	-	41	151	-	69	209	2	90	248



No	Kecamatan	2019			2020			2021		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Bungursari	6	53	116	-	49	110	3	45	137
10	Purbaratu	2	89	193	13	123	297	11	146	315
Kota Tasikmalaya		41	818	2.457	49	1.017	2.651	46	977	2.429

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2018 s.d.2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25.

Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 s.d. 2021

No	Tingkatan Sekolah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar	133.838	192.197	195.569	205.221
2	Sekolah Menengah Pertama	52.437	113.427	121.863	109.851
3	Sekolah Menengah Atas	69.575	149.697	158.909	164.661
4	Perguruan Tinggi	52.493	38.592	39.556	41.270

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka (BPS), 2019 s.d. 2022

Tabel 2.26 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021, didominasi oleh tamat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 39,39 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 21,08 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 31,60 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya.

7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Indikator Pelayanan
Urusan Pendidikan Tahun 2018- 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	53,29	55,82	51,18	40,48



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket	%	97,56	95,29	97,28	96,06
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	103,55	105,28	109,13	107,34
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,70	89,40	90,69	90,31
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,30	82,88	86,59	86,65
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	%	98,29	89,40	99,30	98,7
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	%	98,01	85,99	88,85	88,5
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD/MI (per 10.000)	%	36,63	36,05	37,66	37,77
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000)	%	33,22	33,87	35,06	35,76
11	Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)	Poin	532,12	490,14	518,04	503,23
12	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	Poin	785,11	686,57	687,64	686,61
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	Poin	0,22	0,20	0,20	0,19
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	poin	0,53	0,48	0,58	0,43
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	70,02	69,85	71,45	72,28
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84,68	78,78	78,81	78,94
17	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100
18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100
19	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus	%	100,00	100,00	100,00	100
20	Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100
21	Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B	%	100,00	100,00	100,00	100
22	Persentase Capaian Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	%	95,35	88,94	92,90	96,71
23	Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung	%	90,00	90,00	100,00	90,91
24	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP	%	35,90	16,67	11,54	34,78
25	Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS	%	100,00	100,00	100,00	100
26	Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100
27	Tingkat Partisipasi anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	-	7,02
28	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	-	-	-	100
29	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	-	-	-	78,55
30	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	-	-	-	71,40



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
31	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	-	-	-	66,48
32	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	%	-	-	-	70,97
33	Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan	%	-	-	-	100,00
34	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	-	-	-	100
35	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik	%	-	-	-	53,23
36	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	-	-	-	34,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Indikator Pelayanan
Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	40	42,3	29,53	40,75
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6,72	5,29	8,35	8,35
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	151,6	93,94	202,55	303,87
4	Prevalensi Stunting	%	10,8	10,95	17,57	14,81
5	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	43,13	54,15
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	95,45	95,5
7	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin	%	99,01	99,06	100,00	80,31
8	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	79,3	85,20	48,57%	66,6
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	94,9	97,9	81,62	-
10	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	59,44	39,47	41,37	40,83
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,37	0,545	1,02	0,82
12	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan	%	65,6	67	15	38,21



No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
	Olahraga yang memenuhi standar					
13	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	66	81	36,37	77
14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	24,9	42,5	40,63	71
15	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	70,75	72,5	100	75,17
16	Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	61,5
17	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	50,5
19	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	100	100	95,45	95
20	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	94,25	88,05	100	100
21	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	96,31	100	100	100
22	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	80	95	100	100
23	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	100	100	100	100
24	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	82,09	82,13	82,25	100
25	Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo	kategori	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
26	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	80,79	80,77	71	100
27	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	63,85	66,15	N/A	83
28	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo	%	82,05	82,05	N/A	64,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada table berikut.

Tabel 2.28.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo
2	Kawalu	2	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
3	Karanganyar	3	RS Jasa Kartini
4	Tamansari	4	RSB dr. Hj. Karmini EH
5	Cibeureum	5	RS Tasik Medika Citratama (TMC)



No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
6	Purbaratu	6	RSB UMMI
7	Kahuripan	7	Sayang Bunda
8	Tawang	8	RSIA Widaningsih
9	Cihideung	9	RS Syifa Medina
10	Cilembang	10	RSIA Bunda Aisyah
11	Mangkubumi	11	RS Prasetya Bunda
12	Sambongpari	12	RS Permata Bunda Tasikmalaya
13	Indihiang	13	Fasilitas Kesehatan lainnya 6 unit
14	Parakanyasag		
15	Bungursari		
16	Sukalaksana		
17	Bantar		
18	Cipedes		
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkali		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.

**Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	
5	Perawat	611	939	1.550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	



No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi beberapa lingkup sub urusan, yaitu jalan kota, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, tata bangunan dan pemukiman. Adapun pembahasan mengenai tiap sub urusan sebagaimana uraian dibawah ini.

A. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.30.
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	403,910	411,302	379,525	397.157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	89,61	91,25	84,2	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	29,100	37,470	16,083	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	14,55	18,74	8,04	9,80
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	65,73	80,42	45,90	42,275



Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	21,91	26,81	15,3	14,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.31.
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Panjang pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	21,51	26,81	37,03	26,69
Capaian pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	71,7	80,93	123,43	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.32.
Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	0,7	0,9	2,45	3,425
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	10,93	14,05	38,25	53,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.



B. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	58	68,49	79,94	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	117,15	138,36	161,47	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	13,9	27,2	5,95	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	5,56	10,88	2,38	10,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

C. Tata Ruang

Kinerja Tata Ruang selama tahun 2018-2021 mengalami peningkatan baik pada pemberian ijin maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Selain itu pada tahun 2019, terdapat 6 rencana detail tata ruang yang disusun.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Capaian ijin pemanfaatan ruang	%	86	88	91	87,18
Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	95	96	97	97,15
Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	Dokumen	-	6	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



D. Tata Bangunan

Capaian realisasi bangunan sesuai ijin bahwa pada tahun 2021 terealiasasi 97,37%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat rekomendasi teknis bangunan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat tertangani seluruhnya. Sedangkan untuk pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan hanya terealisasi 94,87%. Lebih lengkapnya capaian tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Capaian realisasi bangunan sesuai ijin	%	100	100	99,4	97,37
Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan	%	100	95,99	96	94,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Untuk kondisi bangunan Pemerintahan khususnya Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tahun 2021 yang memiliki kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 Gedung, sedangkan yang mengalami kerusakan berat sudah berkurang menjadi 1 gedung. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.36.
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2018 - 2021

No	Kondisi Bangunan	Gedung Kecamatan	Gedung Kelurahan
1	Baik	3	11
2	Rusak Ringan	4	45
3	Rusak Sedang	3	11
4	Rusak Berat	4	1
5	Kontruksi Dalam Penggerjaan (KDP)	0	1
	Total	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



E. Permukiman

Sub urusan permukiman pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur lingkungan (jalan dan drainase), pemenuhan air minum dan akses terhadap sanitasi.

Jalan lingkungan di Kota Tasikmalaya sepanjang 1.941,759 Km, jalan lingkungan tersebut dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37.
Kondisi Jalan Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	50,324	219,169	219,007	59,874
Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	2,59	13,88	25,18	28,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Panjang drainase yang ditangani pada tahun 2021 sepanjang 50.990 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.38.
Kondisi Drainase Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
Drainase Lingkungan yang ditangani	m	19.399	143	27,341	50,990
Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	20,77	20,92	50,20	54,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya berdasarkan *baseline* yang tertuang dalam RPJMD yang mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 180.442 KK adalah sebesar 99.892 KK (55,36 %). Capaian untuk tahun 2021 realisasi KK yang berakses SPAL sebanyak 281 KK / 61,20%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.39.
Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
Realisasi KK berakses SPAL	KK	5.945	3.184	130	281
Capaian KK berakses SPAL	%	58,65	60,42	60,54	61,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Sedangkan Kepala Keluarga yang berakses air minum di Kota Tasikmalaya yang mengacu kepada *baseline* RPJMD yang mengacu kepada jumlah KK sebanyak 180.442 KK. Capaian untuk tahun 2021 capaian akses air minum sebanyak 1.894 KK / 56,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40.
Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	310	3.941	114	1.894
Capaian KK berakses Air Minum	%	53,33	55,51	55,58	56,23

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%	26,66	35,25	47,61	54,15
2	Persentase penanganan kawasan kumuh	%	61,65	97,78	98,88	99,23
3	Jumlah PSU yang diserahterimakan dan Jumlah PSU yang diverifikasi	Unit	5/31	19/20	0/0	12/16
4	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	3333	1075	1043	1320
5	Persentase PSU yang diverifikasi	%	15,61	22,68	22,68	28,62
6	Persentase PSU yang diserahterimakan	%	7,06	14,13	14,13	18,58
7	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	61,65	97,78	98,88	99,23
8	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	26,66	35,25	47,61	54,15
9	Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	-	100	100



Target Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 adalah sebanyak 5.000 unit rumah, realisasi tahun 2021 sebanyak 1320 unit sehingga secara total sebanyak 6.771 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.43.

Tabel 2.42.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah				Total
		2018	2019	2020	2021	
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni	Unit	3.333	1.075	1.043	1320	6.771

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022.

Berdasarkan pencapaian diatas, penanganan target RTLH yang merupakan janji politik sudah terpenuhi bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Namun mengacu kepada pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 yang merupakan baseline penyusunan RPJMD jumlah RTLH yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sebanyak 12.504 unit. Sehingga jika melihat dari penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 masih tersisa 5.733 unit rumah masih perlu rehabilitasi. Akan tetapi data tersebut, diperlukan pemutakhiran dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data RTLH pada aplikasi e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar berdasarkan identifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada Tahun 2016. Dan pada tahun 2018 hasil Updating RP2KP-KP Program KOTAKU, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 105,92 hektar. Untuk tahun 2019 sisa luasan kumuh sebesar 6,14 hektar dan pada tahun 2020 sisa luasan kumuh seluas 3,1 hektar dan pada tahun 2021 sisa luasan kumuh sebesar 2,13 Ha yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2022.

Kemudian pada tahun 2021, dilakukan identifikasi kembali terhadap kawasan kumuh di wilayah Kota Tasikmalaya. Hasil identifikasi terdapat kawasan



kumuh seluas 168,49 Hektar yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43.
Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	ARGASARI	Argasari	Cihideung	3,78
2	CIPALAYUNG	Cipedes-Panglayungan	Cipedes	15,40
3	CIPANYIR	Cipedes-Panyingkiran	Cipedes-Indihiang	16,31
4	INDIHIANG	Indihiang	Indihiang	1,59
5	PARAKANYASAG	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	SUKAMAJU KALER	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	TUGURAJA	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	CIKALANG	Cikalang	Tawang	2,80
9	PURBARATU	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	SUKAJAYA	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	SUKAMENAK	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	MUGARSARI	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	SETIAWARGI	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	SUMERANG	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00
15	CIAKAR	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	KOTABARU	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	SETIAJAYA	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	MARGABAKTI	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	BUNGURSARI	Bungursari	Bungursari	3,22
20	SUKAJAYA	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	CIBEUTI	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	URUG	Urug	Kawalu	11,50
23	LEUWILILANG	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	TANJUNG	Tanjung	Kawalu	3,47
25	CIGANTANG	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	KARIKIL	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				168,49

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

Prioritas selanjutnya dalam urusan perumahan dan permukiman adalah verifikasi dan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan formal. Dari *baseline* jumlah perumahan formal tahun 2017 sejumlah 269 unit perumahan sampai dengan tahun 2021 sudah 50 unit perumahan yang telah diserahterimakan (18,58 %) dan yang telah diverifikasi sebanyak 77 unit perumahan (28,62 %).



Tabel 2.44.
Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi
Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Basis Data	Jumlah				Total
			2018	2019	2020	2021	
Verifikasi PSU	Unit	0	41	20	0	16	77
Serah Terima PSU	Unit	14	5	19	0	12	50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas

Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara	%	100	100	100	100
2	Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal	%	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100
4	Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100
5	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100
6	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	100	100	100	100
7	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%	80	86	-	-
8	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	1,018	1,02	0,88	2,27
9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	54,66	60,49	52,23	53,95
10	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	49,26	22,95	22,95	26,30
11	Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	86	84	91,83	100
12	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	75	100	100	100
13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	100	100	100	100
14	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	0,00557	0,00557	0,00529	0,00539



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
15	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	96,1	95,87	95,87	96,1
16	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	84,8	84	84,61	85,71
17	Persentase penegakan perda dan perkada	%	86	84,84	98,54	86,13
18	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	100	100	100	100
19	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	81,75	-	-	100
20	Angka Kriminalitas	Point	5,11	5,51	5,88	-
21	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	100	100	100	100
22	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	%	94	100	100	100
23	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	100	100	100	100
24	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	9,52	1,26	8,76	-
25	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	100	100	100	-
26	Capaian pelatihan anggota linmas	%	10	65,22	71,20	-
27	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	25	94,85	94,85	-
28	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	94	100	100	-
29	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	24	75	78,26	76,2
30	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	6	100	100	100
31	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatn yang tangani	%	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,BPBD, KesbangPol , 2022.

Tabel 2.46.
Kejadian Bencana Tahun 2017-2021

No.	Bencana	Kejadian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angin Putting Beliung	14	4	11	-	3
2.	Pohon tumbang	111	16	26	13	43
3.	Rumah Roboh	165	49	49	75	94
4.	gempa bumi	4	1	3	2	0
5.	longsor	48	20	34	28	37
6.	banjir	11	11	12	2	6
7.	Tersambar petir	4	5	10	6	4
8.	Gerakan Tanah	2	3	4	12	3
9.	Kekeringan	43	116	-	-	-
10.	Pandemi Covid-19	-	-	-	1	1
	Jumlah	402	225	149	138	214

Sumber : BPBD Kota Tasikmalaya, 2022.



2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian layanan urusan sosial dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	66,88	79,89	79,9	79,9
2	Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100
3	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	13,95	13,95	15	16
4	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	100	100	100	100
5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.48.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	301.619	322.887	343.285	342.585
1. Bekerja	280.959	301.081	315.844	316.349
2. Pengangguran Terbuka	20.660	21.806	27.441	26.236
Bukan Angkatan Kerja	179.049	170.976	172.612	178.418
Jumlah	480.668	493.863	515.897	521.003
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,15	93,25	92,01	92,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	62,75	65,38	66,54	65,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	6,75	7,99	7,66

Sumber : Data Sakernas BPS



Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2021 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 342.585 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 316.844 orang atau 92,34 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 26.236 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 7,66 persen.

Tabel 2.49.
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bekerja	290.396	93,11	280.959	93,15	301.081	93,25	315.844	92,01	316.349	92,34
Pengangguran	21.478	6,89	20.660	6,85	21.806	6,75	27.441	7,99	26.236	7,66
Angkatan Kerja	311.874	100,00	301.619	100,00	322.887	100	343.285	100	342.585	100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK.

Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,85	6,75	7,99	7,66
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,75	65,38	66,54	66,54
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	45,83	57,55	23,68	23
4	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	87	100	0	163
5	Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan	%	n/a	17,75	18,83	-
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	n/a	100	-	-
7	Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan	%	n/a	10,71	-	-
8	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	%	-	-	15,5	15,58
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	-	100
10	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	-	24,96

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2022.



2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	SKOR	n/a	699,7	n/a	756

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.3. Pangan

Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangannya energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 91,6 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	104,35	110,5	121,6	-
2	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	98	100,6	100,6	-
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	86,11	75	66,67	-
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	33,07	82,09	-	-
5	Peningkatan Pangan Keanekaragaman Konsumsi Pangan	%	65,17	43,39	-	-
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80	100	-
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	6,25	81,25	0	-
8	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	poin	-	-	-	91,3



No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
9	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	poin	-	-	-	91,5
10	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	-	-	-	0
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	-	-	-	110,6
12	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	-	-	-	124,9
13	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	-	-	-	66,67
14	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	-	-	-	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2022.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Capaian layanan urusan pertanahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.
Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	58,17	62,68	62,68	-
2	Capaian pengelolaan data pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target)	%	10	20	100	-
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	-
4	Penyelesaian izin lokasi	%	93,33	93,33	62,68	-
5	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	10	20	20	50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	8,56	10,3	10,3	10,3
2	Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani	%	59,35	71,04	71,45	73,86
3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Point	(IKA=49,03, Sedikit Memenuhi), (IKU=71,38 5, Cukup))	(IKA = 51,83 Sedikit Memenuhi), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik	(IKA = 72,37 Memenuhi), (IKU = 78,20, Baik)	(IKA = 64,52 Memenuhi), (IKU = 83,82 Baik)



No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
4	Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup	%	100	100	100	-
5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	62,34	71,04	71,45	73,86
6	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	22,22	27,78	33,33	-
7	Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	23,99	46,24	46,24	-
8	Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan	%	34,38	35,18	55,14	-
9	Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani	%	21,74	0	0	-
10	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	56,76	58,98	60,93	61,23
11	Capaian Pengurangan Sampah	%	2,59	12,05	10,52	12,62
12	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dokumen	-	-	-	50
13	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	-	-	-	100
14	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	100
15	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	150

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan RTH

Dalam rangka menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, maka dinas lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas ditampilkan pada tabel.

Tabel 2.55.
Pembebasan Lahan untuk RTH

No.	Nama Gunung	Lokasi		Luas (m ²)	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1	Gunung Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	35.796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2	Gunung Kiara	Bungursari	Bungursari	10.162	2011	KPLH
3	Gunung Tengah	Bungursari	Bungursari	4.555	2013	KPLH
4	Gunung Pondok	Bungursari	Bungursari	5.410	2013, 2014	KPLH
5	Gunung Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	6.707	2013	KPLH
6	Gunung Bondan	Sukajaya	Bungursari	1.027	2014	KLH
7	Gunung Jambore	Sukalaksana	Bungursari	3.965	2014	KLH
8	Gunung Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	2.200	2017	DLH
9	Gunung Putri	Cibunigeulis	Bungursari	12.677	2018	DLH
10	Gunung Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	20.453	2017, 2018, 2019	DLH
Jumlah				102.952		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.



Selain bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey Luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha. Yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU Milik Pemerintah 12,27 Ha.

Tabel 2.56.
Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	4,2592
2	Taman Lapang Cigeureung	0,7661
3	Alun Alun Indihiang	0,6104
4	Taman STIA	0,3983
5	Taman Unsil	1,0653
6	Taman Kota	0,5524
7	Alun Alun	1,2789
8	Taman Mesjid Agung	0,2998
9	Taman Bale Wiwitan	0,3231
10	Pulau Jalan Padayungan	0,0143
11	Taman Batas Kota Indihiang	0,061
12	Taman Batas Karangresik	0,0552
13	Pulau Jalan Simpang	0,015276
14	LinggaJaya	
15	Pulau Jalan Tugu HZ. Mustofa	0,048531
16	Taman Kelurahan	0,478663
17	Panglayungan	
18	Pulau Rancabango	0,103591
19	Taman Warga Cigeureung	0,12254
20	Taman Kantor Kecamatan Bungursari	0,070313
21	Bungursari	
22	Taman Bale Kota	1,63562
23	Taman Rancabango	0,084054
24	Taman Lapang Sukamulya	0,386429
25	Taman Lapang Indihiang	0,71163
26	Taman Lapang Karikil	0,511412
27	Taman Lapang Singkup	0,356596
28	Taman Lapang Cibeureum	0,391096
29	Taman Lapang Kersamenak	0,621324
30	Taman Lapang Karanganyar	0,555187
31	Taman Lapang Urug	0,76202
32	Taman Lapang Sukamanah	0,444031
33	Taman Lapang Parakannyasag	0,201526
34	Taman Lapang Linggajaya	0,525796
35	Taman Lapang Mangkubumi Babakan Kadu	0,303121
36	Taman Lapang Cipari	0,434877
37	Taman Makam Pahlawan	0,842326
38	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
39	Pulau Jalan Sutisna Senjaya	0,009486
40	Pulau Jalan Tanuwijaya	0,007839
41	Pulau Jalan Tentara Pelajar	0,004891
42	Tugu Asmaul Husna	0,003997
43	Tugu Kelom Geulis	0,006178



No	Nama	Luas (Ha)
44	Tugu Canting Batik	0,007992
45	Pulau Jalan RE. Martadinata	0,009398
46	Tugu Simpang Lima	0,004373
47	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726
48	Pulau Jalan Cilolohan	0,00262
49	Pulau Jalan Gn. Sabeulah	0,001673
50	Taman Lapang Cintalangu Cihurip	0,354877
	Total	19,717823

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan, pemantauan kualitas air dan udara, penanganan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan;

Pemantauan kualitas air dan udara

Tabel 2.57.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

No	Lokasi Sampel	IP	IKA Existing	NSF
1	Sungai Ciloseh Hulu	Ringan	Memenuhi	78,35247209
2	Sungai Ciloseh Tengah	Sedang	Ringan	66,50133187
3	Sungai Ciloseh Hilir	Ringan	Memenuhi	70,79967655
4	Sungai Cikalang Hulu	Ringan	Memenuhi	71,32647393
5	Sungai Cikalang Tengah	Sedang	Ringan	67,55471757
6	Sungai Cikalang Hilir	Ringan	Ringan	63,8308001
7	Sungai Cilamajang Hulu	Ringan	Memenuhi	73,84768157
8	Sungai Cilamajang Tengah	Ringan	Memenuhi	73,56240048
9	Sungai Cilamajang Hilir	Ringan	Memenuhi	76,93233216
10	Sungai Cibangbay Hulu	Ringan	Memenuhi	76,8981448
11	Sungai Cibangbay Tengah	Ringan	Memenuhi	76,45836893
12	Sungai Cibangbay Hilir	Ringan	Memenuhi	72,37863853
Avg NSF				72,37025321
Status				Memenuhi Baku Mutu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Tabel 2.58

Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

Peruntukan	Tahap I Kadar SO ₂	Tahap I Kadar NO ₂	Tahap II Kadar SO ₂	Tahap II Kadar NO ₂	Ieu SO ₂	Ieu NO ₂	Ieu NO ₂ & SO ₂	IKU	Ieu Gabungan	IKU Gabungan	Ket
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³							
Pemukiman	17,50	5,20	10,13	6,32	0,6 ₉	0,14	0,42	82,3 ₇	0,49	78,20	Baik



Peruntukan	Tahap I Kadar SO ₂	Tahap I Kadar NO ₂	Tahap II Kadar SO ₂	Tahap II Kadar NO ₂	Ieu SO ₂	Ieu NO ₂	Ieu NO ₂ & SO ₂	IKU	Ieu Gabungan	IKU Gabungan	Ket
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³							
Transportasi	9,85	20,45	14,12	20,98	0,60	0,52	0,56	74,53			
Industri	23,27	8,71	12,68	7,93	0,90	0,21	0,55	74,81			
Perkantoran	18,42	11,26	5,29	11,80	0,59	0,29	0,44	81,09			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Indeks kualitas udara berdasarkan lokasi sampel Permukiman, Transportasi, Industri dan Perkantoran. Nilai IKU paling tinggi diperoleh dari lokasi kawasan permukiman dan paling rendah di kawasan transportasi. Hal tersebut menggambarkan di area permukiman memiliki kualitas udara lebih baik dibandingkan di area transportasi.

Tabel 2.59.

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air	50	45,83	51,38	72,37	64,52
2	Indeks Kualitas Udara	79,6	71,85	81,32	78,20	83,82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Nilai IKA Kota Tasikmalaya yaitu 72,37 dengan klasifikasi predikat memenuhi baku mutu. Nilai IKU 78,20 dengan klasifikasi baik.

Penanganan Pengaduan

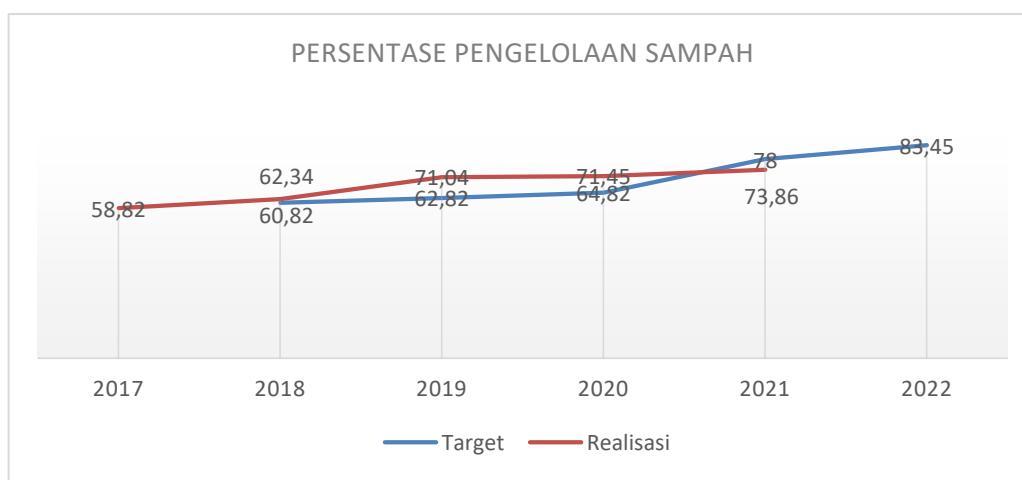
Tabel 2.60.

Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
1	2	11	4	6	23

3. Pengelolaan Persampahan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yaitu sebesar 315,11 Ton/Hari atau 114.650,15 Ton. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton, atau 61,23 % dan sampah yang dikurangi tahun 14.519,60 Ton atau 12,61%. Rata-rata timbulan sampah masyarakat Kota Tasikmalaya 3,63 L/Jiwa/Hari (Dokumen Kajian Timbulan Sampah, 2017).

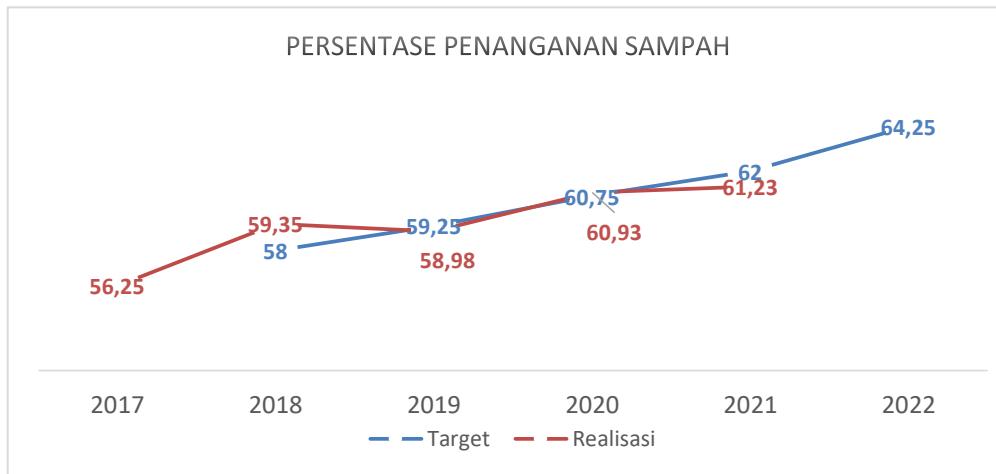


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.24.
Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2021

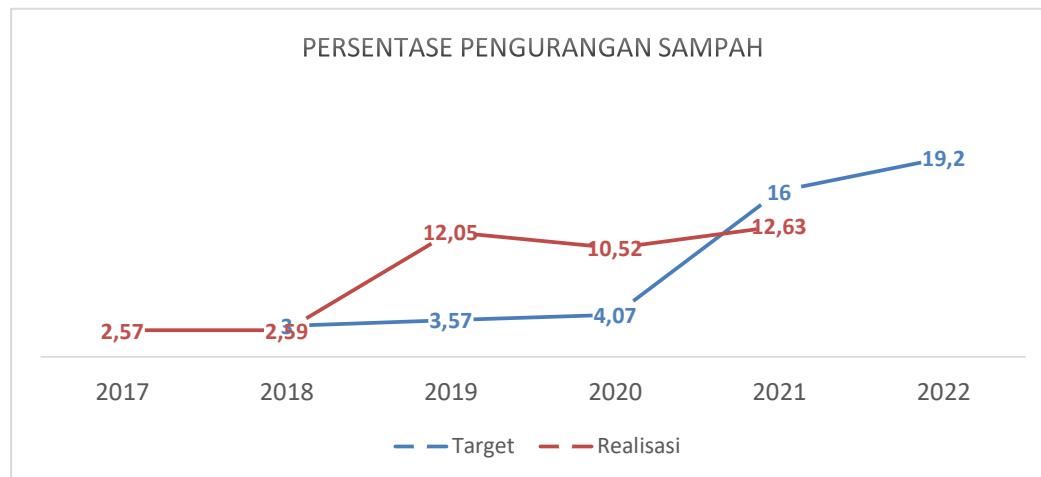
Apabila melihat Gambar 2.26. Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2021, trend kinerja pengelolaan sampah Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 capaian pengelolaan sampah sebesar 58,82% dengan capaian peguragan 2,57% dan penanganan 56,25%, dan di Tahun 2021 pengelolaan sampah mengalami peningkatan 15,04% atau menjadi 73,86%, dan pengurangan sampah mengalami kenaikan sebesar 10,06% menjadi 12,63%. Sedangkan untuk penanganan sampah naik sebesar 4,98% atau menjadi 61,23%.

Apabila membandingkan kenaikan capaian antara penanganan dan pengurangan sampah, maka pengurangan sampah memberikan kontribusi kenaikan sampah secara signifikan dari tahun 2017-2021.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.25.
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.26.
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2021

Adapun sarana dan prasarana pengangkutan persampahan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.61.
Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Dump Truck	6	7	7	20
2	Arm roll		8	4	12
3	Truck Engkel			1	1
4	Pick Up			1	1
5	Motor Roda 3	7	11		18
Jumlah		13	18	13	52

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.62.
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Buldozer D31		1			1
2	Buldozer D39			1		1
3	Buldozer Jondear				1	1
4	Eksavator Liu Gong			1		1
5	Eksavator Pindad		1			1
Jumlah			2	2	1	5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022



Kondisi TPA saat ini masih menggunakan open dumping, keterbatasan SDM dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan operasional TPA. Sesuai dengan setifikat lahan, luas lahan di TPA, yaitu 6,5 Ha. Namun jika hasil pengukuran mengikuti patok yang ada di TPA yaitu seluas 8 Ha. Permasalahan luas lahan TPA perlu dilegalkan agar kepemilikan lahan TPA jelas luasnya. Selain itu, berdasarkan kajian perluasan TPA, tahun 2017, TPA Ciangir dibutukan perluasan 9,9 Ha. Karena seringkali di TPA terdapat pencemaran akibat kegiatan di TPA dan kapasitas TPA sudah melebihi kapasitas. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton atau di tahun 2021 sampah masuk 192,91 Ton/hari atau hamper 200 Ton/hari.

Dalam rangka optimalisasi persampahan telah dikembangkan gerakan 3R dengan melalui kegiatan bank sampah di mulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 Kota Tasikmalaya memiliki 10 Bank Sampah Unit, di tahun 2018 di bentuk Bank sampah induk di Komplek Bali Wiwitan. Dan pada Tahun 2020 17 bank sampah yang tersebar di setiap kecamatan, dengan rincian 2 Bank Sampah Induk dan 15 Bank Sampah Unit dan di Tahun 2021 Bank Sampah Unit bertambah 1 (satu) menjadi 16 Unit. Berikut rinciannya.

Tabel 2.63.
Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Jenis Bank Sampah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bank Sampah Induk		1	2	2
Bank Sampah Unit	10	10	15	16
Jumlah	10	11	17	18

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	98,43	99,47	98,77	101,1
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	78,43	99,6	96,89	101,6
3	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	Lembar	261	331	400	471



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
4	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	510.564	636.570	654.423	538.841
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	Poin	317,3	226,108	398,59	410,3
6	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik
9	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	88,43	97,94	97,94	87,04
10	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	78,43	99,80	98,45	100,8
11	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	82,29	91,16	99,6	100,8
12	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	27,32	100	100	100
13	Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil	%	21,34	100	100	100
14	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	20	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	20	40,00	100	100
16	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	2	66,67	75	100
17	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	2	100	100	100
18	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	2	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022.

Salahsatu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP-elektronik. Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65.
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cihideung	36.871	36.497	73.368	54.771	52.558	2.213
2	Cipedes	41.928	40.591	82.619	61.112	59.077	2.035
3	Tawang	31.858	32.029	63.887	48.533	46.378	2.155
4	Indihiang	29.108	28.500	57.608	42.509	41.063	1.446
5	Kawalu	50.234	47.618	97.852	71.112	69.082	2.030
6	Cibeureum	34.630	33.926	68.556	51.313	49.388	1.925
7	Tamansari	39.255	37.441	76.696	55.373	54.117	1.256
8	Mangkubumi	49.404	48.024	97.428	71.024	68.762	2.262



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Bungursari	30.113	29.065	59.178	42.791	41.188	1.603
10	Purbaratu	23.290	22.272	45.562	33.658	32.949	709
JUMLAH		365.766	366.691	356.063	722.754	514.562	17.634

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kota Tasikmalaya Semester II Tahun 2021, 2021.

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data capaian berikut:

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Buah	69	69	69	69	69
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Buah	308	308	-	-	276
3	Jumlah LSM (buah)	Buah	218	218	-	-	-
4	LPM Berprestasi	Per센	50	50	-	-	-
5	PKK aktif	Per센	100	100	100	100	100
6	Posyandu aktif	Unit	819	819	864	-	-
7	Swadaya Masyarakat	Per센	30	30	-	-	-
8	Penerima Manfaat dari						
	a. Bidang Infrastruktur	Kelompok/Paket	398	-	-	-	413
	b. Bidang Ekonomi	Orang	1.598	-	-	-	1.664
	c. Bidang Sosial	Orang	2.819	-	-	-	5.227

Sumber : Bappelitbangda, Diolah, 2022

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.67.
Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	72,34	72,37	72,36	63,60
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	72,34	72,37	72,36	72,37
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	1,26	1,17	1,22	0,60
4	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	100	75,60		
5	Cakupan data mikro keluarga yang akurat	%	100	100	100	96

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	%	62,59	69,84	65,06	-
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	51,73	70,98	88,21	-
3	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	%	24	48,00	92	-
4	Cakupan terlayani angkutan umum	%	79,46	90,54	84,41	-
5	Cakupan Manajemen Angkutan	%	79,71	85,51	85,51	-
6	Cakupan Bina Usaha Angkutan	%	112,19	121,78	82,12	-
7	Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	%	107,69	105,06	85,62	-
8	Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota	LoS	0,3	0,3	0,3	-
9	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	-	91,67	91,67	-
10	Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota	%	-	91,67	91,67	-
11	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	-	-	-	88,03



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
12	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	-	-	-	53,57
13	Persentase pelayanan andalin	%	-	-	-	160
14	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	-	-	-	76,7
15	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	-	-	-	61,84

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.

Dari data pada tabel 2.71. secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2018 – 2021. Walaupun terdapat beberapa yang mengalami penurunan, seperti persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota, Cakupan terlayani angkutan umum, Cakupan Bina Usaha Angkutan dan Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan.

Capaian persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota merupakan Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai

SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum. Tampak pada tabel 2.48, data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti pada kinerja layanan angkutan umum, meliputi cakupan terlayani angkutan umum yang turun dari 104,11 menjadi 84,41%, kemudian cakupan bina usaha angkutan turun dari 121,78% menjadi 82,12% dan cakupan sarana dan prasarana angkutan turun dari 105,06% menjadi 85,62%. Dengan demikian, persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan turun dari 69,84% menjadi 65,06%.

Tidak tercapainya indikator di bidang angkutan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun yang mana dampak lanjutannya mempengaruhi terhadap capaian indikator di bidang angkutan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek;
2. Eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol;
3. Terdapat kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian di bidang angkutan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan tidak memungkinkan dilaksanakan pada situasi masa pandemi.

Adapun untuk tahun 2021, peningkatan capaian indikator pelayanan urusan perhubungan digambarkan oleh peningkatan hasil pembangunan urusan



perhubungan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.72, sebagai berikut :

Tabel 2.69.
Pembangunan Urusan Perhubungan
Dari Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	1.840	1.867	1.877	2002	2006
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	M ²	590,20	1.571,2	1.571,2	3.051,2	3.622,2
3	Jumlah Trafffic light terpasang	Lokasi	18	19	20	21	21
4	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	48	48	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	7.865	8.900	9.749	10.099	11.030
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	31	27*	33	33	33
7	Jumlah Guardrail terbangun	m ²	261	261	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	17	19	23	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	4	4	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.

Keterangan : *Pembongkaran

Tabel 2.70.
Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan	2020			2021		
			Terpasang	Kondisi		Terpasang	Kondisi	
				Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55	175	120	55
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121	256	135	121
3	Jalan Kota	1.750	1.571	787	784	1.575	791	784
Jumlah		2.706	2.002	1.042	960	2.006	1.046	960

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Saat ini telah terpasang sebanyak 2.006 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.046 unit kondisi baik, 960 unit kondisi rusak. Dengan demikian, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 700 unit dan 960 diperlukan perbaikan/penggantian.



Tabel 2.71.
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (m ²)	2020			2021		
			Terpasang (m ²)	Kondisi		Terpasang (m ²)	Kondisi	
				Baik (%)	Sedang (%)		Baik (%)	Sedang (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30	807	50
2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30	1.543	30
3	Jalan Kota	4.022,29	701,2	60	20	20	1.272,2	85
Jumlah		8.623,59	3.051,2				3.622,2	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 3.622,2 meter persegi. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 30%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 meter persegi yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 5.001,39 m².

Tabel 2.72.
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	2020		2021	
			Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232	240	232
2	Jalan Provinsi	1.844	641	417	676	452
3	Jalan Kota	11.604	9.218	8.870	10.114	10.087
Jumlah		14.000	10.099	10.519	11.030	10.771

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11.030 unit, dengan 97,65% (10.771 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 2.970 unit.



Tabel 2.73.
Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya

No	Fasilitas		2020		2021	
		Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	19	Baik	20	Baik
2	Jalan Provinsi	70	43	Baik	46	Baik
3	Jalan Kota	120	81	Baik	86	Baik
Jumlah		220	143	Baik	152	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah tepasang sampai tahun 2021 yaitu 152 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 68 buah.

Tabel 2.74.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	2020			2021		
			Terpasang (buah)	Kondisi (buah)		Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	Terpasang (buah)
				Berfungsi	Tidak			
1	Jalan Nasional	8	6	6	-	6	6	
2	Jalan Provinsi	7	4	4	-	4	4	
3	Jalan Kota	12	8	7	1	8	7	1
Jumlah		27	18	17	1	18	17	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2021

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah tepasang sebanyak 18 unit dengan kondisi 17 berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Masih terdapat selesih kebutuhan alat pemberi isyarat yaitu sebanyak 9 buah

Tabel 2.75.
Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	0
2	Jalan Provinsi	700	200	200
3	Jalan Kota	300	61	61
Jumlah		1.000	261	261

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022



Tabel 2.76.
Cermin Tikungan Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	4	-	0
2	Jalan Provinsi	6	-	0
3	Jalan Kota	20	2	2
	Jumlah	30	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tingkungan sebanyak 28 buah.

Tabel 2.77
Pita Penggaduh Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	10	6	6
2	Jalan Provinsi	8	4	4
3	Jalan Kota	25	12	12
	Jumlah	43	22	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2021 Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 KM dan telah digunakan 7,825 Km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (92,06%).

Tabel 2.78.
Ruang Parkir Pada Badan Jalan
Tahun 2021

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)		Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)	
			2020	2021	2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	1	-	-	0,25	0,25
3	Jalan Kota	33	8,8	8,8	7,8	7,8
	Jumlah	34	8,8	8,8	7,825	7,825

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.79.
Terminal Angkutan Penumpang
Tahun 2021

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota pada tahun 2021 terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu :

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. TPK Nyantong | 9. TPK Awiluar |
| 2. TPK Muncang | 10. TPK Gobang |
| 3. TPK Cikadongdong | 11. TPK Cibunigeulis |
| 4. TPK Leuwidahu | 12. TPK Asta |
| 5. TPK Karangresik | 13. TPK Pamipiran |
| 6. TPK Cigeureung | 14. TPK Bumi Resik Panglayungan |
| 7. TPK Gegernoong | 15. TPK Sindang Galih |
| 8. TPK Cipeusar | 16. TPK Perum Kota Baru |

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Berikut realisasi jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada rentang tahun 2018-2020.

Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan umum untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan kebijakan program Zero ODOL (*Over Dimension Over Load*) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementerian Perhubungan R.I, maka realisasi wajib uji dan kendaraan uji lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel 2.84.



Tabel 2.80.
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021

TAHUN	MOBIL BARANG						KERETA GANDENGAN	KERETA TEMPELAN	MOBIL BUS		KHUSUS		MOBIL PENUMPANG		TOTAL		
	KECIL		SEDANG		BESAR												
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU			
2020	2240	6300	1564	2411	379	222	0	5	27	182	2196	234	72	39	218	18	16107
2021	2375	5990	1440	2277	380	194	2	4	33	191	1938	222	60	29	188	16	15339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Tabel 2.81.
Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji
Dinas Perhubungan 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Ijin trayek aktif	Unit	1.123	1.219	794	616
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	20.515	20.013	16.310	15.339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Lebih lanjut, Tabel 2.86 menunjukan data adanya penurunan jumlah angkutan yang melaksankaan perpanjangan ijin trayek dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 2.82.
Data Trayek Angkutan Kota
Tahun 2021

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2020						2021					
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum							
			Alokasi	Realisasi	Status		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Alokasi	Realisasi	Sisa
Aktif	Non Aktif													
1	01	27	91	91	89	2	0	91	91	49	42	0		
2	02	16	52	49	31	18	3	52	49	10	39	3		
3	03	19,5	125	123	91	32	2	125	122	50	72	3		
4	04	23	100	92	90	2	8	100	92	53	39	8		
5	05	23,5	150	141	122	19	9	150	141	59	82	9		
6	06	23	33	22	18	4	11	33	21	14	7	12		
7	07	23	70	63	46	17	7	70	63	32	31	7		
8	08	23	70	59	32	27	11	70	60	11	49	10		
9	09	25	56	27	22	5	29	56	27	11	16	29		
10	09 A	30	35	31	30	1	4	35	32	21	11	3		
11	010	34,5	71	67	37	30	4	71	67	31	36	4		
12	011	16	19	19	17	2	0	19	19	10	9	0		
13	012	15	28	23	17	6	5	28	23	15	8	5		



No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2020					2021				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Status		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
14	012 A	20	4	2	1	1	2	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	41	6	3	50	47	20	27	3
16	014	33	20	16	11	5	4	20	16	9	7	4
17	015	44	35	31	19	12	4	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	12	9	14	35	21	7	14	14
19	017	13	35	35	32	3	0	35	35	23	12	0
20	018	19,5	40	25	22	3	15	40	25	12	13	15
21	019	28	19	18	14	4	1	19	18	8	10	1
Jumlah			1.138	1,002	794	208	136	1.138	1.002	456	546	136

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika

Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	107	300	400	-
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100	-
4	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	-
5	Capaian Implementasi E-Government	%	25	-	-	-
6	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	20	33	37,5	-
7	Persentase pelayanan informasi/dokumentasi dan pengaduan	%	45	100	100	-
8	Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	%	54	65	94,5	-
9	Capaian implementasi smart city	%	10	46	62,66	-
10	Capaian implementasi e-government perangkat daerah	%	25	-	-	-
11	Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	%	8	38	88	-
12	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	-
13	Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)	%	65	172	400	-



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
14	Capaian Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	-	-	-	41,68
15	Persentase pelayanan informasi/dokumentasi dan pengaduan	%	-	-	-	100
16	Persentase pengelolaan saluran informasi	%	-	-	-	100
17	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	%	-	-	-	100
18	Capaian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat	-	-	-	(Baik) 2,68
19	Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah	Node	-	-	-	400
20	Persentase penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	100
21	Capaian Pengelolaan Pusat Data	Tier	-	-	-	1
22	Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Sistem	-	-	-	2
23	Jumlah data dan informasi elektronik	Unit	-	-	-	N/A
24	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	-	N/A
25	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem	-	-	-	7
26	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	Paket	-	-	-	3
27	Capaian Government Chief Information Officer (GCIO)	Level	-	-	-	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Memasuki perjalanan Tahun ke dua pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada saat itu masih tergabung pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatkan penghargaan dalam acara Kominfo Award sebagai juara ke-3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam katagori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ini menunjukan bahwa Kota Tasikmalaya bersungguh – sungguh dalam melaksanakan UU KIP. Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya peraturan Wali Kota Tasikmalaya yaitu peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 tahun 2013 tentang



pedoman tata kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi, perwal ini sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Kota Tasikmalaya, Selanjutnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama untuk memperlancar kegiatan PPID di kota Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 480/13/Sekretariat/2018 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilaksanakan melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>, Help desk/layanan langsung/frontdesk, dan Melalui telepon dan email.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/ SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural yang terdiri dari :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama;
2. Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu.

Pada tahun 2019 Permohonan Informasi Publik sebanyak 4 permohonan dengan rincian 2 permohonan di kabulkan dan 2 permohonan ditolak. Sedangkan pada tahun 2020 permohonan informasi public sebanyak 2 permohonan dan keduanya ditidak dikabulkan.

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.84.
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2021

No.	Nama Koperasi	Jml	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manajer
I	Koperasi Unit Desa (KUD)	9	9	-	4	4.485	26	19	19	-
II	Koperasi Serba Usaha	105	60	45	17	9.400	335	273	164	8
III	Kop. Pondok Pesantren	45	12	33	3	6.113	146	125	11	1
IV	Koperasi Simpan Pinjam									
	4.1 KSP	94	78	16	40	20.281	305	239	173	15
	4.2 KBMT	33	12	21	3	6.153	103	91	68	7
V	Koperasi Konsumsi									

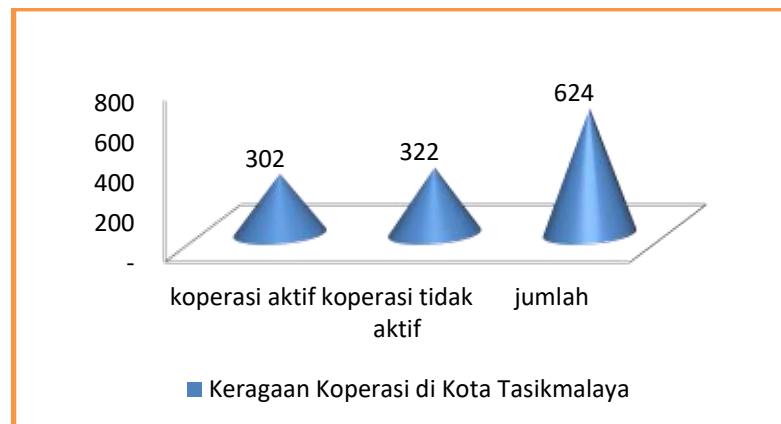


No.	Nama Koperasi	Jml	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manager
	5.1 KPRI	50	35	15	11	8.817	172	133	49	4
	5.2 KOPKAR	39	18	21	8	5.143	118	99	28	9
	5.3 Koperasi Angkatan Darat	2	2	-	1	1.640	10	6	8	-
	5.4 Koperasi Angkatan Udara	1	1	-	1	171	4	2	3	-
	5.5 Koperasi Kepolisian	1	1	-	1	897	3	3	2	-
	5.6 Koperasi Wanita	10	6	4	2	1.320	32	24	7	1
	5.7 Koperasi Wredatama	6	1	5	-	486	17	17	3	1
	5.8 Koperasi Mahasiswa/Pemuda	2	1	1	-	759	8	6	-	1
	5.9 Koperasi Lainnya									
	5.9.1 Koperasi Warga	102	23	79	5	7.251	285	258	38	2
	5.9.2 POKMAS	41	4	37	1	3.183	127	114	18	-
	5.9.3 PEPABRI	1	1	-	1	436	4	3	3	-
	5.9.4 Kop. Veteran	1	1	-	1	1.228	4	2	1	-
VI	Koperasi Produksi									
	6.1 KOPINKRA / INKRA	26	6	20	2	1.347	81	69	20	-
	6.2 Koperasi Pertanian	9	1	8	-	637	27	27	3	-
VII	Koperasi Pemasaran									
	7.1 Koperasi Pasar	16	8	8	-	1.681	44	35	10	-
VIII	Koperasi Profesi	2	1	1	-	75	6	6	5	-
IX	Koperasi Sekunder	6	3	3	2	15.458	19	18	10	-
X	Koperasi Produsen	5	5	-	-	127	19	15	2	-
XI	Koperasi Konsumen	18	13	5	7	1.826	60	45	7	2
	Jumlah Total	624	302	322	110	99.013	1.955	1.628	651	51

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2021.

Sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 624 buah koperasi dengan Jumlah anggota koperasi sebanyak 99.013 orang, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98.903 orang. Modal yang telah terhimpun pada tahun 2021 yang merupakan modal sendiri sebanyak Rp.218,603 miliar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp.160,538 miliar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp.274,493 miliar dengan total aset Rp.379,062 miliar. Secara umum, angka-angka di atas meningkat dari tahun sebelumnya, kecuali modal sendiri yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya Rp. 220,459 miliar pada tahun 2020.

Dari seluruh koperasi yang berjumlah 624 pada tahun 2021, hanya 302 unit koperasi yang merupakan koperasi aktif (48%), sisanya sebanyak 322 koperasi merupakan koperasi tidak aktif sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.27.
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya

Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Dari 302 koperasi aktif pada tahun 2021 baru 192 koperasi (63,58%) yang telah bersertifikat NIK dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85.
Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Indihiang	18
2	Bungursari	15
3	Mangkubumi	14
4	Cihideung	28
5	Cipedes	18
6	Tawang	38
7	Kawalu	17
8	Tamansari	15
9	Cibeureum	20
10	Purbaratu	9
	Jumlah	192

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 9.770 pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.86.
Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
1	Bungursari	701
2	Cibeureum	548
3	Cihideung	1.432



No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
4	Cipedes	1.551
5	Indihiang	763
6	Kawalu	1.455
7	Mangkubumi	1.130
8	Purbaratu	289
9	Tamansari	15
10	Tawang	1.132
11	Lain-lain (Luar Kota)	754
Total		9.770

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.87.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi sehat	%	3,14	8,45	8	23,00
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	-	-	0	-
3	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	4,13	4,39	0,97	17,00
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	270	622	90	182
5	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	846	947	250	1.695
6	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	82	88,5	25	-
7	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	%	100	200	25	100
8	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	-	-	-	100
9	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	-	-	-	36,42
10	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	-	-	-	40,00
11	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	-	-	-	60,26
12	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	-	-	-	74,50
13	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	-	-	-	100

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.2.12. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal.



Tabel 2.88.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	M/Rp	520	1.223	422,6	1.630
2	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	80,87	100	100	100
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	-
4	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya		-	-	-	0
5	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	-	-	-	100
6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	-	-	-	26,4
7	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	-	-	-	100
8	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	-	-	-	100

Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2022.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



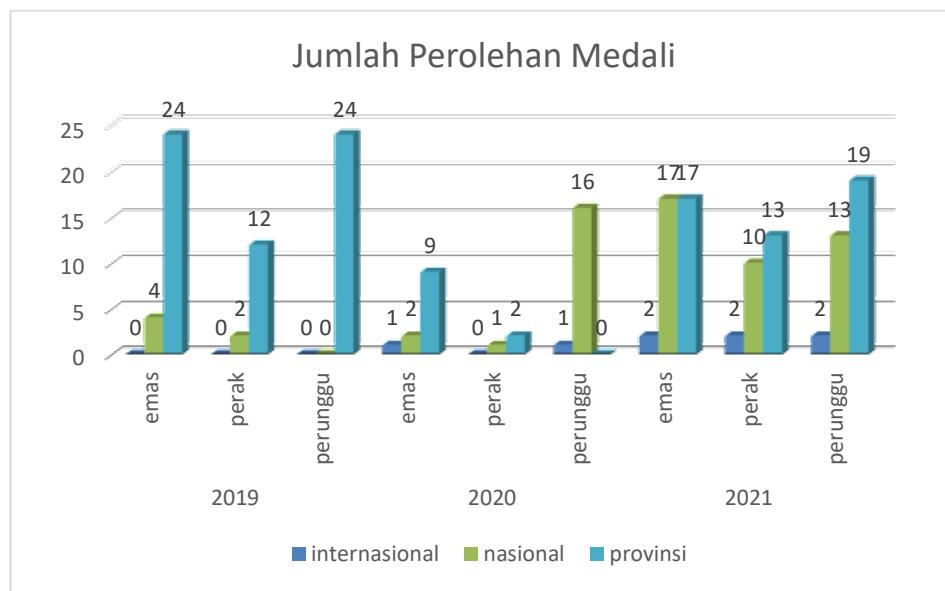
Tabel 2.89.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase Organisasi pemuda terbina	%	42	57,14	58,24	-
2	Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina	%	23	46,15	47,25	-
3	Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi	%	81	83,33	25	-
4	Persentase peningkatan sarpras Olahraga	%	52	58,33	58	-
5	Persentase OKP yang dibina	%	-	-	-	28,57
6	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	-	-	-	60

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) OKP dan yang telah dibina pada tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) OKP, sedangkan OKP yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) OKP.

Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) cabang olahraga, tingkat nasional 7 (tujuh) cabang olahraga, dan internasional 3 (tiga) cabang olahraga, yakni taekwondo, silat serta wushu. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Gambar 2.28.

Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi
Kota Tasikmalaya Tahun 2021



2.1.3.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan stastistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Persentase data dan informasi statistik sectoral	%	-	100	100
2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	-	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Implementasi optimalisasi dalam pengelolaan data statistik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial.

2.1.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan.

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	10	20	31,2	33,33
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	10	21	37,8	-
3	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	-	-	-	33,33
4	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	-	-	-	N/A
5	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwata	-	-	-	N/A
6	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	-	-	-	N/A
7	Persentase jumlah Insiden Keamanan Informasi yang tertangani	%	-	-	-	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.92.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisai			
			2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah	%	63	65,22	71,01	-
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	41	64	68	-
3	Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian	%	61	28,90	30,64	-
4	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	-	-	-	57,97
5	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	-	-	-	20,23
6	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	-	-	-	50
7	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	35,38

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.93.
Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	buah	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	17	23
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	buah	53	35

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Tabel 2.94.
Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	Tugu Peta	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	Tugu 0 Km	Jl.Dr. Sukarjo	PO2018121300009
3	Cilamajang Kota TasikmalayaJawa Barat	Cilamajang	PO2018121300018
4	Makam Gn. Subang	Lintasan Mangkubumi – Indihiang	PO2016061000161
5	Komplek Makam SyehTubagus Abdullah	Sukaasih	PO2016060900121
6	Makam (Mesjid) H. Bakri	Hz. Mustopa	PO2016061000356
7	Makam Gn Saena	Citamiang	PO2018121300019
8	Makam Eyang CakraNingrat	Ciseeng BabaknArsi	PO2018121300015
9	Punden Berundak,Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-



No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
10	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
11	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2018121300014
12	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang	PO2018121300016
13	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang	PO2018121300017
14	Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
15	Tugu Istiwa	Citamiang	PO201812130002
16	Makam Nyimas Saena	Tanjung	PO2018121300021
17	Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip)	Tawang	-
18	Naskah Ndalem Patuakan	Jln. Komarasari Tawang	
19	Makam Sakarembong	Jl. Bantar, bantarsari Kota tasikmalaya	
20	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	
21	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	
22	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	
23	Makam Eyang Cakraningrat		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kesesuaian Layanan Perpustakaan Dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	3,14	66,67	32	-
2	Persentase peningkatan koleksi buku	%	4,94	5,13	6,86	-
3	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	52,07	20,14	0	71,52
4	Persentase pembinaan perpustakaan	%	-	-	-	5,53
5	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	-	-	-	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.



Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.96.
Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
A	PERPUSTAKAAN UMUM	119	320	80.148	141.659	349	4.068
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	5	26.948	49.359	75	1.228
2	Perpustakaan Kelurahan	69	207	33.750	67.350	69	690
3	Perpustakaan Kecamatan	10	30	5.000	10.000	10	200
4	Taman Bacaan Masyarakat	39	78	14.450	14.950	195	1.950
B	PERPUSTAKAAN SEKOLAH	714	1.135	448.132	1.018.177	18.582	193.126
1	Perpustakaan SD	231	502	152.699	354.577	4.620	50.007
2	Perpustakaan MI	53	-	-	-	-	-
3	Perpustakaan SMP	76	151	82.833	209.560	3.700	37.950
4	Perpustakaan MTS	55	111	53.704	107.442	2.750	26.833
5	Perpustakaan SMA Negeri	10	21	12.896	54.598	1.000	10.436
6	Perpustakaan SMA swasta	20	40	20.000	40.000	400	10.000
7	Perpustakaan MA Negeri	3	6	3.000	6.000	300	3.000
8	Perpustakaan MA Swasta	34	68	34.000	68.000	680	17.000
9	Perpustakaan SMK Negeri	4	8	4.000	8.000	400	4.000
10	Perpustakaan SMK Swasta	50	100	50.000	100.000	1.000	25.000
11	Perpustakaan SLB	6	12	6.000	12.000	120	300
12	Perpustakaan Pondok Pesantren	172	116	29.000	58.000	3.612	8.600
C	PERPUSTAKAAN KHUSUS	54	57	30.500	68.000	152	2.600
1	Perpustakaan Rumah sakit	1	1	500	1.500	2	50
2	Perpustakaan Puskesmas	20	20	10.000	20.000	40	1.000
3	Perpustakaan OPD Kab/Kota	26	26	12.000	36.000	48	1.200
4	Perpustakaan Bank	2	5	5.500	5.500	20	100
5	Perpustakaan Vertikal	4	4	2.000	4.000	40	200
6	Perpustakaan PKK Kabupaten/Kota	1	1	500	1.000	2	50
D	PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	20	49	54.133	117.004	483	15.626
1	Perpustakaan PT Negeri	3	19	18.000	49.000	160	5.000
2	Perpustakaan PT Swasta	17	30	36.133	68.004	323	10.626
	JUMLAH	907	1.561	612.913	1.344.840	19.566	215.420

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.



2.1.3.2.18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD	%	-	46,98	58,63	-
2	Pemahaman informasi kearsipan terhadap yang diberikan informasi	kali	-	5	3	-
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	-	26,32	27	-
4	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	poin	-	-	-	0
5	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	-	-	-	63,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha.

Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 393 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 375 pokdaan, 15 poklahsar dan 3 pokmaswas dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 4.842 orang. Aktivitas di sector perikanan secara juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain itu terdapat 61 Unit Pemberian Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya.

Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif



(buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan
Tahun 2017-2021

No.	Komoditas	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)
1	Mas	1.981,35	1.983,37	1979,75	2.074,63	2004,39
2	Nila	2.098,14	2.123,08	2.127,56	2.113,38	2188,93
3	Nilem	1.227,39	1.227,61	1.252,75	1.232,47	1243,34
4	Mujair	701,00	698,82	655,93	462,34	465,49
5	Lele	1.456,39	1.500,76	1.415,17	1.479,49	1489,55
6	Gurame	834,76	723,66	809,34	739,74	744,77
7	Tawes	980,81	1.024,32	1.001,53	1109,61	1109,16
8	Tambakan	513,06	512,79	507,56	462,34	465,48
9	Ikan Lainnya	184,23	184,83	233,03	277,41	279,28
	Jumlah	9.977,13	9.979,24	9.982,62	9.951,41	9.990,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.99.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	Orang	52	100	0	150
2	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	9.979,24	9.982,62	9.951,42	9.990,39
3	Angka produksi hasil perikanan	Ton	199,38	312,80	312,70	312,78
4	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	24,74	32,65	32,65	53,88
5	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	Orang	100	50	80	75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100.
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan (Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		12. Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13. Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		14. Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
2	Tamansari	1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel. Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan



No.	Kecamatan	1. Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
3	Cibeureum	2. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utarya	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan



No.	Kecamatan	3. Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
	10 Cipedes	4. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022



Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya, yang meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 589.000 orang pada tahun 2017, 650.553 orang pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 695.647. Angka ini menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi 344.423 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata mulai naik lagi yaitu sebesar 483.569 orang, seiring dengan mulai meredanya kasus Covid-19.

Tabel berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel. 2.101.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2018	221	650.332	650.553
2019	124	695.523	695.647
2020	39	344.384	344.423
2021	6	483.563	483.569

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.102.
Data Hotel di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
1	PERMATA SAHID HOTEL SYARIAH	JL.BRIGJEN WASITA KUSUMAH, INDIHIANG, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT 46151	Indihiang
2	HOTEL RAMAYANA	JL.RE MARTADINATA NO.333, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA 46151	Indihiang
3	ADEN 2 SYARIAH	JL.RE MARTADINATA NO.268, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
4	FRESH HOTEL	JL.RE MARTADINATA NO.191, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
5	HOTEL SRIKANDI	JL.RE MARTADINATA NO.266, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
6	CROWN HOTEL	JL. RE MARTADINATA NO.45	Cipedes



No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
7	PONDOK TASYIQ GUEST HOUSE	JL.CIGANTANG, KEL.CIGANTANG, KEC.MANGKUBUMI	Mangkubumi
8	FAVE HOTEL TASIKMALAYA	JL.RE MARTADINATA 214, RT.02/07 KEL.CIPEDES, KEC.CIPEDES KOTA TASIKMALAYA KODE POS 46133	Cipedes
9	HARMONI HOTEL	Jl.Rd.IKIK WIRADIKARTA 51 TASIKMALAYA	Tawang
10	HOTEL MANDALAWANGI	JL.RE MARTADINATA 177, TASIKMALAYA	Cipedes
11	HOTEL HORISON	JL. YUDANAGARA NO.16	Cihideung
12	HOTEL PADJADJARAN	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Mangkubumi
13	HOTEL SETUJU	JL.CIEUNTEUNG	Mangkubumi
14	HOTEL WIJAYA KUSUMAH	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Bungursari
15	SURYA HOTEL	JL.SILIWANGI NO.39 TASIKMALAYA	Tawang
16	MINI GUEST HOUSE	JL. CIPEDES II NO.21A	Cipedes
17	HOTEL MERDEKA	JL.TARUMANEGARA NO.48	Tawang
18	HOTEL PRIANGAN	JL. KEBON MANGGU I, TASIKMALAYA	Cihideung
19	SHANRILLA HOTEL	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.93, TASIKMALAYA	Cihideung
20	HOTEL SANTIKA	JL.YUDANAGARA, NO.57	Cihideung
21	HOTEL SARTIKA	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.244	Kawalu
22	HOTEL SEHAT	JL.MITRABATIK NO.73	Cipedes
23	HOTEL SELAMAT	JL.EMPANG NO.26 TASIKMALAYA	Tawang
24	HOTEL TASIK	JL.KOMALASARI NO.27 RT.01 RW.02, EMPANGSARI	Tawang
25	HOTEL ABADI	JL.EMPANG NO.58 TASIKMALAYA	Tawang
26	HOTEL ASRI	JL.HZ.MUSTOFA NO.326 TASIKMALAYA	Cihideung
27	HOTEL BOROBUDUR	JL.MAYOR SL.TOBING NO.25	Cihideung
28	HOTEL CITY	JL.SUKALAYA BARAT NO.50 TASIKMALAYA	Cihideung
29	HOTEL AMARIS	JL.KHZ.MUSTOFA, TUGUJAYA, CIHIDEUNG	Cihideung
30	GRAND METRO HOTEL	JL.KHZ.MUSTOFA NO.263, NAGARAWANGI	Cihideung
31	HOTEL KENCANA	JL.YUDANAGARA NO.17 TSM	Cihideung
32	HOTEL MANGKUBUMI	JL.JENDRAL AH.NASUTION KM.7 TSM	Mangkubumi
33	HOTEL FLAMBOYAN	JL.GALUNGGUNG NO.50	Tawang

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.



2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103.
Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2021

Tahun	Jumlah	Berkurang (Ha)
2017	5.826	136
2018	5.799	27
2019	5.796	3
2020	5.790	6
2021	5.778	12
Jumlah		406

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 644 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 27.424 orang yang terdiri dari kelompok tani dewasa 451 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 136 kelompok, dan taruna tani 57 kelompok. Kondisi ini meningkat dari tahun 2019. Berikut perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.104.
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

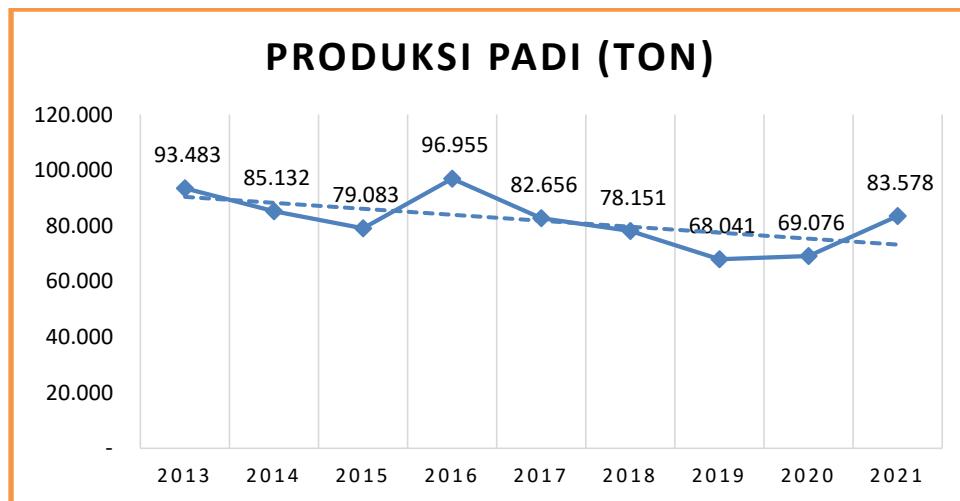
Tahun	Kelompok Tani			Jumlah Anggota
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	
2019	452	129	44	24.782
		625		
2020	451	136	57	27.424
		644		
2021	456	145	64	28.047
		665		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman serealia lainnya. Padi merupakan komoditas



pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2013-2021 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.29.
Produksi Padi Tahun 2013-2021

Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 52.437 ton naik. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.155 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 71.615,5 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 72,22 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 19.178,66 ton atau 27,28 persen.

Namun demikian produksi padi ini mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.105.

Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021

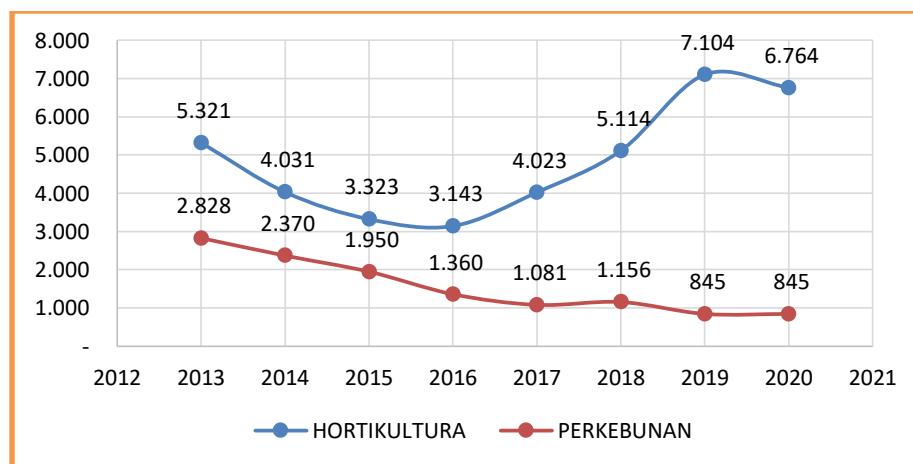
Tanaman Pangan	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Padi (ton)	82.656	78.151	68.043	69.076	83.578
Produksi Jagung (Ton)	105	656	269	176	160
Produksi Kedelai (Ton)	635	57	-	-	-
Produksi Kacang Tanah (Ton)	63	132	231	406	128
Produksi Ubi Jalar (ton)	431	424	367	151	130



Tanaman Pangan	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Ubi Kayu (ton)	3.254	2.300	3.060	1.119	1388
JUMLAH	87.144	81.720	71.970	70.928	85.384

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikulturan sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2021, sementara produksi tanaman perkebunan terus menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



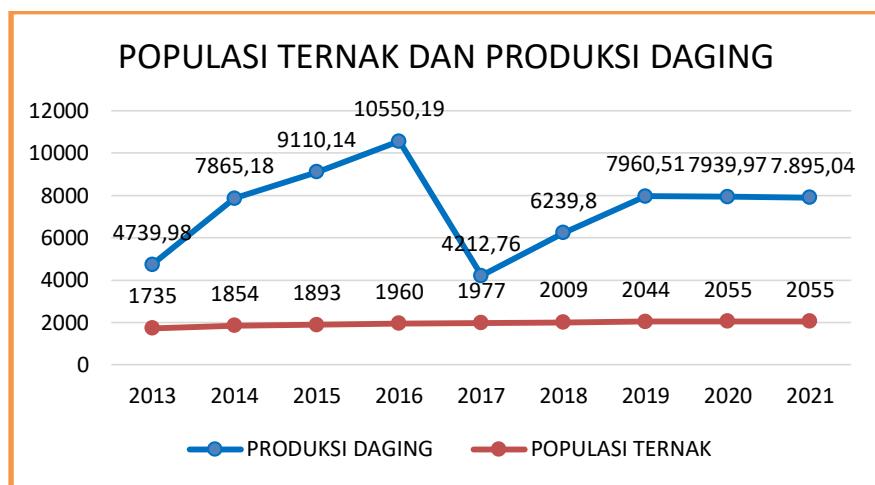
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

Gambar. 2.30.
Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2012-2021

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 7 tahun terakhir mengalami peningkatan walau dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,94 persen per tahun. Sementara produksi daging dalam 7 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging sangat anjlok pada tahun 2017 kecuali daging ayam bukan ras (buras), daging ayam ras petelur dan itik yang terus mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal impor daging beku dan sapi potong. Kemudian produksi daging berangsur baik

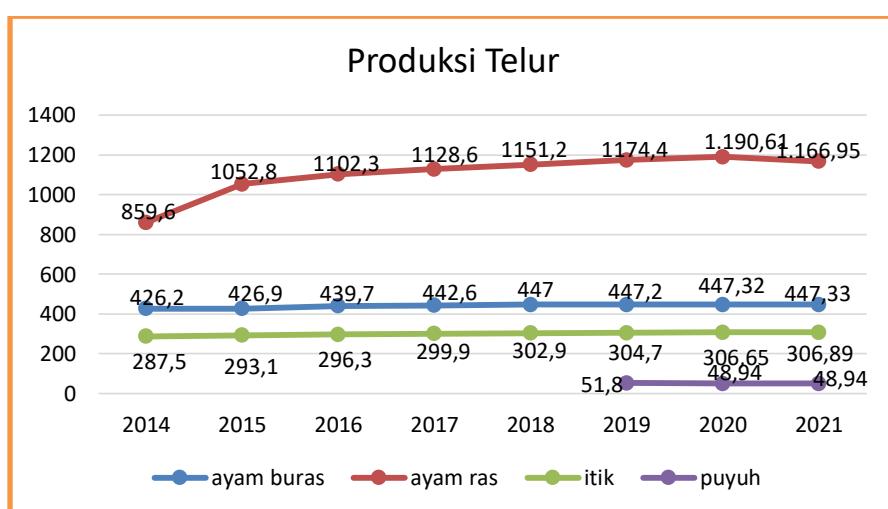


pada tahun 2018 dan 2019 kemudian turun kembali pada tahun 2021. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.31.
Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya
Tahun 2013 - 2021

Produksi telur dalam 7 tahun terakhir didominasi telur ayam ras petelur yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2013-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,9 persen per tahun, namun menurun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -0,6 persen. Produksi telur ayam ras pada tahun 2019 mencapai 1.174,2 ton, turun pada tahun 2020 menjadi 1.167,1 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.32.
Produksi Telur Tahun 2014-2021

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah



Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Selain berdampak terhadap capaian angka PDRB kategori pertanian, kehutanan perikanan, kondisi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian pelayanan umum pada urusan pertanian. Banyak capaian target indikator urusan pertanian pada tahun 2020 yang turun dari capaian tahun 2019.

Tabel 2.106.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Capaian produksi tanaman hortikultura	Ton	-	-	5.755,3	-
2	Capaian produksi tanaman perkebunan	Ton	-	-	854,01	-
3	Jumlah petani miskin yang dibina	Orang	410	352	126	225
4	Angka produktivitas tanaman pangan utama	Ton	-	-	62,16	-
5	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	81.720	71.970	70.928	85.384
6	Jumlah Gapoktan yang dibina	Gapoktan	64	64	64	-
7	Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan	%	39,41	21,67	38,67	-
8	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	%	100	100	100	-
9	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1,61	0,25	0,52	-1,59
10	Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%	33,81	21,44	0,06	
11	Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian	Orang	135	200	0	295
12	Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	-	-	-	5834
13	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	-	-	-	199
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Kwintal/hektar	-	-	-	62,9
15	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	-	-	-	10.347
16	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	-	-	-	100



No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
17	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	-	-	-	4,35

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.107.
Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan
Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	100	100	100	-
2	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	65,83	80,44	80,89	109
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	328	354	100	-
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450	400	50	-
5	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	-	3,21	n/a	-
6	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	100	104	76,33	-
7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	4,58	-	-6,64
8	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	100	343	100	-
9	Persentase Pasar yang dibina	%	100	100	70	-
10	Nilai ekspor bersih	US\$ (ribuan)	34.000	14.993,52	35.883.71	31.459.43
11	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	-	-	-	100
12	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	-	-	-	80
13	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	-	-	-	54,5
14	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	-	-	-	1
15	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	-	-	-	88,9

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

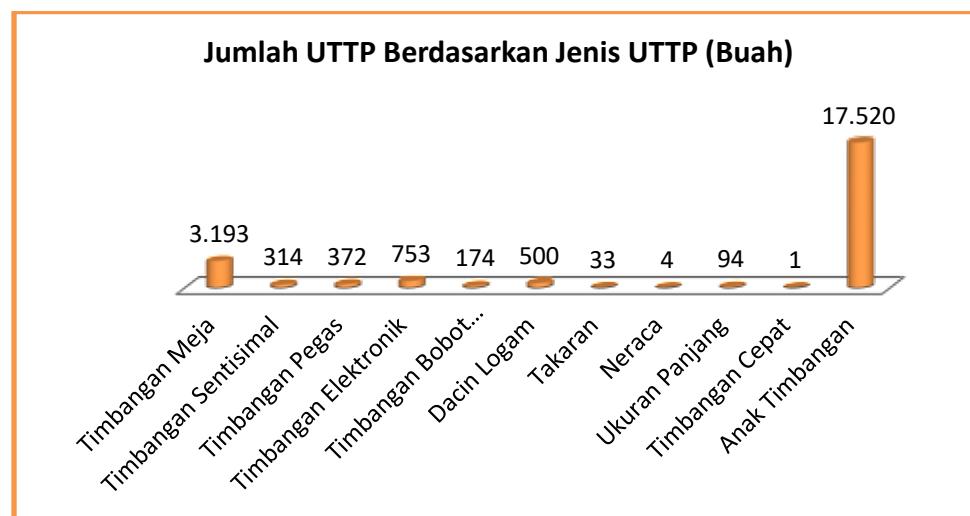
Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan



pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Pada 2018 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU). Adapun Jenis dan pemilik UTTP di Kota Tasikmalaya cukup banyak. Di lain pihak UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya juga masih melayani pemilik UTTP dari wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar melalui mekanisme Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, serta Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan Metrologi Legal karena UPTD Metrologi Legalnya belum operasional.

Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan.



Gambar 2.33.
Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP

Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter.

Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat



ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.108.
Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2021

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios	Dasaran
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772	1.867
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	1	60	249	300
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402	50
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261	20
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44	0
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91	10
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244	40
8	Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0	37
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeureum	2018	4.630	2.989	1	128	78	0
10	Pasar Purbaratu	Belum beroperasi	2019				276	4141	2324

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarana. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada.



Tabel 2.109.
Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Pusat Perbelanjaan	Alamat
1	Yogya HZ	Jl. HZ Mustofa No. 124 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
2	Asia Toserba	Jl. HZ. Mustofa No. 72 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
3	Yogya Mitrabatik	Jl. Mitra Batik No. 81-83 Kel. Cipedes Kec. Cipedes
4	Plaza Asia (PT. Asia San Prima Jaya)	Jl. HZ. Mustofa Kel. Tuguraja Kec. Cihideung
5	Agung Toserba	Jl. HZ Mustofa Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
6	Giant	Jl. Pasar Wetan Komplek Mayasari Plaza Kel. Argasari Kec. Cihideung
7	Lotte Mart	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kersamenak Kec. Kawalu
8	Mega M (PT. Matahari Putra Prima)	Jl. Veteran No. 10 Kel. Cilembang Kec. Cihideung
9	Transmart	Jl. Ir. H. Juanda Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
10	Mayasari Plaza	Jl. Pasar Wetan Kel. Argasari Kec. Cihideung

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020.

Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110.
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah
1	Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar	120
2	Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM	2.332
3	PKL Kojengkang	780
4	PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan)	1.371
5	PKL Selter Lingkar Dadaha	140
6	Peserta Program Kemiskinan	600
	Jumlah	4.784

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019.

Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlu didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan



lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan.

Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya :

Tabel 2.111.
Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2018-2021

No.	Komoditi	Unit Usaha			Tenaga Kerja (Orang)			Nilai Investasi (Rp.000)			Nilai Produksi (Rp. 000)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Bordir	1.424	1.430	1.423	14.097	14.097	14.097	244.404.416	244.404.416	244.404.416	1.067.757.116	1.067.757.116	1.067.757.116
2	Kerajinan Mendong	175	175	174	2.292	2.292	2.292	7.011.232	7.011.232	7.011.232	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Kerajinan Bambu	75	75	75	660	660	660	1.200.038	1.200.038	1.200.038	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Alas Kaki (Kelom Geulis & Sandal, sepatu)	551	556	570	6.213	6.213	6.213	50.586.562	51.246.744	710.768.562	395.566.430	395.566.430	395.566.430
5	Kayu Olahan	235	237	226	1.538	1.538	1.538	28.677.699	28.677.699	28.677.699	82.656.245	82.656.245	82.656.245
6	Batik	43	41	43	695	695	695	7.840.576	7.840.576	7.840.576	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Payung Geulis	8	8	8	56	56	56	78.500	78.500	78.500	1.216.800	1.216.800	1.216.800
8	Makanan Olahan	880	939	1.66	5.143	5.143	5.143	52.860.460	61.809.660	5.202.060.460	950.004.830	950.004.830	950.004.830
9	Bahan Bangunan	324	326	326	4.152	4.152	4.152	216.770.677	217.047.677	593.770.677	561.840.403	561.840.403	561.840.403
10	Pakaian Jadi	288	318	337	1.711	1.711	1.711	24.188.800	25.938.800	3.374.188.800	167.930.350	167.930.350	167.930.350
11	Percetakan	56	57	58	387	387	387	9.566.000	9.876.000	319.566.000	31.521.862	31.521.862	31.521.862
12	Lain-Lain	231	297	144	3.099	3.099	3.099	69.590.084	83.366.166	4.292.936.366	419.972.576	419.972.576	419.972.576
	JUMLAH	4.290	4.459	4.450	39.795	40.043	40.043	706.438.044	712.775.044	14.782.503.326	3.763.447.774	3.778.677.774	3.778.677.774
	PERTUMBUHAN	13,54	5,07	3,94	1,81	0,62		4,62	0,90	3,61	9,29	0,40	

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Tabel 2.112.
Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2021

No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. Komoditi Unggulan :						
1	Bordir :	1.401	1.416	1.424	1.431	1.423
	a. Mikro	652	651	659		
	b. Kecil	636	652	652	1.319	1.311
	c. Menengah	113	113	113	112	112
	d. Besar	0	0	0	0	0
2	Kerajinan Mendong :	174	175	175	175	174
	a. Mikro	137	137	137		
	b. Kecil	36	37	37	174	173
	c. Menengah	1	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0	0
3	Kerajinan Bambu :	75	75	75	75	75
	a. Mikro	71	66	66		
	b. Kecil	3	8	8	74	74
	c. Menengah	1	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0	0
4	Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis) :	525	544	551	557	570
	a. Mikro	248	199	206		
	b. Kecil	266	323	323	535	548



No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	c. Menengah	11	22	22	22	22
	d. Besar	0	0	0	0	0
5	Kayu Olahan (Meubel) :	213	228	235	237	226
	a. Mikro	149	158	165		
	b. Kecil	64	66	66	233	223
	c. Menengah	0	3	3	3	3
	d. Besar	0	1	1	1	1
6	Batik :	41	41	43	43	43
	a. Mikro	20	20	22		
	b. Kecil	19	19	19	41	41
	c. Menengah	2	2	2	2	2
	d. Besar	0	0	0	0	0
7	Payung Geulis :	8	8	8	8	8
	a. Mikro	8	0	0		
	b. Kecil	0	8	8	8	8
	c. Menengah	0	0	0	0	0
	d. Besar	0	0	0	0	0
8	Makanan Olahan :	560	772	880	949	1.066
	a. Mikro	390	533	641		
	b. Kecil	156	222	222	932	1.049
	c. Menengah	14	17	17	17	17
	d. Besar	0	0	0	0	0
JUMLAH A		2.997	3.259	3.391	3.475	3.585
	<i>a. Mikro</i>	1.675	1.764	1.896		
	<i>b. Kecil</i>	1.180	1.335	1.335	3.316	3427
	<i>c. Menengah</i>	142	159	159	158	158
	<i>d. Besar</i>	0	1	1	1	1
B. Komoditi Lainnya :						
1	Bahan Bangunan :	321	323	324	326	326
	a. Mikro	220	217	218		
	b. Kecil	91	90	90	310	313
	c. Menengah	7	13	13	13	13
	d. Besar	3	3	3	3	3
2	Pakaian Jadi :	108	226	288	339	337
	a. Mikro	31	149	211		
	b. Kecil	67	67	67	329	327
	c. Menengah	10	10	10	10	10
	d. Besar	0	0	0	0	0
3	Percetakan :	43	55	56	59	58
	a. Mikro	14	15	16		
	b. Kecil	25	36	36	55	54
	c. Menengah	4	4	4	4	4
	d. Besar	0	0	0	0	0
4	Lain-lain :	127	220	231	260	144
	a. Mikro	42	127	138		
	b. Kecil	69	73	73	240	124
	c. Menengah	16	20	20	20	20
	d. Besar	0	0	0	0	0
JUMLAH B		599	824	899	984	865
	<i>a. Mikro</i>	307	508	583		
	<i>b. Kecil</i>	252	266	266	934	818
	<i>c. Menengah</i>	37	47	47	47	47



No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	d. Besar	3	3	3	3	3
	TOTAL A+B	3.596	4.083	4.290	4.459	4450
	a. Mikro	1.982	2.272	2.479		
	b. Kecil	1.432	1.601	1.601	4.250	4245
	c. Menengah	179	206	206	205	205
	d. Besar	3	4	4	4	4

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase industri kecil menengah berkualitas	%	-	-	23,54	-
2	Jumlah IKM yang dibina	IKM	-	-	1.110	-
3	Persentase pertumbuhan industry	%	11,68	5,07	3,94	9,4
4	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	4	3	0	3
5	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	-	-	-	50
6	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	-	-	-	325
7	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	-	-	-	500
8	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	-	-	-	0
9	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	-	-	-	1,6

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya yang umumnya disebut SAKIP mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya adalah 70,21 poin berada pada kriteria BB dan pada tahun 2021 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya 71,63 poin berada kriteria BB.



Tabel. 2.114.
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Nilai SAKIP			
		2018	2019	2020	2021
1	SAKIP	70,21 (BB)	71,09 (BB)	70,84 (BB)	71,63 (BB)

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022.

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 seusai amanat Peraturan Pemerintah Nmor 6 Tahun 2008. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.115.
Capaian LPPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Capaian LPPD			
		2018	2019	2020	2021
1	LPPD	N/A	3,26	3,37	N/A

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022.

3) Level Kematangan/Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut capaian nilai SPIP Kota Tasikmalaya tahun 2018-2021.

Tabel. 2.116.
Nilai Kematangan/Maturitas SPIP
Kota Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Nilai			
		2018	2019	2020	2021
1	Maturitas	2,9	2,5	2,5	2,83

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya , 2022.

2.1.3.4.2. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber



daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah yang nanti dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

- 1) Tersedianya dokumen RPJMD perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)

Dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahu 2017-2022 dilakukan perubahan berdasarkan terbitnya peraturan perundangan-undangan seperti permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 diperlukan adanya penyesuaian terutama target indicator menyesuaikan kondisi yang ada. Terlebih lagi dengan terjadinya pandemic Covid-19 yang berdampak pada kehidupan social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu 2018 tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

- 2) Tersedianya dokumen RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perwalkot)

Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tasikmalaya.

Adapun indicator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.117.
Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang
Perencanaan Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	100	100
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	-	-	100	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	%	-	-	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	%	-	-	100	100
Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	-	-	73,53	66,67

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

3) Pemanfaatan E-planing

Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (E-planning).

2.1.3.4.3. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan



rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.118.
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Tasikmalaya
Tahun 2019 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	89,14	-
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100
Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	100
Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100
Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100
Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100
Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	99,96	-
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100	100	100
Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100	100	100
Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	100	100
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	40	24	-



INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	-	-	WTP
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	-	-	100
Persentase laporan keuangan sesuai SAP	%	-	-	100
Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	-	-	100
Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan	%	-	-	93,58
Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	-	-	100
Persentase inventarisasi asset milik daerah	%	-	-	100

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.119.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	49,29	49,62	52,92	52,92
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	74,30	76,99	76,59	78,01
Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	99,68	99,96	99,79	99,84
Capaian implementasi SIMPEG	%	52,50	60,70	68,33	80,37
Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100,00	100,00	95,00	100,00
Capaian layanan kepegawaian	%	93,01	151,92	94,43	114,37
Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	107,63	120,14	100,38	100,54

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun sampai dengan tahun 2021 umumnya menunjukkan peningkatan. Namun, capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.120.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	Tidak Inovatif	Tidak Inovatif	Tidak Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.3.4.6. Unsur Pengawasan

Tabel 2.121.
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang
Pengawasan Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IKM Perangkat Daerah	Kategori	-	77-88 (Baik)	88,40	-
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	-	72	70,47	-
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	-	80	87	-
Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	-	100	100	100
Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	-	100	100	-
Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	-	3	2 (plus)	-
Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	-	60	70,52	-
Hasil penilaian SAKIP perangkatdaerah	%	-	80 (BB)	83,31 (A)	-
Maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	-	100	100	-
Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	%	-	-	-	77,8 5
Nilai SAKIP Kota	%	-	-	-	71
Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya	Level	-	-	-	2,83
Skor PMPRB Kota Tasikmalaya	Poin	-	-	-	0
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	-	-	-	0
Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur	%	-	-	-	100
Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	-	-	-	0
Indeks Persepsi korupsi hasil survei eksternal	Poin	-	-	-	2,96
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	%	-	-	-	64,0 1
Persentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah	%	-	-	-	0
Tingkat capaian kapabilitas APIP	%	-	-	-	0
Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%	-	-	-	100
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	-	-	-	95,5 0

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2022.



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Angka konsumsi perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.122.

Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran per kapita	13.348,35	14.459,94	15.710,37	15.068,46	15.729,30
2.	Jumlah Penduduk	661.404	662.723	663.517	716.515	723.920
3.	Rata-rata Pengeluaran perkapita (juta)	20,18	21,82	23,68	-	-

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

2. Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123.

Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita
di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Konsumsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan)	Milyar Rp	6.400,16	7.054,52	8.082,98	7.755,02	7.875,23
	Persentase	%	47,95	48,79	51,45	49,84	50,07
	Pengeluaran Pangan Perkapita	Juta Rp	9,68	10,64	11,29	10,83	10,21
2.	Non Pangan		6.948,18	7.405,43	7.627,38	7.804,82	7.875,23
	Persentase	%	52,05	51,21	48,55	50,16	49,93
	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	Juta Rp	10,51	11,17	10,65	10,89	

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya

1. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di



Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.124.
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	403,910	411,302	379,525	397.157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	89,61	91,25	84,2	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	29,100	37,470	16,083	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	14,55	18,74	8,04	9,80
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	65,73	80,42	45,90	42,275
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	21,91	26,81	15,3	14,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Dari tabel diatas, tampak bahwa panjang jalan kondisi baik mengalami penurunan di tahun 2020. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya refocusing anggaran bidang jalan. Sesuai dengan umur jalan, harus dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala dan peningkatan jalan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi jalan.

Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan dan apabila sudah ada belum berfungsi secara optimal terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 2.125.
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	21,51	26,81	37,03	26,69
Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	71,7	80,93	123,43	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



Bangunan pelengkap jalan diatas meliputi pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase jalan, pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah jalan dan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan trotoar.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.126.

Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	0,7	0,9	2,45	3,425
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	10,93	14,05	38,25	53,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.127.
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Kegiatan	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	58	68,49	79,94	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	117,15	138,36	161,47	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	13,9	27,2	5,95	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	5,56	10,88	2,38	10,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021.



2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128.
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Narkoba	59	0	0	5
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	0	1	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	30	35	26	35
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	31	57	43	39
5	Jumlah Kasus Pencurian	74	108	77	69
6	Jumlah Kasus Penipuan	84	132	96	105
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	1	0
8	Jumlah Pidana Lainnya	-	98	122	120
9	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	319	430	366	376

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2021.

2. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah.

Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.129.
Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
1.	Bidang Politik	3	1	9	10
2.	Ekonomi	12	3	7	19
3.	Lainnya	32	9	19	20
	Jumlah	47	13	35	49

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

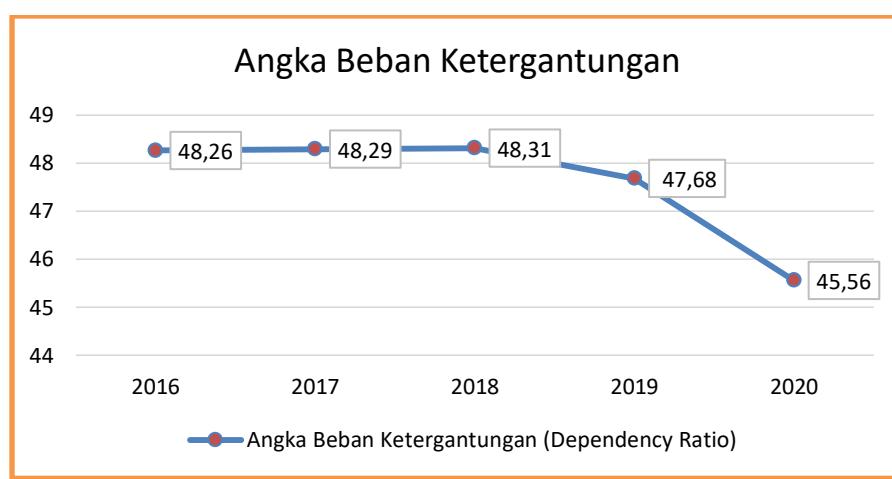
1. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk



membayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indicator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 45,56. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.34.
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)
Kota Tasikmalaya 2016-2020



2.2. Evaluasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Kinerja

Kinerja RPJMD tahun 2017-2022 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.130.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal												
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87,00	63	70	65	86,92	68	68	87	87	SETDA	
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	
P1 : Program Magrib Mengaji	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%)	90,00	70	100	75	80	80	80	90	90	SETDA	
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100,00	95	100	100	100	100	100	100	100	SETDA	
	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)	100,00	20	20	100	100	60	100	100	100	DISDIK	
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75,00	45,5	50	72,7	75	75	75	75	75	SETDA	



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	61,00	60	61,00	65	65,22	70	71,01	57	57,97	DisPorabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	80,00	60	63,00	65	65,32	70	71,10	75	75,14	DisPorabudpar
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	61,00	60	61,00	65	65,22	70	71,01	57	57,97	DisPorabudpar
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100,00	100	100,00	100	100	100	0	100	0	DisPorabudpar
Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat											
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	11,50	13,8	12,71	12,8	11,60	13,5	12,97	12,5	13,13	BPS
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	89,51	74,5	74,47	77,4	79,31	81,9	81,00	85,75	81,33	Dinsos
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100,00	0	0	0	0	100	100	100	100	Dinsos
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	100,00	82,00	74,34	85,0 0	99,64	90,00	89,97	95 2,80	99 2,89	Dinas Sosial,
											Dinas Kesehatan
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	11,25	1,00	0,34	1,25	0,291	2,8	2,88	5000	4388	Sekretariat Daerah
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang)	25000	5.000	12582, 00	5000	5900	5000	5000	600	600	Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	3150	750	910	600	910	600	356	4,5	3,57	Dinas KUMKM dan Perindag,
											Dinas Sosial,
											Dinas Pertanian Perikanan
T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	6,95	6,07	7,06	5,97	2,5	-2,01	22,98	22,85	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliyun rupiah)	23,61	20,33	20,09	22,4 ₄	21,75	22,08	21,59	30,77	31,56	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	31,04	30,6	30,32	33,7	32,78	30,23	30,14	12,5	13,13	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	9,86	9,84	9,86	10,1 ₆	10,41	7,63	10,26	8,57	10,21	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	2,00	3,76	2,30	3,53	1,72	2,5	1,61	2,25	1,17	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	0,39	0,4	0,391	0,39	0,36	0,41	0,366	0,40	0,414	BPS Kota Tasikmalaya
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	59,63	69,64	69,69	70,6 ₄	71,37	55,79	70,93	57,58	70,78	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	5,74	3,66	6,81	3,53	7,72	3,01	-1,94	4,38	1,91	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	6,97	5,22	4,58	4,96	6,85	2,45	-6,23	4,68	2,97	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,83	7,4	8,57	5,08	7,83	3,53	-3,59	4,61	2,39	BPS Kota Tasikmalaya



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Nilai investasi daerah (miliar rupiah)	300,00	325,00	520	350	1223	200,00	422,60	250	1.630	DPMPTSP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	310900,00	591.000	650.553	614000	615988	287.049	344.382	430.560	483.569	Dinas Porabudpar
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Percentase Koperasi sehat (%)	20,00	4	3,14	8	8,45	12	8	24,00	27,48	Dinas KUMKM dan Perindag
	Percentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	5,00	1	4,1	1	8,98	1	0	1	0	Dinas KUMKM dan Perindag
	Percentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	12,00	2	5	2	3,41	2	n/a	3	10	Dinas KUMKM dan Perindag
	Percentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	12,00	2	5,09	2	4.19	2	23,54	3	10,7	Dinas KUMKM dan Perindag
	Capaian penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100,00	100	80,87	39	100	100	100	100	100	DPMPTSP
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	6,2	6,85	5,6	6,75	8,5	7,99	7,72	7,66	Dinas Tenaga Kerja
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,75	65.69	62,75	65,90	65,38	66,12	66,54	66,50	65,75	
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	5.000	1.000	757	1.000	954	105	160	1.523	1.608	Dinas KUKM Perindag
											Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
											Dinas Tenaga Kerja



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
											Dinas Pendidikan
											Dinas Porabudpar
											Sekretariat Daerah
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	62,00	40	45,83	45	57,55	58	23,68	60	23	Dinas Tenaga Kerja
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,10	1,94	-0,15	1,9	-0,05	0,05	2,24	0,07	0,28	Dinas KP3
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	92,00	70	73	74	76,5	90	91,6	91	91,3	Dinas KP3
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Percentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,10	3	12,61	3,2	-5,96	0,05	0,19	0,07	10,98	Dinas KP3
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	85,00	81	82,8	82	91,11	83	91,4	84	91,5	Dinas KP3
Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan											
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Percentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	77,75	68,62	72,36	69,68	74,83	75,83	74,24	76,83	71,05	Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Dishub
S7 : Meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Percentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	86	87,88	89	90,08	93	84,44	80,00	88,10	
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	0	0	0	0	100	58,05	100	58,71	Dinas PRKP



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Percentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	86	87,88	89	90,08	93	84,44	80	88,10	Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Dishub
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,07	0,047	0,053	0,05	0,063	0,053	0,073	0,0704	0,087	Dinas PUPR
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Percentase rumah tangga bersanitasi (%)	60,49	41,17	58,65	41,30	60,42	60,49	60,54	61,04	61,20	Dinas PRKP dan Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100,00	0	0	0	0	100	0	100	100	Dinas PRKP
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Percentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	100,00	52,7	61,65	59,81	97,78	98,88	98,88	99,23	99,23	Dinas PRKP
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,40	73,52	70,56	73,72	73,99	74,00	77,33	74,20	63,85	Dinas LH
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	13,34	7,94	8,56	9,44	10,3	10,84	10,2952	12,14	10,30	Dinas LH
											Dinas PRKP
	Indeks Kualitas Air	53,60					52,88	72,37	53,54	65,75	Dinas LH
	Indeks Kualitas Udara	79,60					79,00	78,20	79,00	83,45	Dinas LH
	Percentase Penanganan Sampah (%)	83,45	61,8	59,35	64,8	71,04	76,46	71,45	77,86	73,86	Dinas LH
Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia											
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,95	71,99	72,03	72,72	72,84	72,05	73,04	73,25	73,31	



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,50	67,22	67,41	67,9 7	67,77	67,95	68,46	68,25	69,12	
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100,00	0	0	0	0	100	58,61	100	58,61	
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,70	8,73	9,04	8,87	9,13	9,35	9,33	9,55	9,52	Dinas Pendidikan dan
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,54	13,73	13,42	13,7 3	13,44	13,47	13,45	13,51	13,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,65	79,70	79,54	80,1 1	79,89	80,40	80,23	81,06	80,52	Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,01	100,00	48,09	
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,15	71,80	69,69	72,0 7	71,93	72,35	72,15	72,75	72,34	RSUD dr. Soekardjo
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	125,09	100,9 8	151,6	83,8 9	93,94	162,25	202,55	145,18	303,87	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,29	5,72	6,72	5,29	5,29	6,15	8,35	5,72	8,5	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	18,10	11	10,8	10,5	10,95	20,1	17,57	19,10	14,48	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	14,00	10	12	11	12	12	8,33	13	14	Dinas Porabudpar
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3,00	2	3	2	3	2	0	3	3	Dinas Porabudpar



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Percentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	5,00	2	2	3	3	4	4	3	4	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	2,50	3,7	5,11	3,2	5,51	3,5	5,88	3	4,46	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	0	0	0	0	100	98,29	100	98,47	Satpol PP dan BPBD
	Percentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100,00					100	100	100	100	BPBD
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Percentase penegakan Peraturan Daerah (%)	90,00	80	86	85	84,84	86	98,54	86	86,13	Satpol PP
	Percentase penanganan bencana daerah (%)	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Percentase Keluarga Sejahtera (%)	87,00	86,2	85,0	87,2	87,41	85	70,74	86	63,77	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,54	67	62,46	69	62,92 ^{*)}	91,02	91,48	91,52	91,64	DPPKBP3A
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,96	90,82	90,73	90,9 ₁	91,48	62,94	59,32	62,95	59,51	DPPKBP3A
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,20	0,25	0,20	0,23	0,12	0,22	1,27	0,21	0,81	DPPKBP3A
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,04	2,12	2,11	2,1	2,10	2,08	2,09	2,06	2,03	DPPKBP3A
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	DPPKBP3A



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,70	64,30	72,34	66,00	72,41	72,50	72,36	72,60	72,37	DPPKBP3A
Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih											
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	51-60 (CC)	54,40 (CC)	51-60 (CC)	54,4	51-60 (CC)	57,81 (CC)	61-70 (B)	57,58 (CC)*	Sekretariat Daerah/data 2019
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	79,35 (Baik)	77-88 (Baik)	79,17 (Baik)	77-88 (Baik)	82,06 (baik)	77-88 (Baik)	83,32 (baik)	Sekretariat Daerah
	Capaian Implementasi e-government ((poin)		20	25	Baik (2.65)	Nilai Evaluasi Belum Ada	0	0			Diskominfo
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Sangat Baik (3,00)	-	-	-	-	Baik (2,50)	n/a	Baik (2,75)	Baik (2,68)	Diskominfo
P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	100	80	88	85	81,58	90	81,58	95	97,22	·Semua Perangkat Daerah
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	1 (WTP)	WTP	1 (WTP)	WTP	WTP	**WTP (Data Tahun 2019)	WTP	WTP*	BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah,



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Percentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,4	2,5	-21,09	5,6	3,91	-11,79	8,02	21,79	41,68	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	81 -90 (A)	61	70,21	71-80 (BB)	71,09 (BB)	71-80 (BB)	71,09 (BB)	70-80 (BB)	70,81 (BB)*	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Belum Ada Data	3,1 - 4,0 (San gat Tinggi)	3,26	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37 (sangat Tinggi)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37 (sangat Tinggi) *	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	2	2,9	3	2,5	2,65	2,5	2,75	2,83	Inspektorat
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	75	40	74,19	50	44,73	60	76,68	73	91,67	Semua Perangkat Daerah
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	70	40	34,21	50	100	60	100	65	100	Semua Perangkat Daerah

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 202



2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selain evaluasi terhadap kinerja daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang terdapat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing program RPJMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Evaluasi program RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2021-2022 dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.131.
Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021

PERANGKAT DAERAH	2018		2019		2020		2021	
	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
Dinas Pendidikan	105.592.892.922	103.501.757.996	107.054.413.464	103.021.281.712	98.679.174.807	97.058.792.098	507.788.238.990	496.766.547.887
Dinas Kesehatan	120.346.321.870	111.043.361.642	103.736.886.899	98.219.462.163	173.640.451.812	149.861.818.535	281.938.663.548	265.123.118.897
RSUD Dr. SOEKARDJO	177.280.734.987	157.838.281.585	211.098.089.723	163.029.616.012	189.844.891.425	180.041.397.042	314.220.901.423	298.677.188.684
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	250.977.693.995	226.651.430.155	279.975.492.230	242.562.111.410	127.347.715.412	123.026.616.730	329.429.018.476	323.391.478.303
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	117.390.521.000	105.919.107.061	113.198.763.890	85.619.948.526	81.087.172.052	66.465.443.722	10.728.087.226	10.694.899.958
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.652.415.800	5.463.169.850	6.130.134.118	6.015.340.037	5.569.177.928	5.470.011.701	12.057.434.610	12.011.144.425
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.751.900.000	2.620.576.186	3.569.389.850	3.357.742.026	1.934.230.250	1.853.877.533	10.269.862.100	9.520.891.975
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.760.600.000	3.705.323.103	2.614.223.750	2.578.815.007	2.078.400.000	2.002.432.349	7.595.809.490	7.336.525.827
Dinas Sosial	5.702.484.000	4.636.978.376	4.847.703.400	4.700.065.051	4.091.532.000	4.016.578.733	10.065.946.090	9.939.546.367
Dinas Tenaga Kerja	3.934.650.000	3.302.306.805	2.641.214.850	2.399.138.980	1.567.103.000	1.452.528.807	5.382.579.140	5.286.160.310
Dinas Lingkungan Hidup	17.609.754.000	17.386.188.994	27.002.631.000	26.516.151.388	15.972.494.776	15.838.952.350	30.379.349.250	30.099.029.875
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.421.379.000	5.076.274.082	9.535.262.875	9.216.519.041	6.239.426.000	5.938.944.880	10.132.781.111	9.945.627.496



PERANGKAT DAERAH	2018		2019		2020		2021	
	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.160.824.000	6.480.124.464	8.185.235.700	7.890.066.933	6.945.088.753	6.825.628.652	13.252.970.837	12.327.116.862
Dinas Perhubungan	39.951.596.000	39.627.057.913	40.349.224.843	40.077.490.486	40.273.402.899	39.219.862.452	45.590.874.900	45.352.745.726
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.903.391.250	5.707.680.714	15.266.442.700	15.119.553.581	11.930.758.758	11.879.543.551	19.783.902.779	19.617.751.323
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	24.084.259.000	23.041.178.446	15.509.413.700	15.047.009.991	6.972.185.403	6.803.189.403	50.680.365.324	44.078.853.939
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.492.600.000	3.366.946.260	3.087.109.500	2.987.619.666	6.202.350.000	5.798.829.791	11.078.060.446	8.276.398.471
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	8.407.937.380	8.102.170.198	10.958.759.495	10.566.842.077	6.310.358.300	6.135.898.469	16.502.101.101	16.335.619.941
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.225.540.000	2.110.998.225	3.740.158.950	3.608.921.373	2.877.492.000	2.792.818.009	6.582.767.250	6.510.805.547
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	62.324.440.000	54.440.797.126	47.297.829.060	46.040.961.119	21.523.319.000	20.592.029.446	29.953.292.825	29.453.297.928
Sekretariat Daerah	44.160.048.500	41.749.824.629	42.632.106.175	40.556.822.243	28.677.034.198	27.536.921.154	73.462.972.501	72.371.495.077
Sekretariat DPRD	34.601.695.000	32.097.334.422	33.270.476.000	31.077.306.171	32.957.604.072	31.522.563.263	60.899.272.175	59.875.400.933



PERANGKAT DAERAH	2018		2019		2020		2021	
	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
Kecamatan Cihideung	2.846.669.000	2.740.510.213	4.887.106.800	4.814.477.797	6.021.634.480	5.889.764.307	10.023.319.360	9.994.732.720
Kecamatan Cipedes	2.045.700.000	2.010.930.179	4.320.262.000	4.176.279.146	4.758.815.500	4.589.095.475	8.926.453.750	8.856.834.825
Kecamatan Tawang	2.313.080.000	2.032.266.618	3.762.367.122	3.683.198.199	5.285.611.630	5.182.137.890	10.367.116.135	10.321.594.798
Kecamatan Indihiang	1.776.860.000	1.693.207.880	4.674.991.250	4.547.642.100	5.961.589.360	5.866.319.241	10.347.294.357	10.322.223.840
Kecamatan Kawalu	2.620.000.000	2.542.346.255	7.161.556.706	6.896.662.312	8.900.819.988	8.785.292.681	14.237.885.740	13.968.751.218
Kecamatan Cibeureum	2.560.850.000	2.505.471.356	6.271.639.550	6.180.102.554	7.847.867.060	7.781.315.957	14.343.586.500	14.169.256.840
Kecamatan Tamansari	2.365.500.000	2.313.870.979	6.343.167.900	6.192.245.797	7.315.158.800	7.183.724.282	11.988.477.828	11.856.410.241
Kecamatan Mangkubumi	3.436.900.000	3.352.955.467	6.151.996.050	5.694.546.316	7.604.849.700	7.533.471.444	12.359.318.600	12.288.600.736
Kecamatan Bungursari	3.389.450.000	2.249.895.717	5.316.980.685	5.135.746.043	6.563.199.220	6.368.266.754	12.295.042.112	12.232.368.762
Kecamatan Purbaratu	2.155.569.000	2.092.823.626	4.728.961.700	4.575.446.882	5.842.422.440	5.796.900.035	10.002.019.621	9.929.519.834
Inspektorat	3.289.450.000	3.065.194.243	2.786.331.040	2.481.537.523	3.320.288.732	3.142.266.776	11.962.867.560	11.838.248.871
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	7.366.267.000	6.682.099.328	6.398.805.560	5.713.416.529	3.655.610.700	3.363.073.646	11.528.657.994	11.292.026.135
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.586.093.300	8.865.191.411	9.166.107.381	8.562.317.739	7.460.014.626	6.983.335.753	44.114.738.320	42.077.406.141
Badan Pendapatan Daerah	10.339.289.000	9.868.037.667	8.475.819.200	8.137.711.910	8.919.901.800	8.437.306.448	22.822.301.804	21.984.863.638



PERANGKAT DAERAH	2018		2019		2020		2021	
	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.297.929.716	9.716.376.053	13.978.772.500	13.678.710.579	8.742.069.003	8.243.758.506	15.272.386.630	15.156.217.852

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022.



Untuk rincian capaian per program pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132.

Capaian Kinerja Anggaran Per Program Tahun 2018 – 2021

NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
I	DINAS PENDIDIKAN	105.592.892.922	103.501.757.996	107.054.413.464	103.021.281.712	98.679.174.807	97.058.792.098	507.788.238.990	496.766.547.887
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.120.030.000	2.036.954.537	2.424.753.728	2.261.364.595	2.281.548.316	2.143.620.127	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346.459.050	302.668.071	276.002.540	195.726.269	396.565.100	353.085.795	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87.150.000	86.786.354	63.240.000	62.624.097	45.500.000	45.100.260	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	30.000.000	24.590.000	52.597.000	51.887.000	62.720.800	62.208.300	-	-
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.454.865.000	1.447.788.600	1.834.276.850	1.736.644.720	1.064.264.000	1.050.219.900	-	-
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.688.283.967	20.650.747.143	21.716.053.330	21.525.874.284	11.233.325.000	11.170.865.650	-	-
7	Program Pendidikan Non Formal	3.068.078.000	3.039.796.750	3.493.280.500	3.003.039.750	2.688.396.000	2.664.432.998	-	-
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	467.225.000	458.998.500	796.049.900	772.033.500	236.869.000	231.747.470	-	-
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	402.317.500	401.818.455	550.839.100	536.427.585	707.920.100	647.417.161	-	-
10	Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar	1.156.142.000	1.079.887.000	1.482.619.250	1.361.566.000	697.099.000	577.849.000	-	-
11	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.790.871.455	65.657.244.236	66.114.800.000	64.036.389.849	72.462.530.591	71.912.199.366	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
12	Program Pelayanan Administrasi Persekolahan	-	-	-	-	6.718.417.000	6.117.784.183	-	-
13	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)	-	-	-	-	80.019.900	78.261.888	-	-
14	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	404.669.341.776	399.141.901.582
16	Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	102.478.353.402	97.038.200.551
17	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-	-	-	-	77.679.200	77.492.000
18	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	360.204.712	309.122.300
19	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.563.600
20	Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	122.659.900	120.267.854
II	DINAS KESEHATAN	120.346.321.870	111.043.361.642	103.736.886.899	98.219.462.163	165.243.571.458	149.861.818.535	281.938.663.548	265.123.118.897
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	962.839.887	881.738.233	825.526.010	748.104.566	663.921.200	591.359.495	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.199.514.000	1.124.359.181	1.338.212.500	1.226.669.013	554.019.000	495.609.326	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	43.395.000	321.851.984	318.005.543	327.414.238	295.018.212	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000	38.928.500	128.989.700	111.351.700	104.702.500	85.402.500	-	-
5	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	39.245.046.727	35.814.866.723	46.440.527.013	42.952.477.575	11.677.712.000	11.309.287.541	-	-
6	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan	447.000.000	430.520.384	234.355.000	229.064.418	119.680.000	111.756.774	-	-
7	Program Perencanaan Kerja	46.425.000	46.425.000	131.984.250	122.604.450	109.444.000	109.444.000	-	-
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.110.750.000	1.016.035.185	2.052.291.900	2.035.888.603	2.595.999.000	2.503.515.193	-	-
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.102.778.000	3.011.242.300	2.178.726.500	2.073.911.182	16.276.083.800	15.848.931.527	-	-
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	502.125.000	475.223.650	1.414.057.404	1.402.159.110	1.218.200.000	1.209.557.700	-	-
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	615.418.000	408.180.364	1.194.210.500	1.157.001.500	1.324.099.350	1.308.357.895	-	-
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.928.500.000	2.139.155.830	5.379.064.800	5.270.958.133	1.730.615.846	1.610.156.210	-	-
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.728.661.000	1.647.070.856	1.110.027.220	1.083.863.134	6.256.258.000	5.338.640.160	-	-
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	10.447.314.500	9.362.101.123	438.363.500	340.793.900	1.126.592.200	632.586.000	-	-
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	6.630.556.800	6.572.536.500	20.018.710.018	19.418.460.267	36.063.690.933	31.378.088.126	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
16	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	11.983.774.490	11.404.765.490	9.714.477.000	9.596.134.500	8.504.978.000	8.074.500.500	-	-
17	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	6.702.510.000	6.013.767.265	8.325.395.700	7.752.630.541	38.969.105.800	37.517.171.650	-	-
18	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	532.250.000	462.919.075	1.951.592.400	1.859.534.528	825.000.000	803.003.342	-	-
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	900.000.000	885.221.900	457.679.000	443.780.000	961.555.000	780.919.790	-	-
20	Program Peningkatan Pelayanan	-	-	-	-	35.774.500.591	29.806.037.594	-	-
21	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	80.844.500	76.069.500	60.000.000	52475000	-	-
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	161.872.197.321	157.449.994.109
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	100.447.207.574	89.118.302.007
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	-	-	-	17.774.965.013	16.740.422.231
25	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-	-	-	-	-	-	327.124.040	308.697.950
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	1.517.169.600	1.505.702.600
III	RSUD dr. SOEKARDJO	177.280.734.987	157.838.281.585	211.098.089.723	163.029.616.012	189.844.891.425	180.041.397.042	191.830.188.425	180.041.397.042



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
1	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	53.091.200.111	50.517.759.230	-	-	189.844.891.425	180.041.397.042	248.021.243.054	237.908.376.206
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	66.199.658.369	60.768.812.478
IV	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250.977.693.995	226.651.430.155	279.975.492.230	242.562.111.410	127.347.715.412	123.026.616.730	329.429.018.476	323.391.478.303
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.001.210.000	886.883.480	861.051.600	788.264.839	944.801.851	884.147.034	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.187.865.000	1.017.705.068	712.510.000	636.793.242	489.200.000	469.396.662	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.500.000	21.274.000	53.618.000	49.038.000	175.000.000	173.894.684	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	-	-	-	-	100.000.000	96.233.376	-	-
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	35.000.000	34.926.000	102.845.000	99.068.900	14.454.638.600	13.819.301.230	-	-
6	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	15.804.574.700	15.036.043.400	52.819.513.100	39.088.578.092	22.296.300.000	21.714.711.134	-	-
7	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	35.203.557.000	32.750.711.105	52.819.513.100	39.088.578.092	3.178.115.000	3.128.427.683	-	-
8	Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	21.882.947.450	21.402.211.741	21.664.224.622	21.166.118.653	9.485.299.000	9.102.111.800	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	27.581.491.990	27.097.364.692	84.212.473.085	82.652.358.202	61.751.706.500	60.157.374.861	-	-
10	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan	-	-	2.565.623.900	2.388.689.857	1.024.229.100	891.513.738	-	-
11	Program Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	-	-	41.956.469.423	22.967.065.376	17.283.425.361	12.426.630.028	-	-
12	Program Peningkatan Pelayanan Publik	50.000.000	49.980.000	114.726.000	113.892.400	165.000.000	162.874.500	-	-
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	11.279.161.122	11.088.357.219
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	-	-	-	-	-	-	75.868.934.462	74.748.012.110
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-	7.656.201.717	7.003.874.237
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	-	-	-	-	6.595.046.400	6.406.269.290
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	-	-	-	-	14.872.026.224	14.634.707.780
18	Program Pengembangan Permukiman	-	-	-	-	-	-	89.812.058.900	88.618.513.583
19	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	10.047.343.900	9.415.661.251
20	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	-	-	-	-	111.650.519.176	109.986.856.097
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	53.500.000	13.732.500



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	1.533.413.575	1.419.424.730
23	Program Penatagunaan Tanah	-	-	-	-	-	-	60.813.000	56.069.506
V	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117.390.521.000	105.919.107.061	113.198.763.890	85.619.948.526	81.087.172.052	66.465.443.722	10.728.087.226	10.694.899.958
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	821.145.000	737.388.359	960.602.995	782.572.512	657.569.190	577.027.066	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	984.200.000	899.758.765	576.086.200	520.739.711	365.691.100	327.491.330	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.655.000	52.466.700	15.620.000	15.620.000	54.000.000	53.480.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000	33.840.015	32.290.000	27.657.000	7.500.000	7.500.000	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	22.000.000	20.434.000	67.837.000	60.403.400	39.500.000	36.470.200	-	-
6	Program Pengembangan Perumahan					342.760.000	323.880.758	-	-
7	Program Pengelolaan Pertanahan					3.852.000	3.852.000	-	-
8	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman	100.439.425.000	90.492.586.728	107.517.233.795	80.927.840.339	78.378.253.400	63.904.571.068	-	-
9	Program Penataan Pertamanan dan Dekorasi			2.707.200.500	2.049.612.330	878.164.462	874.652.500	-	-
10	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.500.000.000	1.449.591.750	687.413.400	658.130.008	346.881.900	343.968.900	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik			68.090.000	65.849.300	13.000.000	12.549.900 12.549.900	-	-
VI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					5.569.177.928	5.470.011.701	-	-
1	Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	-	-	-	-	3.463.286.563	3.399.554.240	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	603.031.110	596.614.025	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	221.750.000	221.667.000	-	-
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	8.000.000	7.760.000	-	-
5	Program perencanaan kerja	-	-	-	-	46.800.000	45.188.060	-	-
6	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	169.856.645	167.834.055	-	-
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	-	132.533.524	132.279.320	-	-
8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	459.378.900	457.102.750	-	-
9	Program Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	-	462.541.186	440.012.251	-	-
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.865.211.118	4.843.892.207
12	Program Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	3.561.603.099	3.558.696.199
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	-	-	-	-	-	-	2.301.273.009	2.292.311.552
VII	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.751.900.000	2.620.576.186	3.569.389.850	3.357.742.026	1.934.230.250	1.853.877.533	10.269.862.100	9.520.891.975
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	363.900.000	320.132.545	321.610.000	283.254.046	239.685.250	235.362.147	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.000.000	90.033.541	95.715.500	79.251.895	58.600.000	58.049.340	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	17.282.000	11.000.000	9.159.600	8.490.000	8.477.250	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	14.000.000	11.995.000	20.840.000	17.867.500	12.105.000	12.035.400	-	-
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	750.000.000	740.417.600	536.880.000	528.214.500	427.800.000	381.793.877	-	-
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	300.000.000	286.348.800	526.114.550	512.918.610	279.200.000	264.603.408	-	-
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.127.000.000	1.089.339.360	2.020.919.800	1.892.010.575	855.200.000	846.749.561	-	-
8	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	10.000.000	9.080.100	-	-	49.500.000	43.185.350	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Publik	60.000.000	55.947.240	32.810.000	32.108.900	3.650.000	3.621.200	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	2.730.232.100	2.690.915.422
11	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	124.138.400	115.736.065
12	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	-	-	-	1.573.886.000	1.358.369.368
13	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	5.603.588.900	5.131.003.350
14	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	-	-	-	-	-	57.025.300	56.115.660
15	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	180.991.400	168.752.110
VIII	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.760.600.000	3.705.323.103	2.614.223.750	2.578.815.007	2.078.400.000	2.002.432.349	7.595.809.490	7.336.525.827
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.715.400	483.819.885	520.162.600	509.726.150	388.614.000	361.979.754	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.388.600	354.049.358	330.816.000	326.885.736	173.767.100	170.053.712	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.855.000	4.880.550	19.300.000	19.109.500	7.680.000	7.676.300	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	11.171.000	11.070.350	23.900.000	23.806.200	22.920.000	22.683.600	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.409.270.000	2.386.407.534	1.712.045.150	1.691.587.421	1.485.418.900	1.440.038.983	-	-
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	3.508.884.950	3.461.822.412
7	Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	3.717.269.700	3.511.996.265
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	-	369.654.840	362.707.150
IX	DINAS SOSIAL	5.702.484.000	4.636.978.376	4.847.703.400	4.700.065.051	4.091.532.000	4.016.578.733	10.065.946.090	9.939.546.367
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.376.500	739.195	750.680.000	729.275.343	1.101.900.000	1.072.933.259	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	785.014.000	764.620.715	359.240.000	353.761.001	611.500.000	610.066.246	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	29.995.000	30.000.000	29.733.000	50.000.000	49.700.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	22.500.000	206.091.000	183.604.600	79.000.000	78.045.000	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	15.000.000	15.000.000	153.525.000	151.350.516	85.500.000	85.462.000	-	-
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.241.630.000	2.097.956.441	1.310.051.400	1.283.633.230	803.457.000	781.108.114	-	-
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya	1.150.849.500	1.068.807.475	607.094.500	560.629.490	97.500.000	97.438.900	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	824.674.500	818.446.895	658.475.000	642.762.664	-	-
9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	70.000.000	68.181.500	-	-	321.200.000	318.221.250	-	-
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	10.000.000	9.999.000	-	-
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.675.621.790	5.606.118.667
12	Program Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	-	-	1.187.310.700	1.169.638.348
13	Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-	1.555.178.400	1.541.665.507
14	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	500.045.900	499.239.300
15	Program Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	-	923.065.300	916.667.300
16	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	-	-	-	224.724.000	206.217.245
X	DINAS TENAGA KERJA	3.934.650.000	3.302.306.805	2.641.214.850	2.399.138.980	1.567.103.000	1.452.528.807	5.382.579.140	5.286.160.310
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	584.798.000	580.629.268	692.202.600	654.395.647	673.393.000	621.916.237	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	461.862.000	399.440.201	442.776.600	413.570.800	236.550.000	234.046.900	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	14.597.925	67.800.000	67.440.200	71.200.000	62.410.200	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	13.000.000	11.250.404	72.354.500	68.088.183	41.770.000	40.056.800	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					23.500.000	18.953.350	-	-
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	700.000.000	624.373.425	199.823.900	183.676.450	110.000.000	87.934.750	-	-
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	800.000.000	394.434.454	369.796.000	367.050.900	300.000.000	288.022.160	-	-
8	Program Pencetakan Wirausaha Baru Bidang Tenaga Kerja	-	-	300.000.000	278.028.850	99.690.000	88.535.260	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	11.000.000	10.653.150	-	-
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.178.560.340	4.130.654.513
11	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	883.177.600	850.391.350
12	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	84.788.000	82.273.900
13	Program Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-	236.053.200	222.840.547
XI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.609.754.000	17.386.188.994	27.002.631.000	26.516.151.388	15.972.494.776	15.838.152.350	30.379.349.250	30.099.029.875
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	945.553.600	913.017.312	953.000.000	947.922.852	946.385.900	941.933.305	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	916.573.000	909.634.086	570.000.000	508.968.750	498.600.000	469.859.400	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	12.500.000	12.500.000	22.500.000	22.500.000	10.000.000	9928000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	27.500.000	27.500.000	47.500.000	42.443.000	30.000.000	25.550.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.047.232.400	11.957.499.323	671.000.000	651.101.628	13.576.904.776	13.499.764.609	-	-
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	623.650.000	595.601.706	4.168.256.000	4.063.192.907	389.335.900	385.280.800	-	-
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.440.500.000	1.406.724.381	72.375.000	59.666.400	352.968.200	340.118.536	-	-
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1.583.045.000	1.550.512.186	10.000.000	10.000.000	168.300.000	165.717.700	-	-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	15.461.682.450	15.347.607.053
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	3.262.600	2.767.900
11	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	207.864.000	201.897.178
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	-	-	-	-	-	1.136.993.500	1.098.103.800
13	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	-	-	-	-	-	87.837.800	86.379.650
14	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	13.575.000	13.575.000
15	Program Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	13.468.133.900	13.348.699.294



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
XII	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.421.379.000	5.076.274.082	9.535.262.875	9.216.519.041	6.239.426.000	5.938.944.880	10.132.781.111	9.945.627.496
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.650.708.000	1.510.591.658	938.773.500	908.871.323	1.033.900.000	962.977.033	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	989.814.000	875.764.653	976.080.000	936.041.440	1.219.400.000	1.171.756.764	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000	33.880.000	42.000.000	41.734.000	60.000.000	59.943.400	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	30.000.000	28.500.000	28.379.480	20.000.000	19.996.520	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	50.000.000	49.994.000	59.664.750	59.349.468	65.000.000	64.965.500	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	5.280.543.925	5.199.419.549	708.000.000	678.278.125	-	-
7	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	146.676.800	145.240.040	140.000.000	138.736.954	-	-
8	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1.820.494.000	1.659.620.879	471.500.000	432.406.430	-	-
9	Program Peningkatan Kerjasama, Pemanfaatan Data, dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	214.105.000	209.502.312	228.600.000	220.313.463	-	-
10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	2.283.026.000	2.179.626.281	-	-
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	75.000.000	74.520.000	28.424.900	28.360.550	10.000.000	9.944.410	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	8.871.645.611	8.755.028.107
13	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	-	1.071.805.000	1.007.733.589
14	Program Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	86.597.000	85.951.700
15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	102.733.500	96.914.100
XIII	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.160.824.000	6.480.124.464	8.185.235.700	7.890.066.933	6.945.088.753	6.825.628.652	13.252.970.837	12.327.116.862
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	669.398.000	635.561.580	748.690.000	714.297.606	609.651.921	574.974.579	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	412.616.000	406.363.400	425.610.500	420.781.020	435.987.700	428.400.520	-	-
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	25.000.000	24.341.964	37.250.000	36.650.365	20.000.000	19.783.548	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	22.500.000	22.322.350	48.390.000	47.286.967	65.000.000	63.189.563	-	-
5	Program Keluarga Berencana	4.480.257.000	3.860.592.183	5.223.792.500	4.987.000.068	5.063.695.032	5.013.209.242	-	-
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	300.000.000	298.928.953	599.293.500	593.650.007	47.144.360	45.724.420	-	-
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	295.125.000	285.002.528	155.050.000	151.029.350	65.153.000	60.926.970	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	94.000.000	93.390.800	528.676.000	523.373.050	415.802.900	398.048.850	-	-
9	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	822.928.000	814.891.906	151.915.900	150.041.880	48.000.000	47.345.400	-	-
10	Program Pengendalian Data Mikro	-	-	199.567.300	199.406.910	159.653.840	159.200.860	-	-
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	15.000.000	14.867.110	15.000.000	14.824.700	-	-
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.746.461.387	4.711.437.435
13	Program Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	-	164.200.000	163.115.686
14	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	-	-	-	-	-	-	5.665.339.400	4.895.204.456
15	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	-	-	-	-	-	-	1.373.554.550	1.301.006.848
16	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	-	110.965.100	106.493.855
17	Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	-	-	31.056.000	31.028.000
18	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	-	-	813.003.000	773.621.315
19	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	-	-	-	-	-	206.665.400	203.636.017
20	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	-	-	-	141.726.000	141.573.250
XIV	DINAS PERHUBUNGAN	39.951.596.000	39.627.057.913	40.349.224.843	40.077.490.486	40.273.402.899	39.219.862.452	45.590.874.900	45.352.745.726
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.718.415.008	26.516.443.791	27.898.152.493	27.836.528.227	30.503.916.081	29.588.201.240	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.888.178.800	1.879.050.448	756.598.000	710.927.272	2.247.256.540	2.245.842.652	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.000.000	69.425.000	69.108.800	68.383.400	30.000.000	29.856.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	30.000.000	29.760.000	82.556.200	81.885.820	72.885.600	71.066.000	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	207.293.000	206.181.712	2.705.587.660	2.634.724.583	1.237.770.800	1.209.229.634	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	6.603.500.000	6.569.841.520	8.628.456.640	8.539.363.265	6.095.897.878	5.993.647.851	-	-
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	136.265.050	134.958.419	85.676.000	82.019.075	-	-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	36.222.095.200	36.140.639.980
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	-	-	-	-	-	-	9.368.779.700	9.212.105.746
XV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.903.391.250	5.707.680.714	15.266.442.700	15.119.553.581	11.930.758.758	11.879.543.551	19.783.902.779	19.617.751.323
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.004.750.000	1.924.654.124	1.747.255.000	1.722.972.896	536.359.000	512.664.781	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	686.900.000	670.038.438	278.887.500	274.098.144	431.600.000	425.890.046	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000	34.707.200	27.000.000	26.719.000	9.300.000	9.152.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.860.000	20.000.000	19.710.000	8.000.000	7.936.800	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Perencanaan Kerja	41.000.000	39.471.700	79.000.000	76.215.700	67.000.000	66.516.035	-	-
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	170.891.250	170.293.610	141.319.000	131.581.679	38.750.000	38.166.450	-	-
7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	812.850.000	777.895.424	2.174.005.200	2.160.806.374	925.287.738	922.719.862	-	-
8	Program Implementasi Smart City	-	-	10.271.681.000	10.185.963.026	9.574.762.020	9.558.946.244	-	-
9	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	-	-	308.220.000	306.723.348	209.000.000	208.355.685	-	-
10	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	189.075.000	184.948.414	126.700.000	125.292.648	-	-
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000	9.860.000	4.000.000	3.903.000 3.903.000	-	-
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.904.154.141	4.875.363.296
13	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	1.008.858.000	1.001.849.389
14	Program Aplikasi Informatika	-	-	-	-	-	-	13.580.280.388	13.452.737.818
15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-	123.438.250	121.950.730
16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	167.172.000	165.850.090



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
XVI	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.084.259.000	23.041.178.446	15.509.413.700	15.047.009.991	6.972.185.403	6.803.189.403	50.680.365.324	44.078.853.939
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.206.872.000	1.127.766.806	1.373.329.215	1.311.678.542	1.369.322.450	1.302.677.662	-	-
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.188.901.700	1.141.942.540	783.005.000	765.803.526	598.557.400	570.581.620	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.280.000	37.897.200	49.880.000	49.846.500	51.268.800	51.268.800	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	128.160.000	128.119.500	66.022.485	65.845.541	59.311.000	59.311.000	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	25.412.000	23.004.000	88.000.000	85.350.223	25.000.000	22.027.850	-	-
6	Program Perencanaan Kerja	178.640.000	173.848.000	165.000.000	163.091.579	53.400.000	51.742.178	-	-
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	2.445.783.000	2.406.126.200	806.972.500	800.918.483	189.730.475	181.943.048	-	-
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	335.000.000	325.397.700	168.014.000	166.382.648	75.507.150	75.507.150	-	-
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	410.000.000	394.453.500	684.884.500	670.360.773	567.823.063	556.747.263	-	-
10	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.401.750.000	2.306.933.200	877.561.000	863.512.586	612.758.300	606.752.148	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
11	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.860.000.000	1.745.128.300	1.092.880.000	1.063.520.368	405.082.800	381.175.650	-	-
12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	664.763.300	643.300.000	346.318.000	343.318.891	128.998.650	126.248.857	-	-
13	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.001.000.000	1.852.069.800	895.656.000	823.618.946	24.734.229	24.379.229	-	-
14	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100.000.000	94.618.900	169.881.000	166.334.127	200.000.000	199.168.724	-	-
15	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar	3.874.697.000	3.663.225.000	3.061.331.000	2.984.705.838	2.610.691.086	2.593.658.224	-	-
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	10.452.758.835	10.395.370.266
17	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	9.941.450	9.826.450
18	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	82.438.500	82.233.300
19	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	-	-	-	-	-	-	64.901.000	64.855.300
20	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	-	-	-	-	-	-	390.304.000	389.073.974
21	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	-	-	-	145.000.000	144.884.050



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	-	-	-	-	-	-	260.542.200	259.346.815
23	Program Pengembangan Ukm	-	-	-	-	-	-	693.735.100	680.379.203
24	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	-	-	-	-	-	-	25.000.000	24.743.500
25	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	-	20.539.297.631	15.097.702.416
26	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	-	-	-	-	-	-	44.952.500	43.302.156
27	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-	-	-	-	140.822.414	137.828.701
28	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	-	-	-	-	-	-	220.826.620	197.022.050
29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	250.000.000	249.973.000
30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	-	-	-	-	-	-	17.341.325.074	16.284.324.958
31	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	-	-	-	-	-	18.520.000	17.987.800
XVII	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.492.600.000	3.366.946.260	3.087.109.500	2.987.619.666	6.202.350.000	5.798.829.791	11.078.060.446	8.276.398.471
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.074.400.000	994.333.818	1.356.975.000	1.323.215.602	1.063.200.000	981.397.383	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.120.100.000	1.085.120.178	729.000.000	689.991.847	472.600.000	450.002.030	-	-
3	Program Peningkata Disiplin Aparatur	-	-	-	-	22.250.000	22.248.600 22.248.600	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195.000.000	195.000.000	100.000.000	97.050.000	36.000.000	33.451.504	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	29.887.000	35.000.000	34.220.956	20.000.000	19.996.000	-	-
6	Program Perencanaan Kerja	50.000.000	49.496.000	75.000.000	73.966.874	80.000.000	79.461.000	-	-
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300.000.000	299.069.650	563.949.000	556.865.457	385.000.000	381.793.942	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan			205.492.500	192.135.930	4.073.300.000	3.795.725.107	-	-
9	Program Peningkatan Publik	20.600.000	20.582.500	21.693.000	20.173.000	50.000.000	34.754.225 34.754.225	-	-
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	7.313.302.946	5.706.222.076
11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	145.100.000	-
12	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	289.220.500	-
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	2.685.765.000	2.153.036.826



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	448.662.000	341.183.344
15	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	196.010.000	75.956.225
XVIII	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8.407.937.380	8.102.170.198	10.958.759.495	10.566.842.077	6.310.358.300	6.135.898.469	16.502.101.101	16.335.619.941
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.199.950.000	1.143.362.095	690.339.670	653.715.849	615.550.000	591.479.030	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	738.065.000	734.430.718	411.700.000	396.122.500	505.240.000	501.261.250	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	8.000.000	7.920.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	19.927.000	93.050.000	89.254.240	70.250.000	70.024.500	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	20.000.000	19.490.000	116.500.000	110.467.115	66.000.000	65.747.500	-	-
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.337.000.000	1.318.990.300	1.122.250.700	1.110.417.877	731.501.000	706.984.750	-	-
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	275.000.000	271.673.150	680.794.275	580.952.445	479.000.000	472.403.300	-	-
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.937.800.000	1.892.455.700	3.365.088.500	3.292.293.229	932.254.400	906.083.934	-	-
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	50.000.000	49.415.500	678.644.800	672.477.260	593.500.000	588.905.540	-	-
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.156.287.380	1.109.762.050	537.452.500	535.042.100	358.000.000	356.622.665	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
11	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	50.000.000	49.994.000	2.140.940.000	2.040.249.640	1.760.782.900	1.683.632.000	-	-
12	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	281.500.000	279.678.640	211.509.400	196.405.463	133.980.000	128.890.000	-	-
13	Program Pencetakan Wirausaha Baru Bidang Kepariwisataan	-	-	267.223.400	263.697.970	55.300.000	54.944.000	-	-
14	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000	4.957.500	1.000.000	1000000	-	-
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.810.367.730	5.728.822.129
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	-	-	-	2.018.000.000	2.011.745.100
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	-	-	5.080.176.000	5.046.349.681
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	-	-	-	260.000.000	260.000.000
19	Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	313.330.000	308.571.500
20	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	-	-	-	942.075.160	932.142.284
21	Program Pembinaan Sejarah	-	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000
22	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	85.763.080	77.710.150
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	-	-	479.499.838	475.463.950



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
24	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	-	-	365.932.285	361.245.055
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	1.106.957.008	1.093.570.092
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.810.367.730	5.728.822.129
XIX	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.225.540.000	2.110.998.225	3.740.158.950	3.608.921.373	2.877.492.000	2.792.818.009	6.582.767.250	6.510.805.547
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.543.200	652.051.674	740.308.000	697.214.278	803.006.800	746.883.632	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	830.256.800	764.060.415	500.883.000	478.772.664	612.497.000	593.787.902	-	-
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.500.000	12.397.175	12.500.000	12.415.750	17.500.000	16.852.675	-	-
4	Perencanaan Kerja	12.500.000	12.444.075	70.382.950	70.049.110	49.473.000	48.108.800	-	-
5	Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perpustakaan	-	-	1.412.804.000	1.366.394.900	697.045.000	692.516.600	-	-
6	Pengembangan Budaya Baca	173.440.000	172.783.840	377.491.000	365.214.471	128.715.000	128.336.750	-	-
7	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	216.700.000	213.250.500	309.050.000	306.863.400	318.350.000	317.423.950	-	-
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	-	138.728.000	136.685.900	90.000.000	88.675.000	-	-
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.000.000	29.794.000	-	-	99.105.200	99.103.700	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	10.000.000	9.952.500	148.612.000	146.404.150	59.300.000	58.629.000	-	-
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.928.624.500	4.893.148.268
13	Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	1.129.590.000	1.104.249.155
14	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	-	-	-	-	-	-	22.480.000	21.852.048
15	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	-	-	502.072.750	491.556.076
XX	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	62.324.440.000	54.440.797.126	47.297.829.060	46.040.961.119	21.523.319.000	20.514.721.482	29.953.292.825	29.453.297.928
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.116.100.000	940.629.237	1.043.095.600	997.851.928	1.066.840.000	979.264.584	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	560.000.000	477.841.253	811.343.200	714.986.555	538.874.000	360.196.794	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	50.000.000	39.500.000	38.930.000	84.900.000	80.201.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	20.000.000	18.495.000	129.882.410	128.289.950	80.000.000	79.249.000	-	-
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	755.000.000	697.340.671	-	-
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	1.660.000.000	1.526.814.150	134.911.000	119.051.500	29.170.000	22.131.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
7	Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian	-	-	582.707.000	501.389.000	235.815.000	187.419.500	-	-
8	Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian	-	-	700.250.500	685.128.720	327.410.000	311.587.300	-	-
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	400.000.000	397.229.100	100.650.000	100.614.900	32.000.000	31.753.700	-	-
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	16.465.500.000	15.540.678.650	19.592.302.800	18.944.836.208	6.854.825.000	6.702.825.950	-	-
11	Program Peningkatan SDM Pertanian	1.314.481.000	1.117.568.475	1.986.812.500	1.944.920.250	322.940.000	245.969.731	-	-
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	9.072.000.000	8.807.609.647	8.707.569.650	8.540.417.540	6.512.540.000	6.293.326.334	-	-
13	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	3.375.000.000	2.605.672.335	1.863.073.900	1.851.469.358	669.000.000	664.881.718	-	-
14	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5.661.400.000	5.461.252.144	3.111.656.500	3.084.722.059	3.488.524.500	3.420.154.555	-	-
15	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	843.000.000	831.653.099	2.622.161.200	2.597.906.990	257.000.000	177.297.645	-	-
16	Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Perikanan	-	-	270.895.000	268.504.250	187.800.000	185.691.500	-	-
17	Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan	-	-	267.484.400	237.253.956	80.680.500	75.430.500	-	-
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	13.665.111.125	13.496.947.970



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
19	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	865.126.700	830.046.336
20	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-	-	48.871.200	48.603.000
21	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	-	11.174.700	10.724.600
22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	7.831.669.220	7.609.604.383
23	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	477.636.280	466.545.726
24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	3.788.575.800	3.762.958.100
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	2.069.888.000	2.037.696.743
26	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	-	816.589.750	813.253.370
XXI	SEKRETARIAT DAERAH	44.160.048.500	41.749.824.629	42.632.106.175	40.556.822.243	28.664.159.018	27.505.858.654	73.462.972.501	72.371.495.077
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.154.131.500	12.495.760.985	13.051.255.295	12.750.797.881	12.113.408.440	11.794.687.751	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.368.506.150	5.173.051.883	4.894.741.335	4.638.361.840	4.118.759.982	3.966.229.950	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	366.695.000	366.038.000	355.695.000	355.481.500	288.525.500	288.231.900	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.000.000	42.607.280	67.000.000	65.488.947	48.750.000	46.426.825	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	8.000.000	7.866.500	39.500.000	39.320.000	69.200.000	68.063.360	-	-
6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	198.000.000	195.825.875	178.280.000	176.355.300	152.590.000	151.100.000	-	-
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	380.926.050	374.666.048	176.721.305	175.461.995	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	550.000.000	520.387.291	1.156.855.145	1.087.436.549	898.500.000	793.063.550	-	-
9	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	870.000.000	868.818.250	882.390.000	871.142.050	329.595.964	322.012.550	-	-
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000.000	99.790.100	48.570.000	48.124.400	45.250.000	44.998.050	-	-
11	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	55.535.000	50.741.615	27.635.000	25.438.050	-	-
12	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	250.000.000	220.409.245	189.011.000	187.341.910	117.659.000	114.282.624	-	-
13	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.899.200.000	2.528.346.503	1.543.200.000	1.133.530.880	710.498.500	464.508.867	-	-
14	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	3.279.181.250	3.025.342.890	507.215.000	485.559.012	313.220.600	301.284.720	-	-
15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.591.605.000	1.433.858.106	1.427.832.500	1.375.970.352	660.546.280	583.823.481	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
16	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	485.590.500	427.370.312	107.769.950	101.716.260	-	-
17	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	6.459.553.600	6.459.553.600	6.331.264.580	6.004.134.433	3.590.234.972	3.481.559.085	-	-
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	142.182.500	138.690.786	103.425.000	100.984.940	-	-
19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	240.000.000	230.621.414	98.478.000	53.303.700	59.999.300	50.881.870	-	-
20	Program Pemenuhan, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	-	-	537.830.000	449.380.480	135.200.000	134.382.964	-	-
21	Program Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	-	-	5.485.080.300	5.320.923.789	1.168.203.550	1.136.105.435	-	-
22	Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	-	-	1.214.399.500	1.175.787.926	421.814.650	413.627.101	-	-
23	Program Fasilitasi Tasik Bersedekah	-	-	-	-	48.073.400	47.092.835	-	-
24	Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan	-	-	301.958.300	243.331.873	191.740.930	180.315.439	-	-
25	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	2.677.859.850	2.616.013.699	2.741.836.695	2.719.579.052	-	-
26	Program Fasilitasi Maghrib Mengaji	-	-	430.886.320	352.498.881	37.875.180	31.062.500	-	-
27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	39.932.207.689	39.232.355.155
28	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	29.928.549.592	29.928.549.592



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
29	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	3.602.215.220	3.210.590.330
XXII	SEKRETARIAT DPRD	34.601.695.000	32.097.334.422	33.270.476.000	31.077.306.171	32.957.604.072	31.417.608.283	60.899.272.175	59.875.400.933
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.656.237.000	7.075.233.895	7.697.227.800	7.486.508.609	7.174.746.072	6.932.317.207	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.302.061.000	4.081.930.204	4.097.636.500	3.819.173.150	3.939.229.000	3.918.408.964	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	702.297.000	675.105.200	822.755.000	815.403.050	811.864.500	804.477.685	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55.000.000	40.372.530	20.000.000	19.034.125	20.000.000	19.238.945	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	11.000.000	8.126.525	25.000.000	21.778.240	83.280.000	75.072.675	-	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	19.330.157.000	17.852.919.052	19.019.140.700	17.376.172.952	19.464.739.500	18.227.931.309	-	-
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.588.716.000	1.539.236.045	1.463.745.000	1.440.161.498	-	-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	42.592.311.397	42.277.662.269
9	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	-	-	-	-	-	-	18.306.960.778	17.597.738.664
XXIII	KECAMATAN CIHIDEUNG	2.846.669.000	2.740.510.213	4.887.106.800	4.814.477.797	6.021.634.480	5.889.764.307	10.023.319.360	9.994.732.720
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.185.500	342.752.681	349.100.000	332.747.704	287.582.280	273.267.523	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	648.840.000	635.229.529	111.064.000	101.764.775	147.635.000	147.404.248	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	24.904.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	7.000.000	5.565.000	63.500.000	63.492.800	62.500.000	62.134.675	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Publik	10.000.000	9.840.000	3.087.630.000	3.073.117.800	4.568.458.200	4.464.212.040	-	-
7	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1.079.912.800	1.051.198.518	908.394.000	895.851.821	-	-
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	161.000.000	157.540.200	22.565.000	22.394.000	149.489.800	149.437.400
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.888.173.520	5.885.229.163
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	253.901.200	252.542.400
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.643.975.140	3.619.744.257
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	87.779.700	87.779.500
XXIV	KECAMATAN CIPEDES	2.045.700.000	2.010.930.179	4.320.262.000	4.176.279.146	4.758.815.500	4.589.095.475	8.926.453.750	8.856.834.825
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	336.154.400	327.335.083	323.637.500	312.243.930	260.126.400	248.070.602	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494.644.600	483.103.855	284.553.500	268.091.529	74.500.000	68.112.059	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.992.250	17.500.000	17.480.000	17.500.000	16.467.500	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	4.000.000	3.995.000	51.325.000	49.810.000	52.000.000	50.432.400	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.465.481.000	2.373.486.190	3.462.265.200	3.342.642.500	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	949.702.500	933.672.897	834.998.900	808.693.414	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	228.062.500	221.494.600	57.425.000	54.677.000	16.250.000	16.173.500
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.210.480.550	5.191.848.094
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	408.880.000	404.990.400
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.213.072.700	3.173.587.131
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	77.770.500	70.235.700
XXV	KECAMATAN TAWANG	2.313.080.000	2.032.266.618	3.762.367.122	3.683.198.199	5.285.611.630	5.182.137.890	10.367.116.135	10.321.594.798
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	315.724.000	310.947.312	354.879.500	345.883.549	276.176.000	265.932.462	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	672.081.000	613.317.375	141.400.000	133.661.425	101.500.000	97.250.552	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.100.000	37.755.300	14.950.000	14.800.500	8.100.000	8.019.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.999.850	15.000.000	14.961.150	14.500.000	14.370.000	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	4.000.000	4.000.000	49.750.000	49.172.550	49.324.780	49.038.600	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.038.270.722	2.005.452.925	4.002.338.850	3.930.378.980	-	-
7	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	953.316.900	926.873.910	821.211.500	804.687.796	-	-
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	194.800.000	192.392.190	12.460.500	12.460.500	7.062.600	7.062.600
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	6.552.544.960	6.534.676.102
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	295.091.200	279.031.900
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.420.572.775	3.409.179.646
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	91.844.600	91.644.550
XXVI	KECAMATAN INDIHIANG	1.776.860.000	1.693.207.880	4.674.991.250	4.547.642.100	5.961.589.360	5.866.319.241	10.347.294.357	10.322.223.840
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.106.000	310.290.008	299.093.000	280.940.886	274.402.400	269.359.445	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.225.000	222.520.385	159.355.000	149.026.757	114.500.000	94.184.986	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.830.000	15.000.000	14.571.750	17.500.000	16.750.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	7.000.000	6.881.000	54.500.000	53.842.650	57.380.000	56.731.035	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.576.161.000	2.523.971.190	4.587.241.460	4.538.594.628	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	942.149.250	916.373.370	876.497.500	857.677.247	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	621.233.000	601.415.497	34.068.000	33.021.900	35.875.000	34.749.800
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	6.302.706.647	6.350.398.209
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	367.824.000	357.499.000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.550.022.360	3.523.412.231
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	90.866.350	56.164.600
XXVII	KECAMATAN KAWALU	2.620.000.000	2.542.346.255	7.161.556.706	6.896.662.312	8.900.819.988	8.785.292.681	14.237.885.740	13.968.751.218
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.244.000	476.179.694	397.375.990	366.371.007	378.270.000	363.987.025	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394.450.000	382.284.050	138.694.600	131.976.300	206.810.000	199.542.200	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.920.920	14.000.000	12.813.050	12.372.000	12.318.800	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	4.000.000	3.989.200	86.489.000	85.092.900	79.500.000	78.466.425	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik			4.658.254.550	4.497.170.685	6.742.788.288	6.693.915.445	-	-
6	Program Pembinaan Adminisnistrasi Pemerintahan			1.575.959.066	1.516.644.645	1.456.079.700	1.420.022.936	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	283.783.500	279.614.225	25.000.000	17.039.850	23.728.600	16.084.250
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	8.695.594.200	8.614.782.100
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	272.281.600	270.423.900
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5.138.281.340	5.059.460.968
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	108.000.000	8.000.000
XVIII	KECAMATAN CIBEUREUM	2.560.850.000	2.505.471.356	6.271.639.550	6.180.102.554	7.847.867.060	7.781.315.957	14.343.586.500	14.169.256.840
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.600.700	367.556.311	332.587.500	380.600.700	325.738.535	317.175.157	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.423.900	348.053.606	423.027.000	360.423.900	126.367.000	122.903.800	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.605.000	8.348.400	17.500.000	17.367.375	10.000.000	9.932.500	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	6.721.000	4.677.340	64.050.000	63.160.100	52.200.000	51.556.550	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	6.157.144.525	6.131.996.221	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	3.707.342.000	3.692.766.055	1.146.359.500	1.121.178.729	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	1.466.786.850	1.423.517.627	30.057.500	26.573.000	23.728.600	16.084.250
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	8.695.594.200	8.614.782.100
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	272.281.600	270.423.900
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	5.138.281.340	5.059.460.968
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	108.000.000	8.000.000
XXIX	KECAMATAN TAMANSARI	2.365.500.000	2.313.870.979	6.343.167.900	6.192.245.797	7.315.158.800	7.183.742.282	11.988.477.828	11.856.410.241
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.289.300	303.383.798	297.817.500	273.433.422	274.200.000	259.913.725	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	307.399.700	297.931.474	488.261.900	463.722.397	109.305.000	108.135.753	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.000.000	5.995.000	-	-	10.000.000	9.768.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	10.000.000	16.000.000	15.506.330	17.500.000	17.097.000	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	8.000.000	7.767.000	70.000.000	66.144.290	64.495.000	61.462.120	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	4.181.079.000	4.117.278.510	5.608.314.300	5.515.819.362	-	-
7	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1.290.009.500	1.256.160.848	1.198.144.500	1.179.108.622	-	-
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	33.200.000	32.437.700	304.452.160	298.602.945
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	7.106.068.064	7.044.416.209
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	305.646.260	304.032.947
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	4.144.851.344	4.084.914.340
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	127.460.000	124.443.800
XXX	KECAMATAN MANGKUBUMI	3.436.900.000	3.352.955.467	6.151.996.050	5.694.546.316	7.604.849.700	7.533.471.444	12.359.318.600	12.288.600.736
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307.217.500	298.313.738	315.696.000	303.458.506	207.611.100	203.176.371	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	896.581.500	858.191.810	280.898.750	265.094.495	152.000.000	144.887.160	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.250.000	11.088.400	17.500.000	17.300.500	17.500.000	17.392.250	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	4.500.000	4.460.600	61.065.000	59.615.187	47.480.000	47.390.500	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.628.366.800	3.264.035.442	5.960.034.450	5.928.020.457	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1.454.469.500	1.404.150.786	1.142.824.150	1.127.029.896	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	379.000.000	368.113.800	77.400.000	65.574.810	30.142.000	29.004.200
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	7.630.474.500	7.603.762.653
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	267.524.100	267.432.300
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	4.327.110.500	4.302.216.933
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	104.067.500	86.184.650
XXXI	KECAMATAN BUNGURSARI	3.389.450.000	2.249.895.717	5.316.980.685	5.135.746.043	6.563.199.220	6.368.266.754	12.295.042.112	12.232.368.762
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.374.500	296.079	307.015.300	288.951.851	309.694.400	291.183.373	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464.780.500	427.011.468	299.642.685	246.707.771	173.350.000	158.671.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	10.000.000	15.000.000	14.900.000	17.500.000	17.375.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	12.428.000	12.333	68.240.000	67.265.843	61.165.000	61.156.865	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.151.654.200	3.098.103.780	5.019.969.200	4.868.414.400	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1.146.183.500	1.106.937.998	926.586.620	917.174.116	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	315.405.000	299.223.400	54.934.000	54.292.000	190.201.500	189.477.900
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	7.810.893.670	7.780.869.484
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	273.701.140	273.041.050
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.934.609.802	3.904.191.728
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	85.636.000	84.788.600
XXXII	KECAMATAN PURBARATU	2.155.569.000	2.092.823.626	4.728.961.700	4.575.446.882	5.842.422.440	5.796.900.035	10.002.019.621	9.929.519.834
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.910.000	331.004.355	327.500.000	307.068.037	263.036.100	255.604.002	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463.949.000	442.065.684	227.135.000	203.259.900	145.230.300	143.273.028	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.250.000	11.249.000	15.500.000	14.787.500	17.500.000	17.449.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	4.500.000	4.302.000	60.000.000	57.801.250	51.662.500	51.346.500	-	-
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-	4.602.718.540	4.581.686.228	-	-
6	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	932.250.500	907.387.150	730.035.000	715.413.777	-	-
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-	254.953.500	246.623.040	32.240.000	32.127.500	8.260.000	8.226.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	6.240.652.400	6.216.002.540
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	242.599.361	239.024.000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.397.547.860	3.354.056.894
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	112.960.000	112.210.400
XXXIII	INSPEKTORAT	3.289.450.000	3.065.194.243	2.786.331.040	2.481.537.523	3.320.288.732	3.138.546.776		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	890.064.300	808.621.949	976.110.440	914.290.218	819.247.500	754.580.942	-	-
2	Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	679.912.200	644.660.959	535.150.950	488.202.450	460.256.000	401.617.990	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.719.400	11.835.250	23.287.000	15.412.500	2.000.000	2.000.000	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	28.049.500	23.923.260	33.675.500	31.504.000	32.113.284	28.113.284	-	-
5	Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.076.298.600	1.008.298.292	1.037.344.150	881.490.041	2.006.171.948	1.951.734.560	-	-
6	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000	3.410.000	500.000	500.000	-	-
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	10.121.294.260	10.027.733.030
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	1.116.442.200	1.090.387.241
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-	-	-	-	-	-	725.131.100	720.128.600
XXXIV	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.366.267.000	6.682.099.328	6.398.805.560	5.713.416.529	3.655.610.700	3.363.073.646	11.528.657.994	11.292.026.135
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.518.161.000	1.370.669.201	1.403.150.000	1.314.188.516	1.008.817.000	906.513.443	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	942.844.000	915.916.720	553.797.835	520.145.135	810.128.000	761.115.500	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	21.295.800	20.000.000	19.238.000	14.900.000	13.691.500	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	19.000.000	18.640.990	5.000.000	4.970.020	2.350.000	2.350.000	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.199.892.000	2.842.406.903	2.251.766.025	1.899.564.941	1.247.786.400	1.130.402.472	-	-
6	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	656.901.700	616.152.041	299.408.100	291.041.360	-	-
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	1.382.730.000	1.256.961.876	269.721.200	255.459.371	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000	4.285.000	2.500.000	2.500.000	-	-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	9.418.837.404	9.263.909.233
10	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	779.391.370	733.638.263
11	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	552.134.160	544.155.349
12	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	778.295.060	750.323.290
XXXV	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.586.093.300	8.865.191.411	9.166.107.381	8.562.317.739	7.460.014.626	7.005.400.880	44.114.738.320	42.077.406.141
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000	9.346.280	40.000.000	39.773.650	-	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.214.844.000	1.486.611.816	1.876.030.460	1.775.179.281	1.445.701.300	1.399.858.254	-	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.580.530.000	2.110.988.845	1.609.847.000	1.285.425.514	1.250.590.000	1.107.342.947	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.000.000	61.155.800	65.000.000	63.494.730	20.000.000	19.712.950	-	-
5	Program Perencanaan Kerja	20.000.000	19.196.400	30.000.000	29.738.200	110.000.000	104.744.853	-	-
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.169.293.300	4.725.506.739	4.123.180.800	4.035.064.685	3.005.635.500	2.926.282.187	-	-
7	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	1.407.049.121	1.327.890.049	1.588.087.826	1.407.686.039	-	-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	12.407.317.920	11.196.711.467
9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	29.434.551.750	28.697.240.642
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	2.272.868.650	2.183.454.032
XXXVI	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.339.289.000	9.868.037.667	8.475.819.200	8.137.711.910	8.919.901.800	8.437.306.448	22.822.301.804	21.984.863.638
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.506.774.600	2.234.714.319	1.975.880.000	1.916.804.647	2.211.520.000	2.125.518.057	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.155.304.000	1.048.851.486	558.800.000	557.758.137	949.900.000	873.592.234	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	199.950.000	250.000.000	249.983.000	207.140.000	205.516.758	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.310.000	9.201.040	21.800.000	21.730.450	77.000.000	76.265.800	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Perencanaan Kerja	-	-	-	-	24.270.000	24.191.000	-	-
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	549.700.000	547.849.624	356.168.500	355.341.120	457.440.000	456.376.425	-	-
7	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.661.575.400	5.574.494.198	3.017.147.540	2.769.619.056	2.952.926.500	2.837.356.423	-	-
8	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	11.200.000	11.200.000	2.178.523.160	2.149.877.100	2.034.705.300	1.833.489.801	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Publik	225.000.000	221.352.000	109.500.000	108.600.000	5.000.000	4.999.950	-	-
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	17.620.169.360	17.148.257.743
11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	5.202.132.444	4.836.605.895
XXVII	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.297.929.716	9.716.376.053	13.978.772.500	13.678.710.579	8.742.069.003	8.243.758.506		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.507.173.216	2.462.146.221	4.452.272.400	4.394.930.851	2.517.542.000	2.447.344.265	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	534.007.000	458.771.848	366.098.000	342.377.300	963.578.003	947.354.850	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.988.000	22.500.000	21.495.000	24.000.000	23.659.600	-	-
4	Program Perencanaan Kerja	10.000.000	9.536.000	19.575.000	18.849.000	25.000.000	17.503.700	-	-



NO	PD/PROGRAM	2018		2019		2020		2021	
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5	Program Pelatihan dan Pelatihan Aparatur	-	-	6.299.335.000	6.272.254.856	2.310.259.000	2.291.846.473	-	-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6.353.249.500	5.997.266.464	2.813.992.100	2.623.817.572	2.896.690.000	2.511.049.618	-	-
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	7.000.000	7.000.000	5.000.000	4.986.000	5.000.000	5.000.000	-	-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	9.880.967.480	9.826.580.562
9	Program Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	2.875.019.150	2.814.606.400
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	2.516.400.000	2.515.030.890
JUMLAH		1.047.335.698.520	965.427.876.264	1.135.707.906.595	1.002.036.892.920	970.921.215.884	907.301.990.992	2.078.366.717.903	2.009.280.702.202

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022



2.1.3. Capaian Janji Politik

1. Pencetakan 5.000 wirausaha baru

Program Wirausaha Baru (WUB) adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan target di RKPD tahun 2020 sebanyak 1.000 wirausaha baru. Program WUB bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitas pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha.

Program WUB dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah dengan target 1000 orang, Namun pada tahun 2020 dikarenakan ada refocusing anggaran target WUB diubah menjadi 105 orang pada RPJMD Perubahan dan 205 orang pada RKPD Perubahan Tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 Program WUB dilaksanakan dengan target 1.523 Orang.

Berikut ini perkembangan Program Pencetakan WUB yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:

a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 dengan 2 kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Tata Rias, Digital Marketing, Menjahit, dan Jas Service HP. Realisasi anggaran sebesar Rp.478.091.250,0 atau 98,07%. Realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang.
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Makanan Olahan, Alas Kaki, dan Konveksi. Realisasi anggaran sebesar Rp.476.775.000,00 atau 97,80% dan realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang



b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dan Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 300 orang yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu :
 - a) Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 337.500.000,- dengan target 225 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.321.390.350,- atau 96,23% dan realisasi fisik 100%. Capaian target pencetakan wirausaha baru pada sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari target sebanyak 225 orang dapat terealisasi sebanyak 225 orang atau tercapai 100%;
 - b) Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Peternakan dengan pagu anggaran Rp.112.500.000,- dengan target 75 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.105.507.000,- atau 93,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor peternakan dari target sebanyak 75 orang dapat terealisasi sebanyak 70 orang atau sebesar 93,33%, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya terdapat 5 orang peserta yang mengundurkan diri ketika program sedang berjalan sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti seluruh tahapan program sesuai dengan yang disyaratkan dan tidak berhak mendapatkan sertifikat peserta program wirausaha baru. Atas kekurangan pencapaian target tersebut akan ditambahkan pada target program wirausaha baru pada tahun 2022;
- 2) Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan pagu anggaran sebesar Rp 225.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 150 orang yang dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan. Realisasi anggaran



sebesar Rp. 207.285.850,- atau 92,13 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor perikanan dari target sebanyak 150 orang dapat terealisasi sebanyak 150 orang atau sebesar 100%.

c. Dinas Pendidikan.

Program WUB di Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru dengan target 100 orang dan alokasi dana sebesar Rp.139.320.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi Pelatihan , Tata Busana, Tata Kecantikan rambut. Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.320.000,00 realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 100 orang.

d. Dinas Tenaga Kerja

Program WUB di Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru, dengan target 163 WUB dan pagu anggaran sebesar Rp. 203.677.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi tata boga, tata busana, tata kecantikan dan tata rias. Realisasi anggaran sebesar Rp. 186.137.760 atau 91,38 % realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 163 orang.

e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program WUB di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan di Bidang Pariwisata melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan target 150 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 190.370.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan yaitu media digital 52 orang dan Barista 60 orang serta fashion 38 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 188.289.382,00 atau 98,91% realisasi kinerja 100%

Realisasi program WUB sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah mencapai 3.484 orang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.133.
Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah
Tahun 2018 – 2021

No	Perangkat Daerah	2018	2019	2020	2021	Total
1	Dinas Pendidikan	95	100	105	100	400
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87	100	0	163	350
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan	58	100	0	150	308
4	Dinas Pertanian dan Perikanan	189	300	0	445	934
5	Dinas KUMKM Perindag	328	354	60	750	1.492
Jumlah		757	954	165	1.608	3.484

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022

2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama periode RPJMD Tahun 2017 – 2022 ditargetkan sebanyak 1.000 unit per tahun. Sampai dengan tahun 2021, RTLH di wilayah Kota Tasikmalaya yang direhabilitasi sudah sebanyak 6.771 unit. Sebanyak 1.320 unit RTLH direhabilitasi pada Tahun 2021, capaian tersebut melebihi yang ditargetkan yaitu 1.000 unit. Sebaran lokasi rehabilitasi RTLH sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.134.
Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
1	Cihideung	Argasari			2		43
		Cilembang		15	1		
		Nagarawangi			2		
		Tugujaya	20		1		
		Tuguraja			2		
2	Cipedes	Cipedes	30		1		114
		Nagarasari	30		1		
		Panglayungan	20		1		
		Sukamanah	30		1		
3	Tawang	Cikalang	30		1		83
		Empangsari			2		
		Kahuripan	30		1		
		Lengkongsari		15	2		
		Tawangsari			2		
		Sukamaju Kidul			2		12



No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
5	Kawalu	Parakannyasag			2		314
		Indihiang			2		
		Panyingkiran			2		
		Sirnagalih			2		
		Sukamaju Kaler			2		
6	Cibeureum	Cibeuti			2		269
		Cilamajang			2		
		Gunung Gede	30		1		
		Gunung Tandala	30	40	1		
		Karanganyar	30		1		
		Karsamenak			2		
		Leuwiliang	30		1	50	
		Talagasari			2	10	
		Tanjung	30		1	10	
7	Tamansari	Urug	30		1	10	74
		Awipari	30		1		
		Ciakar	30		1		
		Ciherang	30		1		
		Kersanagara	30		1		
		Kotabaru	30		1		
		Margabakti	30		1		
		Setiajaya	30		1		
8	Mangkubumi	Setianegara	30		1		202
		Setiaratu	20		1		
		Mugarsari			2		
		Mulyasari	30		1		
		Setiamulya			2		
		Setiawargi			2		
		Sukahurip			2		
		Sumelap			2		
		Tamanjaya			2		
		Tamansari	30		1		
		Cigantang	30		1	10	
		Cipari	30		1	10	



No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
		Cipawitra	30		1	10	149
		Karikil			2		
		Linggajaya			2	10	
		Mangkubumi			2	10	
		Sambongjaya	30		1	10	
		Sambongpari			2	10	
9	Bungursari	Bantarsari	30		1		149
		Bungursari	20		1		
		Cibunigeulis			2		
		Sukajaya	30		1		
		Sukalaksana	30		1		
		Sukamulya			2		
		Sukarindik	30		1		
10	Purbaratu	Purbaratu	20		1		60
		Singkup			2		
		Sukaasih			2		
		Sukajaya			2		
		Sukamenak			2		
		Sukanagara	30		1		
JUMLAH		1000	70	100	150	1.320	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

3. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dan Perintisan Jalan Lingkar Selatan.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 3,85 km yang menghubungkan persimpangan Lanud Wiradinata - Jalan Mohamad Hatta, estimasi biaya saat ini memerlukan anggaran sebesar Rp. 401 Miliar.

Sampai dengan tahun 2021, pembangunan Jalan Lingkar Utara secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 33,43%, meliputi pembangunan Jembatan Fly Over, Jembatan Cikalang, Jembatan Dalem Suba, pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Sedangkan untuk Jembatan Ciloseh saat ini sedang tahap pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang bersumber dari APBN, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya untuk perintisan lingkar selatan baru pada tahap Feasibility Study (FS) dan Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar selatan pada tahun 2017. Belum ada tindak lanjut, karena saat ini pembangunan masih diprioritaskan untuk penyelesaian Jalan Lingkar Utara.



4. Pembangunan Pusdai /Tasikmalaya Islamic Center

Sampai dengan akhir tahun 2021, masih belum ada tindak lanjut terkait kendala status kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center masih belum terlaksana. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center telah disusun pada tahun 2017 kemudian dilanjutkan pembangunan pagar batas tanah dan pematangan lahan di tahun 2018. Pada saat pelaksanaan penyusunan DED dan pekerjaan tersebut, terkendala terkait surat izin dari Bupati Tasikmalaya.

5. Pembangunan Pusat Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan/ Industri Kreatif

Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif sudah terbangun di tahun 2021 yang berlokasi di Pusat Promosi dan pemasaran produk unggulan/ Industri Kreatif (PPIK). Untuk promosi produk unggulan, gedung ini memiliki fungsi sebagai pusat sarana informasi dan promosi produk unggulan Kota Tasikmalaya. Showroom ini menampilkan informasi mengenai proses pembuatan, display produk hasil pengembangan desain dan diversifikasi produk serta produk yang akan dipromosikan dari produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya. PPIK Kota Tasikmalaya secara umum berfungsi sebagai tempat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teknik produksi, pelatihan desain produk, serta fasilitasi pemasaran dengan adanya showroom.

6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat 13,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 12,97. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemik covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya sejak Maret 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengakibatkan kinerja perekonomian terkontraksi. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya namun terjadi hampir pada seluruh kabupaten/kota. Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2021 masih diatas target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 12,5 persen. Apabila dilihat dari kenaikan persentase angka kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,52 persen. Dengan demikian kenaikan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

7. Beasiswa Sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter Spesialis

Beasiswa dokter spesialis dilaksanakan di RSUD dr. Soekardjo sebanyak 1 orang, sedangkan program beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi baru



dilaksanakan pada tahap penyusunan regulasi, dan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Adapun untuk beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 untuk 90 orang masyarakat miskin.

8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana

Posyandu

Bantuan operasional posyandu yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp.818.400.000,00 untuk 5.456 kader posyandu se-Kota Tasikmalaya atau Rp.150.000,00 per Orang.

9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW

Pada tahun 2021 bantuan operasional/insentif RT dan RW yaitu untuk RT sebesar Rp.125.000,00/bulan dan untuk RW sebesar Rp.150.000,00/bulan.

10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan

Bantuan bidang keagamaan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

a. Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah

Pada tahun 2021 jumlah penerima insentif sebanyak 5.448 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00/orang dengan jumlah total anggaran Rp.3.268.000.000,00.

- b. Realisasi bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2021 sebesar Rp.17.085.000.000,00 untuk 124 lembaga

11. Revitalisasi Pasar Rakyat

Pada tahun 2021 pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun pasar rakyat Pancasila dengan anggaran Rp.15.932.281.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.041.669.616,00. Pembangunan yang telah dilaksanakan terdiri dari 2 lantai dengan 270 kios, 64 los, ruang laktasi dan ruang pelengkap lainnya. Sehingga sejak tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5 pasar yaitu Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Cibeureum, Pasar Purbaratu dan Pasar Pancasila.

12. Implementasi e-government

Implementasi e-government di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian indeks SPBE Kota Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah 2,68 dengan predikat baik, yang meliputi:

Kebijakan internal SPBE, yaitu diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.



Tata kelola SPBE, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE dalam dokumen masterplan dan enterprise arsitektur smart city; tersedianya pusat data dan jaringan intra pemerintah yang terhubung ke seluruh OPD dan kelurahan, Puskesmas dan Pustu, SD dan SMP, serta area publik dengan jumlah total 414 titik; dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi aplikasi.

Penerapan manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, asset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE.

Layanan SPBE, yang terdiri dari:

- a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi.
- b. Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 dinyatakan bahwa : (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pemberian sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pemberian sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan.

Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pemberian dan pengeluaran pemberian. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pemberian. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan dan isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah.

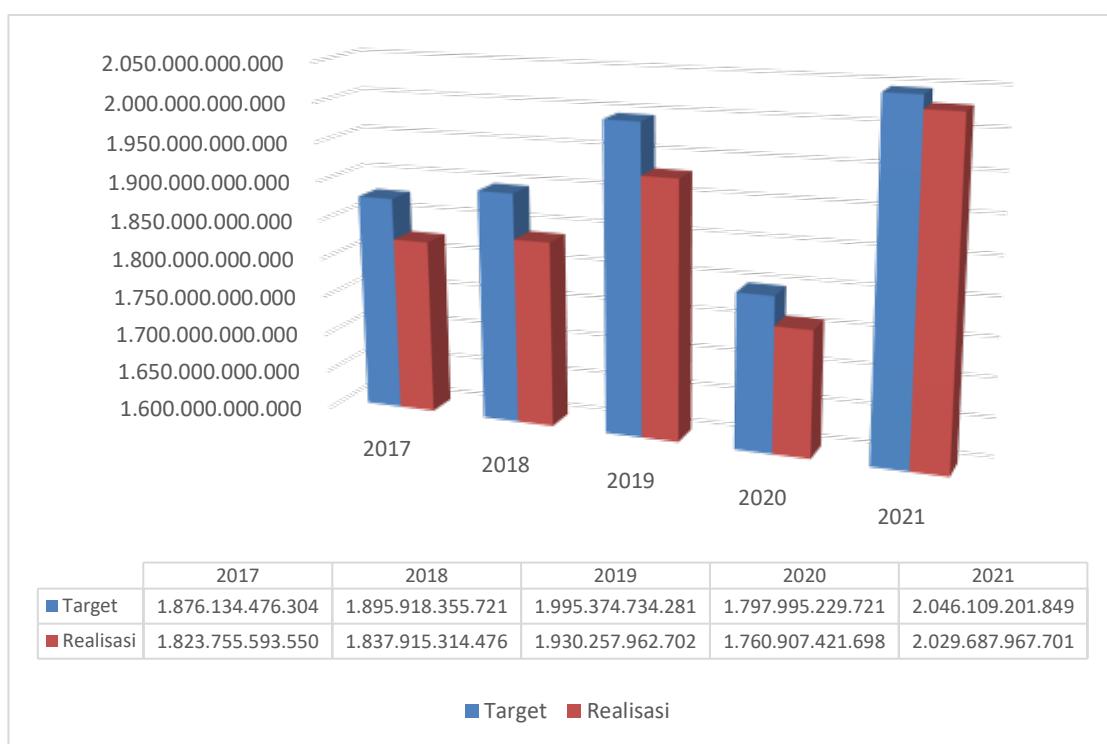
Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari:



1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yaitu sebesar 1,823 trilyun rupiah meningkat menjadi 2,029 triliun rupiah pada tahun 2021 atau secara keseluruhan meningkat sebesar 11,29 %. Selengkapnya rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

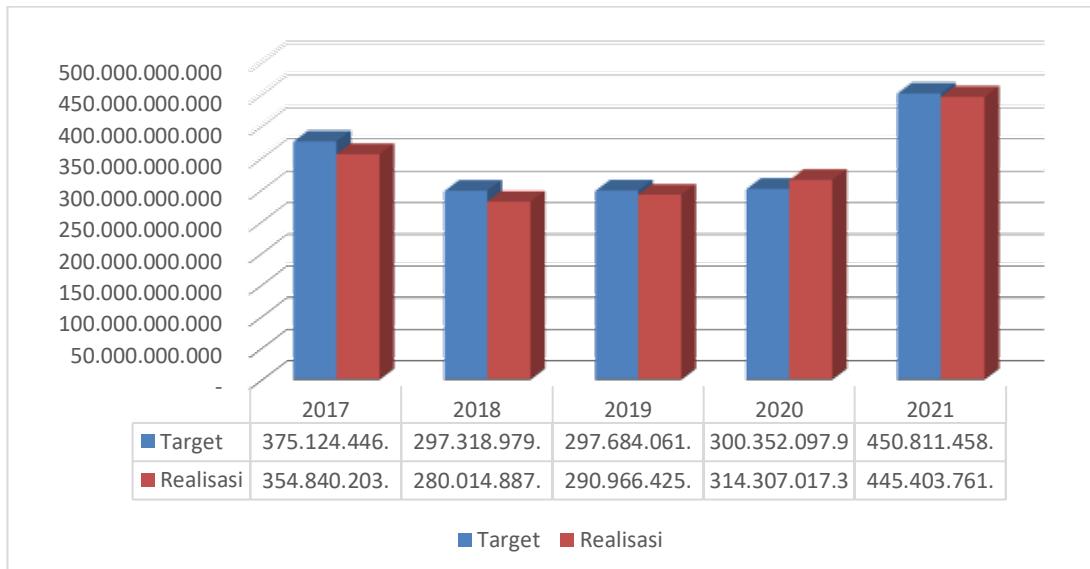


Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari target sebesar Rp.375,124 miliar, dengan realisasinya sebesar Rp.354,840 miliar (94,59%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dari target sebesar Rp.450,811 miliar, realisasinya sebesar Rp.445,403 miliar (98,80%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

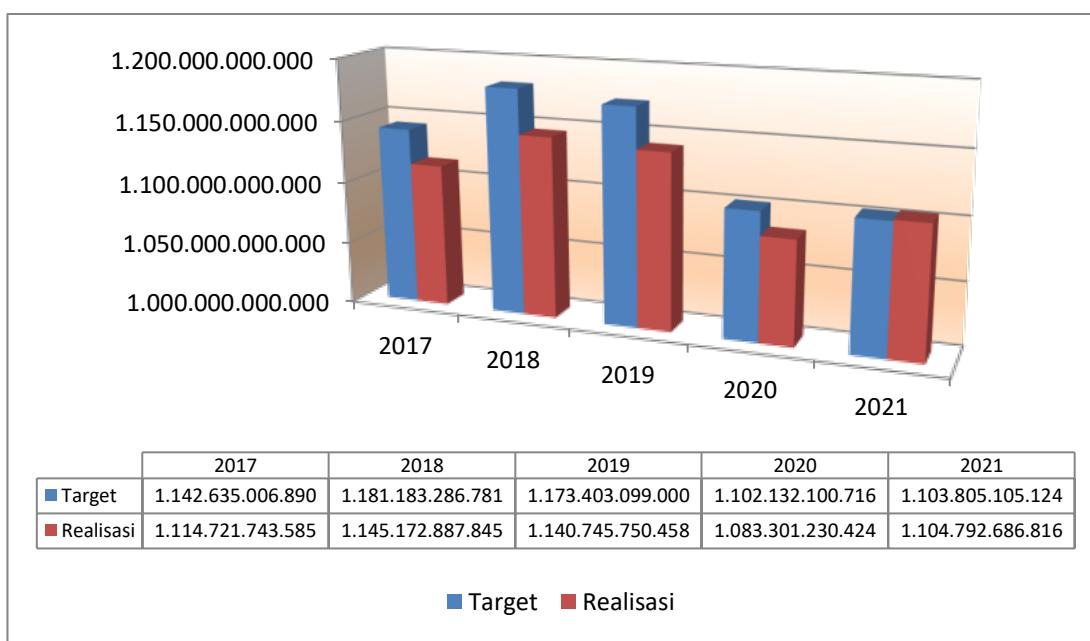


Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2017-2021, target tahun 2017 sebesar Rp.1,142 triliun realisasinya Rp.1,114 triliun (97,56%); dan tahun 2021 dari target sebesar Rp.1,103 triliun rupiah realisasinya Rp.1,104 triliun (100,09%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

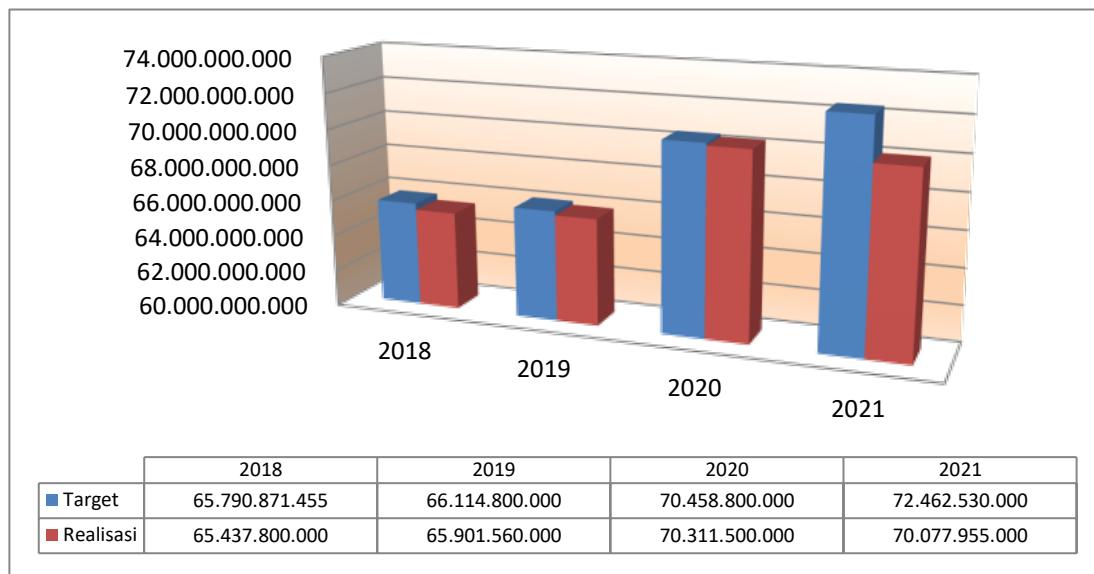
Pada tahun 2018, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp.65,790 miliar realisasinya Rp.65,437 miliar (99,46%), tahun 2019 di targetkan Rp.66,114 miliar realisasinya Rp.65,901 miliar (99,68%), tahun 2020 ditargetkan Rp.70,458 miliar realisasinya Rp.70,311 miliar (99,79%),



tahun 2021 ditargetkan Rp.72,462 miliar realisasinya Rp.70,077 miliar (96,71%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.4.

Grafik 3.4.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

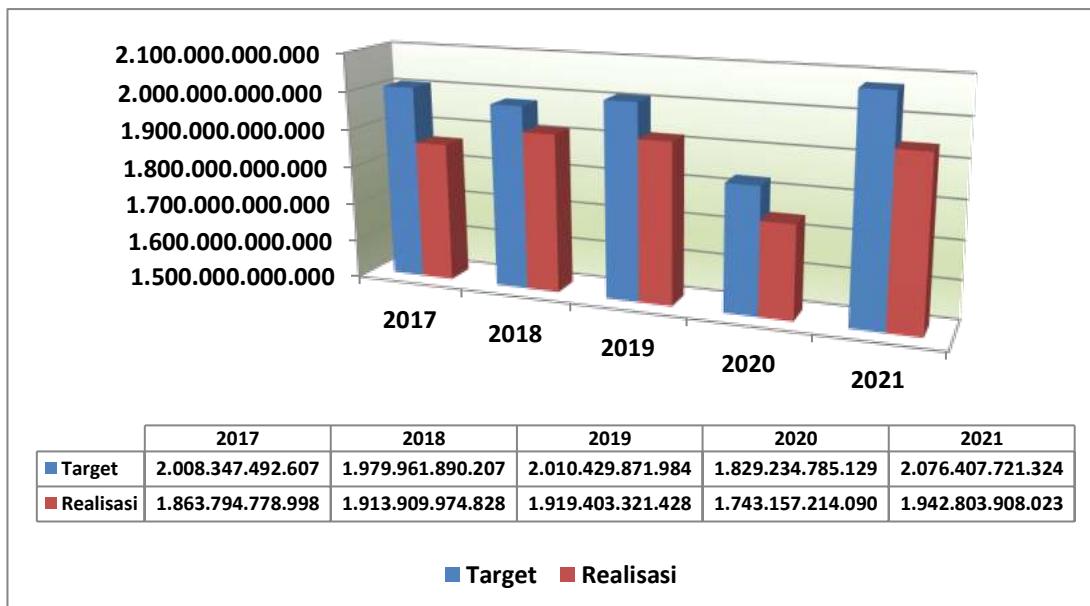
3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2017-2021, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 9,383 triliun dari rencana sebesar Rp. 9,904 triliun (94,74%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021

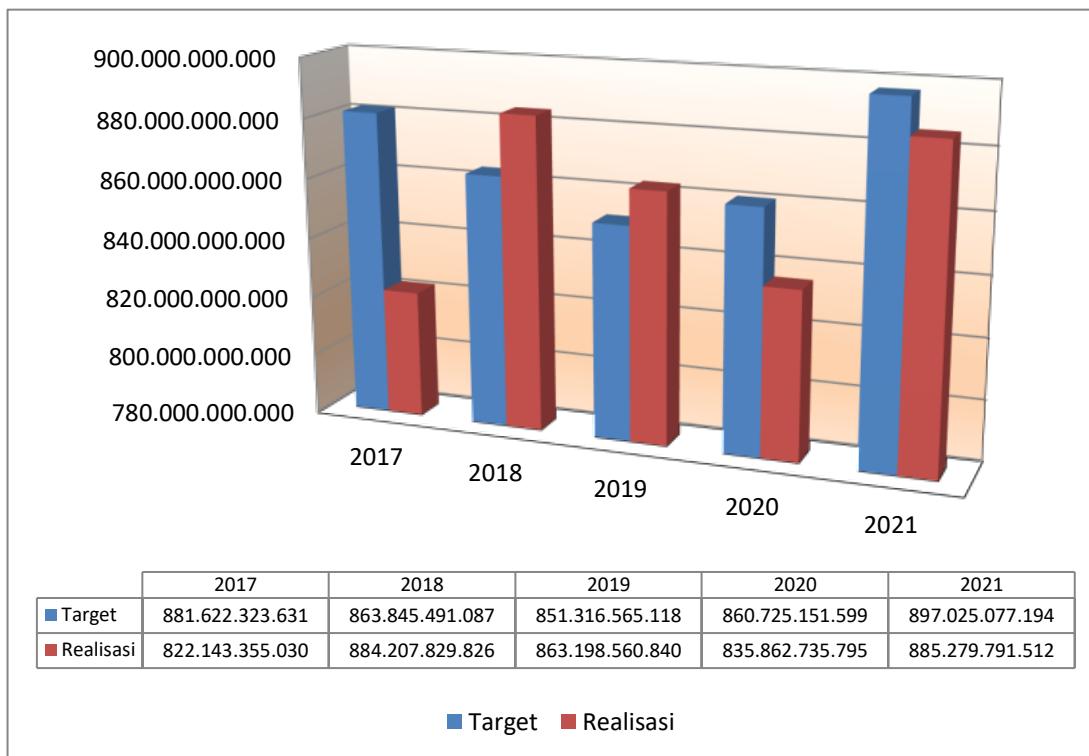


Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2017-2021 sebesar Rp. 4,290 triliun dari rencana sebesar Rp. 4,354 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik 3.6.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

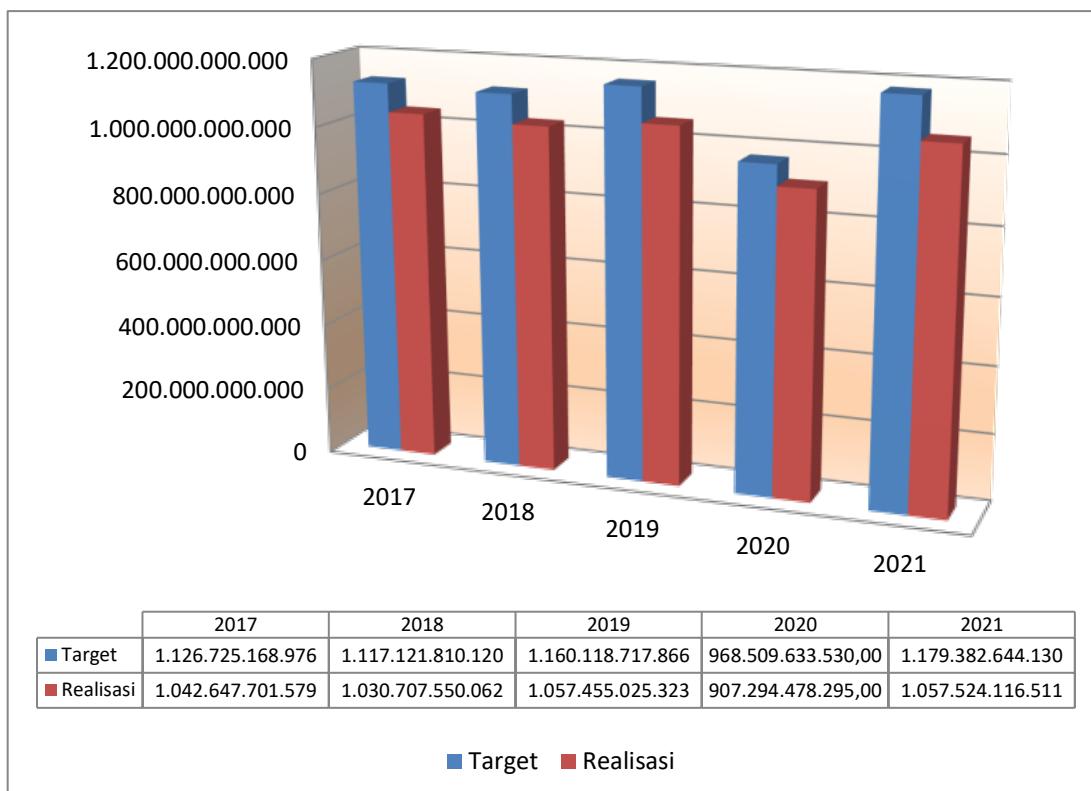


2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2017-2021 sebesar Rp. 5,095 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik 3.7.

Grafik 3.7.

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Tasikmalaya

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.823.753.712.196	1.837.915.314.476	1.930.257.962.702	1.760.907.421.698	2.029.687.967.700
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.864.791.056.609	1.913.909.974.828	1.919.403.321.428	1.743.157.214.090	1.942.803.908.023
3	Transfer	1.005.405.000	1.005.405.060	1.005.401.000,00		
	Defisit/Surplus Riil	(41.044.590.447,60)	(77.000.065.411,91)	9.849.240.274,47	17.750.207.608,25	86.884.059.677,92

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

3.1.1.4. Rata-rata Pertumbuhan APBD

Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan grafik perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:



Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	PENDAPATAN	1.823.755.593.550,40	1.837.915.314.476,09	1.930.257.962.702,47	1.760.907.421.698,25	2.029.687.967.700,92	3,07 %
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	354.840.203.843,40	280.014.887.927,09	290.966.425.997,47	314.307.017.302,25	445.403.761.863,92	8,14 %
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	107.452.892.030,00	120.013.770.765,00	143.552.632.283,00	122.595.847.691,00	139.830.453.627,00	7,69 %
1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.004.394.854,46	11.665.110.328,00	11.153.194.801,00	10.008.826.528,00	9.302.738.040,00	-6,13 %
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.573.086.951,00	5.418.000.000,00	5.921.762.644,00	6.458.363.839,00	6.221.179.774,00	2,9* %
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.809.830.007,94	142.918.006.834,09	130.338.836.269,47	175.243.979.244,25	290.049.390.422,92	13,34 %
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.468.915.389.707,00	1.492.462.626.549,00	1.573.389.976.705,00	1.376.288.904.396,00	1.514.206.250.837,00	1,13 %
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.159.420.562.585,00	1.145.172.887.845,00	1.162.971.853.458,00	1.091.272.112.424,00	1.123.833.404.816,00	-0,71 %
2.2	Dana Perimbangan	1.114.721.743.585,00	1.145.172.887.845,00	1.140.745.750.458,00	1.083.301.230.424,00	1.104.792.686.816,00	-0,18 %
	<i>Dana Transfer Umum</i>	<i>855.669.608.911,00</i>	<i>845.240.117.969,00</i>	<i>883.495.134.029,00</i>	<i>843.976.429.187,00</i>	<i>847.402.128.072,00</i>	<i>-0,19 %</i>
	<i>1. Dana Bag Hasil</i>	<i>75.596.163.911,00</i>	<i>65.166.672.969,00</i>	<i>54.063.700.029,00</i>	<i>90.659.677.187,00</i>	<i>105.304.188.072,00</i>	<i>13,25 %</i>
	<i>2. Dana Alokasi Umum</i>	<i>780.073.445.000,00</i>	<i>780.073.445.000,00</i>	<i>829.431.434.000,00</i>	<i>753.316.752.000,00</i>	<i>742.097.940.000,00</i>	<i>-1,08 %</i>
	<i>Dana Transfer Khusus</i>	<i>259.052.134.674,00</i>	<i>299.932.769.876,00</i>	<i>257.250.616.429,00</i>	<i>239.324.801.237,00</i>	<i>257.390.558.744,00</i>	<i>0,53 %</i>
	<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>44.698.819.000,00</i>	-	<i>22.226.103.000,00</i>		<i>19.040.718.000,00</i>	
2.3	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>				7.970.882.000,00		
	<i>Dana Penyesuaian</i>	-	-	-	7.970.882.000,00		-
3.4	Transfer Antar Daerah	309.494.827.122,00	347.289.738.704,00	410.418.123.247,00	285.016.791.972,00	390.372.846.021,00	9,19 %

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
B	Pendapatan Bagi Hasil	98.981.716.444,00	107.954.217.239,00	115.983.579.026,00	107.126.150.296,00	109.356.089.659,00	2,74 %
1	Bantuan Keuangan	210.513.110.678,00	239.335.521.465,00	294.434.544.221,00	177.890.641.676,00	281.016.756.362,00	13,77 %
1.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	65.437.800.000,00	65.901.560.000,00	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00	2,36 %
1.2	Pendapatan Hibah	-	65.437.800.000,00	65.901.560.000,00	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00	2,36 %
1.3	Dana darurat	-	-	-			
1.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-			
1.6	BELANJA DAERAH	1.864.800.183.998,00	1.914.915.379.888,00	1.920.408.722.428,00	1.743.157.214.090,00	1.942.803.908.023,00	1,29 %
2	BELANJA OPERASI	1.439.043.565.016,00	1.540.319.320.830,00	1.474.908.780.283,00	1.372.725.283.236,00	1.544.299.528.302,00	2,09 %
2.1	Belanja Pegawai	819.612.484.380,00	806.445.197.344,00	800.475.508.832,00	755.420.130.459,00	781.454.927.968,00	-1,13 %
2.2	Belanja Barang dan Jasa	546.525.701.966,00	636.559.897.304,00	608.851.914.843,00	579.136.136.658,00	683.637.096.308,00	6,32 %
2.3	Belanja Bunga	1.517.869.330,00	1.255.205.122,00	999.564.108,00	435.748.720,00	443.405.362,00	-23,08 %
	Belanja Subsidi	-	30.520.000,00	62.240.000,00	25.552.600,00	41.906.200,00	36,33 %
C	Belanja Hibah	67.789.559.340,00	80.672.851.060,00	61.681.013.500,00	35.005.833.200,00	75.572.192.464,00	17,02 %
1	Belanja Bantuan Sosial	3.597.950.000,00	15.355.650.000,00	2.838.539.000,00	2.701.881.599,00	3.150.000.000,00	64,26 %
1.1	BELANJA MODAL	425.367.687.732,00	374.596.059.058,00	445.499.942.145,00	321.922.174.799,00	373.887.020.203,00	-1,15 %
1.2	Belanja Tanah	4.142.796.054,00	4.941.486.325,00	2.296.713.172,00	768.153.000,00	2.505.755.160,00	31,35
1.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.933.014.590,00	71.873.847.318,00	67.330.515.560,00	44.266.893.889,00	80.891.195.217,00	0,28
1.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.561.943.669,00	74.180.581.001,00	94.900.612.328,00	108.042.766.208,00	67.619.037.887,00	-2,48
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.940.310.705,00	207.040.716.863,00	272.080.679.260,00	158.063.079.655,00	221.987.373.959,00	9,31



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.789.622.714,00	16.559.427.551,00	8.891.421.825,00	3.585.696.548,00	883.657.980,00	-49,41
	Belanja Modal BLUD				7.195.585.499,00		
2.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	388.931.250,00	-	-	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	
2.3	Belanja Tidak Terduga	388.931.250,00	-	-	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	
2.4	BELANJA TRANSFER				1.242.312.530,00		
E	SURPLUS/DEFISIT	(41.044.590.447,60)	(77.000.065.411,91)	9.849.240.274,47	17.750.207.608,25	86.884.059.677,92	111,13 %
		(2,25)	(4,19)	0,51			
	PEMBIAYAAN DAERAH	143.993.535.934,27	93.322.653.358,67	25.542.009.873,76	14.048.311.867,23	32.530.576.485,48	-29,40%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	146.457.535.934,27	107.728.014.703,67	79.534.816.943,76	77.418.838.521,23	76.516.452.975,48	-19,74%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	136.457.535.934,27	102.948.945.486,67	16.369.648.304,76	35.397.875.408,23	31.798.519.475,48	-35,79%
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-			-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-			-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	4.779.069.217,00	63.165.168.639,00	42.020.963.113,00	42.485.876.490,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-		2.232.057.010,00	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-			-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-			-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.464.000.000,00	14.405.361.345,00	53.992.807.070,00	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	186,56 %
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.600.000.000,00	6.066.002.245,00	53.992.807.070,00	61870526654	42.485.876.490,00	263,12 %
	Penyertaan Modal Daerah	864.000.000,00	8.339.359.100,00	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	178,24%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-			
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-			0,00%
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-			0,00%
							0,00%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	102.948.945.486,67	16.322.587.946,76	35.391.250.148,23	31.798.519.475,48	119.414.636.163,40	74,52 %

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2021.



3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah Kota Tasikmalaya tersaji pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3.
Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya
Per 31 Desember Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	ASET					
1	ASET LANCAR	194.976.511.317	170.490.574.729,55	103.292.895.888,70	126.168.549.573,97	115.151.099.781,71
1.1	Kas	137.298.826.085	103.015.979.899,67	16.356.675.978,76	35.450.316.597,23	31.905.163.882,48
1.2	Piutang	42.225.753.347	53.058.036.847,28	69.559.094.288,25	67.222.578.401,66	61.516.406.446,20
1.3	Persediaan	14.658.051.815	13.404.560.563,71	16.138.430.549,46	22.293.671.551,32	20.693.441.001,34
1.4	Biaya Dibayar di Muka	793.880.070	1.011.997.418,89	1.238.695.072,23	1.201.983.023,75	1.036.088.451,69
2	ASET TETAP	2.551.123.718.092	2.855.436.790.807,12	3.034.491.416.631,37	3.338.629.078.489,96	3.481.406.094.763,24
2.1	Tanah	1.188.428.324.791	1.184.539.826.520,24	1.196.505.756.920,04	1.298.656.796.240,04	1.341.958.168.584,08
2.2	Peralatan dan mesin	539.374.126.350	656.419.871.114,10	710.129.106.100,64	787.922.862.826,78	841.677.741.588,95
2.3	Gedung dan bangunan	686.200.633.542	662.799.358.878,95	712.316.949.169,78	909.320.854.334,39	947.887.562.312,46
2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.762.548.337.418	1.946.732.860.393,59	2.158.395.783.179,77	2.397.613.479.827,87	2.563.472.132.784,26
2.5	Aset tetap lainnya	89.775.513.415	74.468.173.529,67	99.397.437.197,11	33.313.822.101,30	33.271.712.813,11
2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	13.312.330.036	52.130.037.969,82	72.455.600.412,28	125.993.282.216,81	177.907.027.909,01
2.7	Akumulasi Penyusutan	(1.728.515.547.461)	(1.721.653.337.599,25)	(1.914.709.216.348,25)	(2.214.192.019.057,22)	(2.424.768.251.228,62)
3	ASET LAINNYA	45.171.227.356	37.986.826.691,02	45.539.567.800,32	45.535.479.685,73	47.365.278.940,74
3.1	Tagihan penjualan angsuran					
3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-				
3.3	Kemitraan dengan pihak	-				



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	kedua					
3.4	Aset tak berwujud	8.739.915,988	32.931.612,612,34	35.460.515,379,74	43.649.706,582,74	50.572.847,889,00
3.5	Tuntutan Perbendaharaan	-				
3.6	Aset Lain-Lain	36.104.005,768	33.297.441,684,28	64.815.925.030,32	58.309.794.342,72	54.404.528.239,38
3.7	Tagihan Jangka Panjang	327.305,600	320.099.000,00	3.125.000,00	12.850.000,00	5.850.000,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(28.562.326.605,60)	(27.396.287.081,20)	(37.181.916.622,00)	(40.835.961.667,60)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			(27.343.710.528,54)	(19.254.954.617,73)	(16.781.985.520,04)
4	INVESTASI JANGKA PANJANG	69.705.223,094	63.306.204.550,76	68.619.706.808,01	33.824.680.717,01	35.018.872.808,03
4.1	Dana Bergulir	6.590.963,990	13.394.925.000,00	13.394.925.000,00	13.394.925.000,00	13.394.925.000,00
4.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.114.259,104	60.344.129.906,40	65.886.291.861,95	31.081.001.152,56	32.265.104.011,82
	(Dana Bergulir Diragukan Tertagih)		(10.432.850.355,64)	(10.661.510.053,94)	(10.651.245.435,55)	(10.641.156.203,79)
5	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
5	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET DAERAH	2.860.976.679,859	3.127.220.396.778,45	3.251.943.587.128,4	3.544.157.788.466,66	3.678.941.346.293,71
B	KEWAJIBAN	41.610.333.349	81.767.461.166,80	102.479.679.047,58	132.229.865.556,08	81.576.043.736,00
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41.610.333.349	81.767.461.166,80	102.479.679.047,58	132.229.865.556,08	81.576.043.736,00
1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	232.210.111	61.818.707,00	-	50.429.168,00	106.482.087,00
1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Pendapatan diterima dimuka	943.992.629	1.111.204.624,67	1.451.786.392,58	1.715.622.761,08	0,00
1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.303.736.720	28.619.694.561,00	41.614.638.370,00	63.353.552.325,00	1.669.539.905,00
1.5	Utang Belanja	-				64.616.884.629,00
1.6	Utang Beban	34.130.393.889	51.974.743.274,13	59.413.254.285,00	67.070.958.266,00	15.183.137.115,00
C	EKUITAS DANA	2.840.644.681.011	3.045.452.935.611,65	3.149.463.908.080,82	3.411.927.922.910,58	3.597.365.302.557,71
1	EKUITAS DANA LANCAR					
1	SILPA	-	-	-	-	-
2	Cadangan piutang	-	-	-	-	-
3	Cadangan persediaan	-	-	-	-	-
4	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	-	-	-
1	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-	-
2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-	-
3	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.882.255.014.360	3.127.220.396.778,45	3.251.943.587.128,40	3.544.157.788.466,66	3.678.941.346.293,71

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020.



Dari tabel 3.3, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2016-2020 sebesar 6,52% yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan di aset tetap dan aset lainnya.

Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya -9,64%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata peningkatannya mencapai 8,12%. Aset lainnya berupa tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan dan aset lain-lain rata-rata pertumbuhannya mencapai 2,00%. Kemudian Investasi jangka panjang berupa dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata turun sebesar -11,99%.

Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan ($\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$) atau ($\text{aktiva} = \text{pasiva}$). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014-2018 sebesar 6,32%.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 28,14% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi mencapai 6,10 %.

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap

total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya.

Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua.

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi dua.

Tabel 3.4.
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio likuiditas					
	▪ Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	4,69	2,09	1,01	0,95	1,41
	▪ Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	4,33	1,92	0,85	0,79	1,16
2	Rasio solvabilitas					
	▪ Rasio total hutang terhadap total aset	0,01	0,03	0,03	0,04	0,02
	▪ Rasio hutang terhadap modal	0,01	0,03	0,03	0,04	0,02
3	Rasio aktivitas					
	▪ Rata-rata umur piutang	12,01	11,66	12,18	16,86	
	▪ Rata-rata umur persediaan	20,36	16,00	15,29	86,58	

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2020.



Dari tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi, dari 23,26 pada tahun 2014 menjadi 8,41 pada tahun 2015, turun menjadi 2,09 pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 1,01 pada tahun 2018 dan menjadi 0,95 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 0,95 artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.0,95. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar, yang secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Sedangkan rasio solvabilitas terutama untuk rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar maksimal pada 0,01. Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 sebesar 0,00 artinya sebesar Rp0,00 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Tasikmalaya yang didanai oleh hutang sebesar 0,00%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Untuk rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019, rasio hutang terhadap modal sebesar 0,04 menunjukkan bahwa Rp0,04 dari setiap Rp1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri).

Adapun rasio aktivitas menunjukan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup singkat, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 10,15 dan 7,77 hari pada tahun 2014 dan 2015, kemudian 12,01 dan 11,66 hari pada tahun 2016 dan 2017, 12,18 hari pada tahun 2018 serta 16,86 hari pada tahun 2019.

Berdasar tabel 3.4 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 15,34 hari pada tahun 2014; 14,36 hari pada tahun 2015; meningkat menjadi 20,36 hari pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, sebesar 16,00 hari, 15,29 hari pada tahun 2018 dan 86,58 hari. Data tersebut bermakna bahwa dana tertanam dalam bentuk persediaan bertahan sekitar tiga bulanan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah, mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan

dari pusat maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan



Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
 - 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :
 - 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efisien, efektif, proporsional, fokus, transfaran dan akuntabel, terutama belanja daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dana kelurahan;
2. Alokasi belanja untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, diantaranya seperti biaya listrik, tenaga pengamanan dan kebersihan kantor, dll;
3. Alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD melalui pendekatan *Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*;
5. Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
6. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi.
8. Alokasi belanja untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada



tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

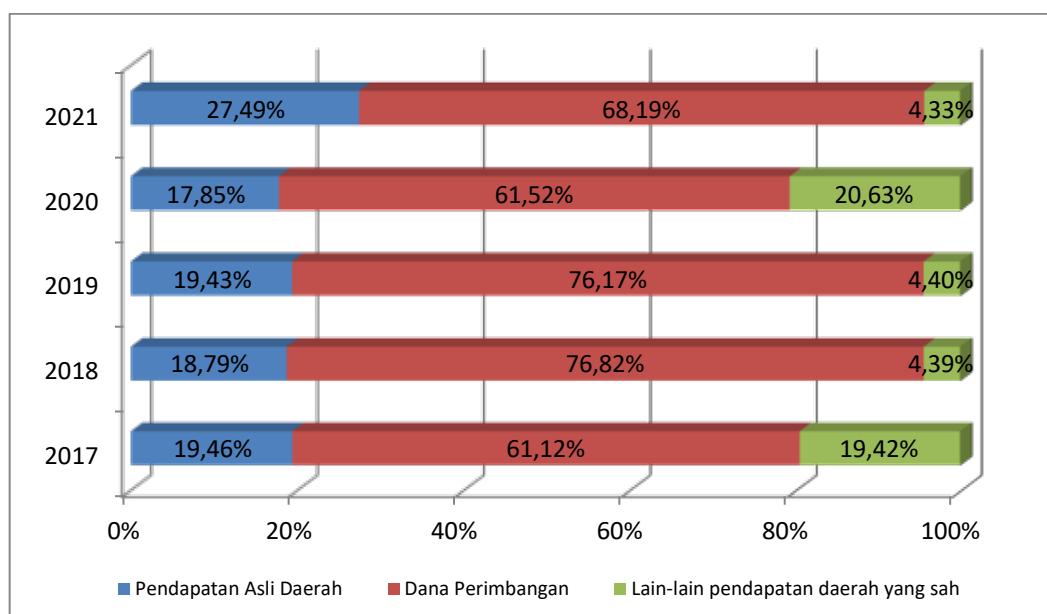
1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh RSUD dr. Soekardjo.

3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik 3.8.

Grafik 3.8.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021



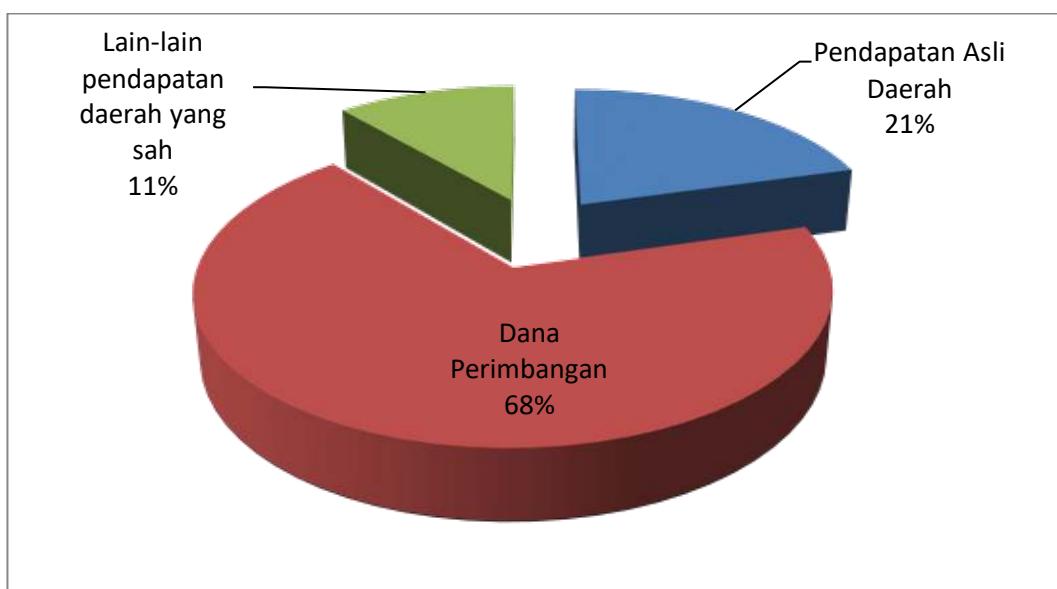
Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017-2021, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 20,57%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,52%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 68,21%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari

pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9.

Grafik 3.9.

Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021



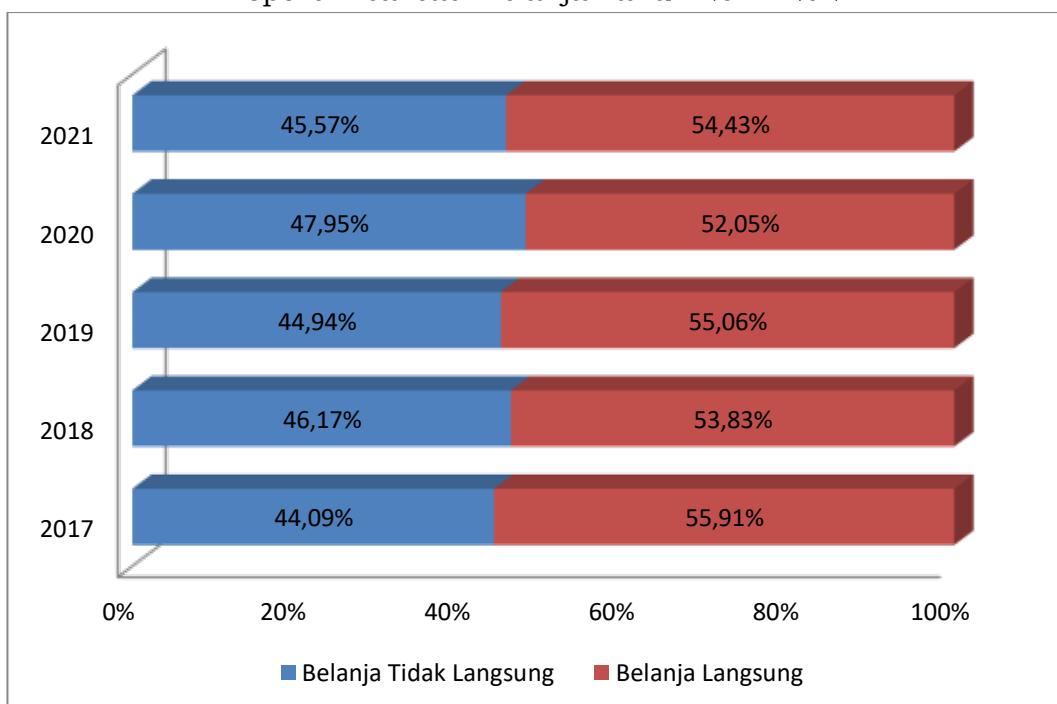
Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Walaupun proporsi belanja tidak langsung pada awalnya memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10.

Grafik 3.10.

Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021



Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

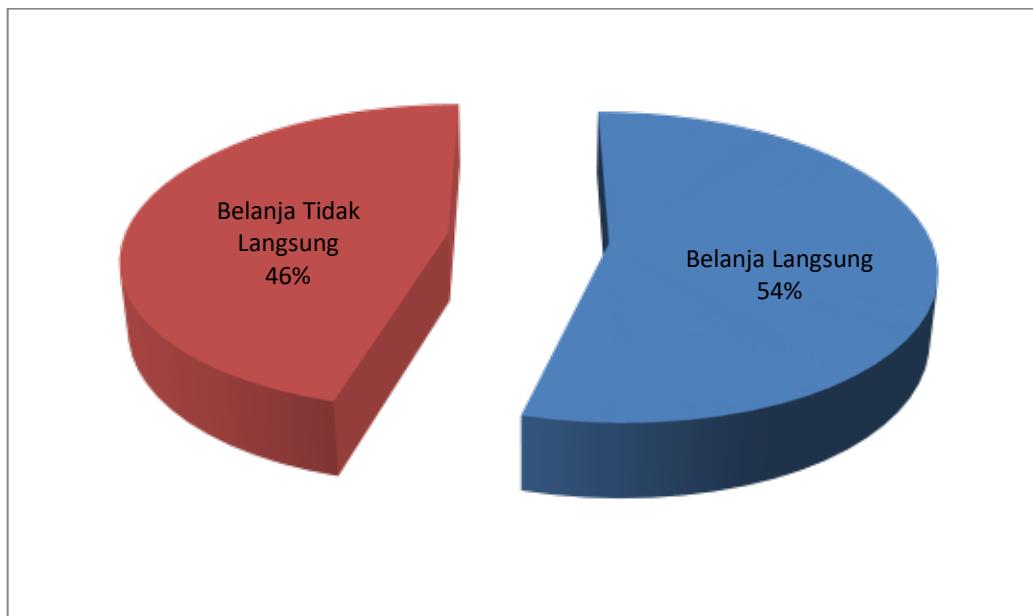
Tabel 3.5
Proporsi Belanja Aparatur/Pegawai Terhadap Total Belanja
Tahun 2017-2021

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	%
2017	835,302,464,726	1,777,140,998,720	47,00
2018	789.805.068.044	1.914.915.379.888	41,24
2019	800.475.508.832	1.919.403.321.428	41,70
2020	749.183.963.621	1.743.157.214.090	42,98
2021	781.454.927.968	1.942.803.908.023	40,22

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021.

Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017-2021, proporsi belanja tidak langsung sebesar 45,71%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja langsung sebesar 54,28%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara skematis proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11.

Grafik 3.11.
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021

3.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6
Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Surplus (Defisit)	(41.234.116.764)	(77.000.065.411)	9.849.240.274		86.884.059.677
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	146.077.016.303	107.728.014.703	79.534.816.943	77.418.838.521	76.516.452.975
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	136.077.016.303	102.948.945.486	16.322.587.946	35.397.875.408	31.798.519.475,48
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-		-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-		-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	10.000.000.000	4.779.069.217	63.165.168.639	42.020.963.113	42.485.876.490
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-		2.232.057.010
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-		-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.464.000.000	14.405.361.345	53.992.807.070	63.370.526.654	43.985.876.490
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-		-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	864.000.000	8.339.359.100	-	1.500.000.000	1.500.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.600.000.000	6.066.002.245	53.992.807.070	61.870.526.654	42.485.876.490
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-		-
3.2.5	Kegiatan lanjutan tahun lalu	-	-	-		-
3.2.6	Pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu	-	-	-		-
	Pembiayaan Neto	143.613.016.303	93.322.653.358	25.542.009.873	14.048.311.867	32.530.576.485
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	102.378.899.539	16.322.587.946	35.391.250.148	31.798.519.475	119.414.636.163

Ket : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020.

Berdasarkan tabel 3.6 pada tahun 2015, APBD Kota Tasikmalaya mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, yaitu sebesar Rp.70,397 miliar. Namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami defisit artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.159,403 miliar, Rp.41.234 miliar, dan Rp.77,000 Miliar, sedangkan pada Tahun 2019 kembali mengalami surplus sebesar Rp.9,849 Miliar.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah



semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Dari tabel 3.6. terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.136,077 miliar, Rp.102,378 miliar, Rp.16,323 miliar dan Rp.35,391 miliar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 4 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk kepentingan perencanaan diperlukan perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya. Seiring dengan adanya wabah Covid-19 pendapatan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dari tahun 2019, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja untuk tahun 2023-2026 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemic Covid 19, kondisi sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta asumsi lainnya.

Berdasarkan hasil forecasting menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 3.7.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2023-2026

No.		URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4		PENDAPATAN DAERAH				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	321.692.827.000	330.437.970.000	339.217.464.000	347.966.896.000
4	1 1	Pendapatan Pajak Daerah	156.708.275.000	165.147.186.000	173.586.097.000	182.025.009.000
4	1 2	Hasil Retribusi Daerah	17.338.892.000	17.645.124.000	17.985.707.000	18.296.227.000
4	1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.764.872.000	5.764.872.000	5.764.872.000	5.764.872.000
4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.880.788.000	141.880.788.000	141.880.788.000	141.880.788.000
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	1.472.456.611.000	1.509.609.295.000	1.547.345.060.000	1.585.681.855.000
4	2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.080.129.714.000	1.108.762.592.000	1.137.872.955.000	1.167.475.587.000
4	2 1 01	Dana Perimbangan	1.070.005.354.000	1.093.638.232.000	1.117.748.595.000	1.142.351.227.000
4	2 1 01 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.881.775.000	73.375.863.000	77.044.656.000	80.896.888.000
4	2 1 01 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	756.939.890.000	772.078.680.000	787.520.250.000	803.270.650.000
4	2 1 01 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.281.494.000	78.281.494.000	83.281.494.000	88.281.494.000
4	2 1 01 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.902.195.000	169.902.195.000	169.902.195.000	169.902.195.000
4	2 1 02	Dana Insentif Daerah	10.124.360.000	15.124.360.000	20.124.360.000	25.124.360.000
4	2 2	Transfer Antar Daerah	392.326.897.000	400.846.703.000	409.472.105.000	418.206.268.000
4	2 2 01	Pendapatan Bagi Hasil	117.326.897.000	120.846.703.000	124.472.105.000	128.206.268.000
4	2 2 01	Bantuan Keuangan	275.000.000.000	280.000.000.000	285.000.000.000	290.000.000.000
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.753.900.000	88.753.900.000	88.753.900.000	88.753.900.000
4	3 1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.753.900.000	88.753.900.000	88.753.900.000	88.753.900.000
		JUMLAH PENDAPATAN	1.882.903.338.000	1.928.801.165.000	1.975.316.424.000	2.022.402.651.000
5		BELANJA DAERAH	1.933.529.893.000	2.010.732.266.000	2.025.578.402.000	2.074.240.293.000

No.		URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026	
5	1	BELANJA OPERASI	1.508.893.535.000	1.580.856.163.000	1.556.626.785.000	1.580.188.013.000	
5	1	Belanja Pegawai	826.651.354.000	826.651.354.000	826.651.354.000	826.651.354.000	
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	636.953.146.000	633.915.774.000	684.686.396.000	703.247.624.000
5	1	3	Belanja Bunga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5	1	4	Belanja Subsidi	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5	1	5	Belanja Hibah	42.750.035.000	117.750.035.000	42.750.035.000	47.750.035.000
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	1.289.000.000	1.289.000.000	1.289.000.000	1.289.000.000
5	2	BELANJA MODAL	413.942.808.000	418.942.075.000	453.942.075.000	478.942.075.000	
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.693.550.000	10.934.028.000	15.009.542.000	15.110.205.000	
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	10.693.550.000	10.934.028.000	15.009.542.000	15.110.205.000
		SURPLUS/DEFISIT	-50.626.555.000	-81.931.101.000	-50.261.978.000	-51.837.642.000	
			-2,69	-4,25	-2,54	-2,56	
6		PEMBIAYAAN DAERAH					
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.126.555.000	93.431.101.000	61.761.978.000	63.337.642.000	
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.126.555.000	43.431.101.000	51.761.978.000	53.337.642.000
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan		40.000.000.000		
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	0	0	0
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6	3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	-0	-0	0	



Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya :

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan :
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
 - b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
 - c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
 - d. Adanya peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
 - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
 - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
 - d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
 - e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota
3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS

B. Belanja Daerah

1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahannya dan desa;
3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;

7. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan
2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 3.8.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendarai Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
1	Pendapatan	1.882.903.338.000	1.928.801.165.000	1.975.316.424.000	2.022.402.651.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	72.126.555.000	43.431.101.000	51.761.978.000	53.337.642.000
	Total Penerimaan	1.955.029.893.000	1.972.232.266.000	2.027.078.402.000	2.075.740.293.000
	Dikurangi :				
4	Belanja Tidak Langsung	882.633.939.000	957.874.417.000	886.949.931.000	892.050.594.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.040.895.954.000	1.002.857.849.000	1.128.628.471.000	1.172.189.699.000

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Alokasi dana yang tersedia didistribusikan pada program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan.

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;



3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
- 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
- 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
- 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :

- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketenagakerjaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan;
6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*);
7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
9. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada :

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Angka Kemiskinan pada tahun 2018-2021 di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen.

Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait



perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,52 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,46 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalah yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini



ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

4. Infrastruktur dan penataan ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif.



Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkar utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM apartur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antaralain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi



kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi;
2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya;
3. Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan melambatnya pertumbuhan nasional;
3. Menurunnya daya beli masyarakat ;
4. Belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM);
5. Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan tingginya rasio gini;
6. Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi;

4.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
2. Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan stunting;
3. Masih tingginya pengangguran terbuka;
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

4.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

1. Masih kurangnya jumlah gedung kesenian dan olahraga;
2. Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
 - a. Masih rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 - b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Masih belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS);



- d. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
 - e. Belum terpenuhinya SPM bidang pendidikan.
2. Kesehatan
- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
 - c. Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu;
 - d. Masih tingginya tingkat penyebaran penyakit menular diantaranya penyakit TB, HIV Aids dan sebagainya;
 - e. Masih tingginya Pravelensi Stunting;
 - f. Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC);
 - g. Belum Optimalnya capaian SPM Bidang Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis;
 - b. Belum tersedianya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya. Hal ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya ruang milik jalan di beberapa ruas jalan;
 - c. Belum optimalnya kualitas jalan terutama jalan poros dan jalan lingkungan;
 - d. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki bangunan kantor yang representatif;
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. Belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Masih terdapat kawasan kumuh;
 - b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
 - c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - d. Basis data perumahan belum lengkap.



5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - e. Belum optimal Penegakan Peraturan Daerah,
 - f. Masih kurangnya jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan belum optimal pejabat PPNS;
 - g. Masih terjadinya gangguan kriminalitas, ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
 - j. Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.
6. Sosial
 - a. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan;
 - b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan PPKS;
 - e. Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.

4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
 - a. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
 - b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
 - c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
 - d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
 - e. Masih kurangnya penempatan angkatan kerja.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
 - a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;



- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- 3. Pangan
 - a. Belum optimalnya implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Belum Optimalnya ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi;
 - d. Belum Optimalnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan;
 - e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
- 4. Pertanahan
 - a. Masih rendahnya bukti kepemilikan lahan yang sah/bersertifikat;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan.
- 5. Lingkungan Hidup
 - a. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup;
 - b. Belum optimalnya penanganan persampahan;
 - c. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengurangan sampah;
 - d. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau
- 6. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan;
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.
- 7. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
- 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
 - b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate (TFR);
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan seperti POS KB dan sub pos KB;
 - d. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
 - e. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
- 9. Perhubungan
 - a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;



- b. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Belum optimalnya implemntasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi public;

11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
- b. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran ;
- e. Belum optimalnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro ;
- f. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster Usaha Mikro.

12. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi;
- b. Belum optimalnya promosi investasi daerah;

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

14. Statistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan;
- b. Belum optimalnya satu data yang valid dan *up to date*.

15. Persandian

- a. Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam pengamanan informasi.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya lokal;



- b. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
 - c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.
17. Perpustakaan
- a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar Nasional Perpustakaan;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
18. Kearsipan
- a. Belum optimalnya pengelolaan karsipan;
 - b. Belum optimalnya penerapan standar baku karsipan pada perangkat daerah;
 - c. Belum tersedia gedung depo arsip daerah.

4.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1. Kelautan dan Perikanan
 - a. Belum optimalnya hasil produksi perikanan;
 - b. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
- 2. Pariwisata
 - a. Kurangnya objek dan daya tarik wisata unggulan;
 - b. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan;
 - c. Belum optimalnya promosi wisata.
- 3. Pertanian
 - a. Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai;
 - b. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian;
 - c. SDM di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani;
 - d. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya terutama di budidaya pertanian di lahan pertanian bukan sawah;
 - e. Kurangnya daya saing produk olahan hasil pertanian
- 4. Perdagangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat; Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
 - b. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - c. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;



5. Perindustrian

- a. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
- b. Terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM;
- c. Daya saing produk IKM masih rendah;

4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan.

- a. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat.

2. Pengawasan

- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Belum optimalnya manajemen resiko;

3. Perencanaan,

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- b. Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan;
- b. Belum optimalnya implementasi inovasi daerah;

5. Keuangan

- a. Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD;
- b. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.

6. Kepegawaian

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
- b. Belum optimalnya pemetaan SDM ASN Kota Tasikmalaya
- c. Belum optimalnya kompetensi ASN;

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

4.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Masing tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terutama konsumsi bahan makanan;



2. Masih rendahnya daya beli masyarakat.

4.1.4.2. Iklim Investasi

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan;
2. Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha;
3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat.

4.1.4.3. Sumber Daya Manusia

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
2. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*)
3. Rendahnya rasio wirausaha (*entrepreneurship*)

Selain permasalahan pembangunan tersebut, dengan terjadinya pandemi covid-19 telah membawa dampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya permasalahan makro pembangunan dan memperlambat capaian indikator makro pembangunan, diantaranya :

1. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Melambatnya pertumbuhan ekonomi;
3. Menurunnya daya beli masyarakat ;
4. Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat
5. Menurunnya investasi dan berimplikasi pada terhentinya usaha;

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah,



maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelaras dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;



6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2. Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspada. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin



negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina.

Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.

Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kota Tasikmalaya khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kota Tasikmalaya hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Salah satu penelaahan isu dan kebijakan pembangunan yang wajib dijadikan rujukan adalah penelaahan terhadap isu dan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang penting, berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 4 tahun ke depan.

Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya bagi daerah selama kurun waktu 4 tahun yang akan datang. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja



presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan mempertimbangkan masalah pokok kebangsaan dan tantangan global.



Gambar 4.1.

Visi mis, arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia



Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan :
 - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :
 - a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
 - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
 - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
 - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
 - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.



3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
 - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
 - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan :
 - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
 - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
 - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
 - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
 - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
 - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar :
 - a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - b) Infrastruktur Ekonomi;
 - c) Infrastruktur Perkotaan;
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
 - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim :
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik :
 - a) Konsolidasi Demokrasi;
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c) Penegakan Hukum Nasional;
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing SDM; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Kelima isu strategis di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing SDM

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah bahwa masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah



yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita persatuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Provinsi Jawa Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Provinsi Jawa Barat.

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59



Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2015-2019 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak Putusan Hubungan Kerja (PHK), dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan, dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intensif demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana



wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tamping lingkungan tidak diutamakan. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.



Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu. Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika social mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan lockdown



di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, social distancing di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Provinsi Jawa Barat berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh eksplorasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dan lainlain), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis panganya yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Potensi krisis pangan tidak hanya terjadi pada skala Provinsi Jawa Barat namun pada skala nasional maupun global. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan



pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industry lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar

Dalam pengembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kota Tasikmalaya.

4.2.4.1. Kabupaten Tasikmalaya

Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Visi : “Mewujudkan Tasikmalaya Berkharisma, Unggul dan Inovatif”

Adapun misi adalah sebagai berikut :

1. Membentuk karakter warga masyarakat yang unggul, beriman, bertakwa dan berakhhlakul karimah
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel dilandasi kerjasama ulama, umara dan cerdik cendekia;
3. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdaya saing dengan berbasiskan agribisnis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berbasiskan aspek lingkungan yang berkelanjutan.

Isu Strategis RPJMD perubahan Kabupaten Tasikmalaya :

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas
2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19
5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19
6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas
7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global
9. Penanggulangan Kemiskinan
10. Penanganan pengangguran
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4.2.4.2. Kabupaten Ciamis

Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Visi : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”, dengan misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;



5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam;
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan;
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

4.2.4.3. Kabupaten Garut

Visi Kabupaten Garut dalam RPJMD tahun 2019 -2024 yaitu : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru;



5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal.

4.2.4.4. Kota Banjar

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2018-2023 adalah: “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Banjar Semakin Berseri”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan;
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kota Banjar berikut:

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Akuntabel;
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

4.2.4.5. Kabupaten Pangandaran

Visi pembangunan lima tahun ke depan yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”. Untuk mewujudkan visi di atas, didukung oleh 6 misi yaitu :

1. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan



2. Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa, dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
6. Menigkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

4.2.5. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

4.2.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 adalah : “DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”.

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.



Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut :

1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya

Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.
7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

2. Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Tasikmalaya

Perwujudan Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 sangat ditentukan pula oleh perencanaan tata ruang wilayah kota. Penataan ruang dan wilayah hingga tahun 2025 diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan kota dalam konteks regional dan nasional, yang tujuannya:

- a. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai yang ada;



- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, maka secara khusus diidentifikasi sebagai hutan kota atau hutan konservasi.
- b. Kawasan perlindungan setempat, yang dalam hal ini adalah sempadan sungai, kawasan sekitar situs Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Kawasan budidaya didasarkan pada dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan akan dikembangkan di kawasan tersebut. Adapun penggolongan kawasan budidaya dalam RTRW Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Kawasan budidaya yang berfungsi lindung;
- b. Kawasan pusat kota;
- c. Kawasan perdagangan dan jasa regional;
- d. Koridor perdagangan dan jasa;
- e. Kawasan pemerintahan;
- f. Kawasan pendidikan;
- g. Kawasan kesehatan;
- h. Kawasan terminal;
- i. Kawasan perumahan dan permukiman;
- j. Kawasan industri;
- k. Kawasan pergudangan;
- l. Sarana fasilitas umum dan sosial;
- m. Sarana rekreasi dan olahraga;
- n. Kawasan militer;
- o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
- p. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk menunjang perkembangan kota yang terarah dan efisien serta memiliki tingkat pelayanan yang baik, maka Kota Tasikmalaya dibagi menjadi bagian-bagian wilayah kota. Pertimbangan dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:

- a. Homogenitas dan intensitas perkembangan BWK yaitu konsentrasi dominasi guna lahan saat ini.
- b. Pola jaringan jalan dan pola pergerakan yaitu aksesibilitas yang baik



- c. Pusat lingkungan (Pusat BWK/Pusat Sub BWK) ditentukan berdasarkan banyaknya fasilitas dan utilitas yang dimiliki.
- d. Beberapa pusat lingkungan dialokasikan berdasarkan fungsi eksisting sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- e. Pusat-pusat tersebut mengakomodasikan fungsi Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan.

Adapun Wilayah Kota Tasikmalaya dalam RTRW Kota tahun 2004 dibagi menjadi 5 BWK dan 10 sub BWK, dimana pembagian wilayah dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. BWK I, mencakup sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang serta sebagian Kec. Cipedes.
- b. BWK II, meliputi sebagian Kec. Cipedes, sebagian Kec. Cibeureum. Dalam BWK II terbagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK II A dengan fungsi sebagai perkantoran skala lingkungan dan perumahan.
 - 2) BWK II B dengan fungsi sebagai wisata/rekreasi, perdagangan lokal, perangkutan regional dan perumahan.
- c. BWK III, meliputi sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Cibeureum, sebagian Kec. Tamansari dan sebagian Kec. Kawalu. Dalam BWK III ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK III A dengan fungsi perkantoran, industri kecil, perumahan menengah, pertokoan lokal, perdagangan dan perumahan.
 - 2) BWK III B dengan fungsi militer, industri kecil dan menengah.
 - 3) BWK III C dengan fungsi perumahan, pendidikan.
- d. BWK IV, meliputi sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Cihideung. Dalam BWK IV ini di bagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK IV A dengan fungsi industri menengah dan besar.
 - 2) BWK IV B dengan fungsi perumahan dan cadangan pengembangan.
- e. BWK V, meliputi sebagian Kec. Cipedes, Kec. Indihiang, Kec. Mangkubumi, serta sebagian Kec. Cihideung. BWK V ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub BWK yaitu :
 - 1) BWK V A, dengan fungsi perdagangan regional, perumahan, perkantoran, transportasi regional.
 - 2) BWK V B, dengan fungsi wisata, perumahan.
 - 3) BWK V C, dengan fungsi perumahan dan pergudangan.

Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang



diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah.
- 2) Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi.
- 3) Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses
- 4) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun
- 5) Struktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan
- 6) Kepercayaan masayarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat.
- 7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak



membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

4.2.5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi



Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi :

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :



- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;



- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Pada tahun 2016, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, telah memasuki tahun ke-5 (lima). Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Jawa Barat, dan beberapa diantaranya tidak tercantum di dalam dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kota Tasikmalaya, Dokumen RTRW memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kota/Kabupaten sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



Peninjauan kembali RTRW mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pembangunan/pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.

Dengan dilakukannya revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, perubahan RPJMN, serta terbitnya peraturan-peraturan sektoral yang berpengaruh pada rencana tata ruang, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu untuk melaksanakan peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 untuk mengetahui apakah substansi RTRW masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRW dimplementasikan. Peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dilakukan melalui tahapan kajian, evaluasi dan penilaian dalam menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan dalam hal apa saja yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 pada sisa masa berlakunya RTRW, yaitu 15 (lima belas) tahun ke depan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan penilaian peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa diperlukan perubahan materi sebanyak 19,47%, maka kesimpulan Peninjauan Kembali adalah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sesuai dengan PERLU DI REVISI. Hasil Peninjauan Kembali tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota No. 050.13/Kep.60-Bappelitbangda/2017 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, yang berisi:

- a. Percepatan perwujuan struktur dan pola ruang terutama yang telah diprogramkan jangka menengah pertama akan dituangkan dalam program jangka menengah selanjutnya
- b. Perlu dilakukan revisi yang mempertimbangkan arahan kebijakan antara lain:
 - RTRW Nasional Hasil Revisi
 - RTR Kawasan Strategis Priangan Timur
 - RTRW Provinsi Jawa Barat Hasil Revisi
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang – undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Evaluasi Raperda Tata Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembangunan saluran kelistrikan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat
- Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya
- Kajian FS jalan lingkar dan fly over.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Tasikmalaya
- c. Perlu dilakukan revisi yang mengamandemen pasal pada perda RTRW Kota Tasikmalaya yang terkait dengan perubahan kebijakan tingkat pusat dan propinsi, serta merespon dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya.

4.2.5.3. Isu Strategis RPD

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2017-2022,



maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2018-2021 penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemic Covid 19 semakin memperburuk daya beli masyarakat.

2. Kualitas SDM berbasis kearifan lokal

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasi layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan



keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidan kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Keamanan dan keteriban umum masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan social warganya tentu memiliki permasalahan seperti pelanggaran perda, pedagang kaki lima dan gangguan trantibum. Selain itu sebagai kota yang cukup heterogen kerukunan masyarakat menjadi permasalah yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai.



3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Kota Tasikmalaya telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi investasi yang disebabkan oleh realisasi investasi di kota Tasikmalaya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya; Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang



sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

4. Infrastruktur dan penataan ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkar utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

5. Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu



dingkatkan antaralain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.



Tabel 4.1.
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN		
RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026	RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RPJMN Tahun 2020-2024
1 Kemiskinan dan permasalahan sosial	2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	<p>2.1. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)</p> <p>2.2. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan</p> <p>2.3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa</p> <p>2.4. Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan</p> <p>2.5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan</p> <p>3.2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk</p>
2 Kualitas SDM berbasis kearifan lokal	1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	<p>3.1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan</p> <p>3.3. Pemenuhan layanan dasar</p> <p>3.4. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</p> <p>3.5. Peningkatan produktivitas dan daya saing</p> <p>4.1. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa</p> <p>4.2. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia</p> <p>4.3. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti</p> <p>4.4. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama</p>



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN		
RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026	RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	RPJMN Tahun 2020-2024
		4.5. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan 4.6. Belum optimalnya peran keluarga 4.7. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
3 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi	4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1.1. Keberlanjutan sumber daya alam 1.2. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi 1.3. Transformasi struktural berjalan lambat 1.4. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
4 Infrastruktur dan penataan ruang	3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	5.1. Infrastruktur pelayanan dasar 5.2. Infrastruktur ekonomi 5.3. Infrastruktur perkotaan 5.4. Energi dan ketenagalistrikan 5.5. Transformasi digital
5 Implementasi Reformasi birokrasi	5 Reformasi birokrasi	6.1. Konsolidasi demokrasi 6.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri 6.3. Penegakan hukum nasional 6.4. Reformasi birokrasi dan tata kelola 6.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berbeda dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi dari kepala daerah terpilih, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

**“DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”**

Visi tersebut mengandung makna :

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.



3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.
4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan intern al. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

5.2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya



mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi.
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam.
7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, dengan analisa sasaran pokok yang digambarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah.
2. Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran



dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi.

3. Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses
4. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun
5. Struktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan
6. Kepercayaan masayarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat.
7. Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu tahun 2023-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan



arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran :

S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran :

S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;

S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;

S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

T3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran :

S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

T4. Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran :

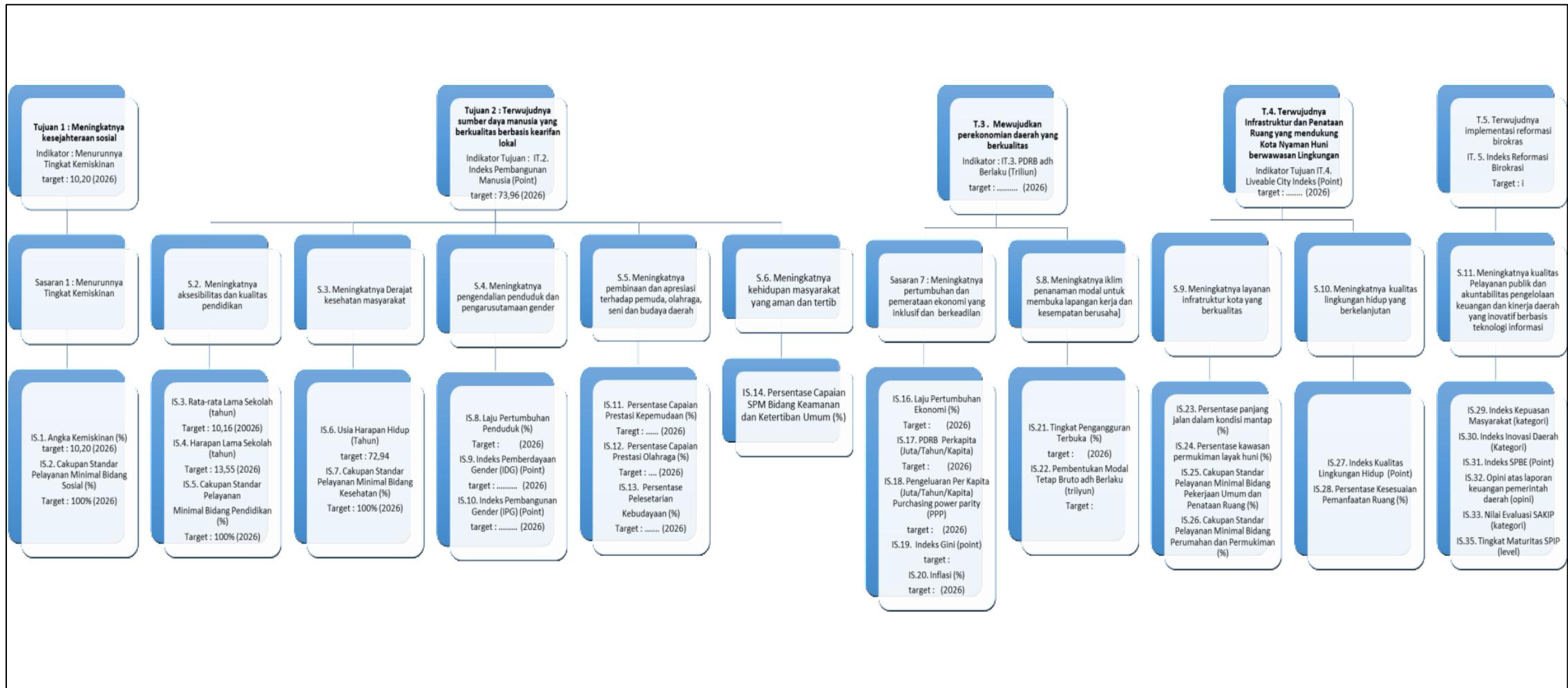
S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas;

S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran :

S11. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya disajikan pada gambar cascading sebagai berikut :



Gambar 5.1.
Cascading Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026



Tabel 5.1.
Tujuan Dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Capaian RPD Tahun 2023-2026				Kondisi Akhir RPD
							2023	2024	2025	2026	
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial		IT.1. Angka kemiskinan	(%)	13,13	11,50	12,33	11,33	10,73	10,20	10,20
			IS.1. Angka kemiskinan Tingkat Kemiskinan	(%)	13,13	11,50	12,33	11,33	10,73	10,20	10,20
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	poin	100	100	90	90	92	94	94
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal		IT.2. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,31	73,95	73,95	74,28	74,62	74,96	74,96
			IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,70	9,76	9,89	10,02	10,16	10,16
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,54	13,50	13,52	13,53	13,55	13,55
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	poin	69,12	100	72	75	77	79	79
			IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	73,15	72,57	72,69	72,81	72,94	72,94



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Capaian RPD Tahun 2023-2026				Kondisi Akhir RPD
							2023	2024	2025	2026	
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	poin	48,09	100	75	80	85	90	90
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender		IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,20	0,71	0,61	0,51	0,41	0,41
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender	poin	59,51	62,96	60,00	60,10	60,20	60,30	60,30
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender	poin	91,74	91,54	91,84	91,94	92,04	92,24	92,24
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah		IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	-	-	2,20	3,30	4,40	5,49	5,49
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	60	-	34,15	36,59	39,02	41,46	41,46
			IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan	%	-	80	63,73	68,63	73,53	78,43	78,43
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib		IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	98,47	100	100	100	100	100	100
			IS.15. Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Capaian RPD Tahun 2023-2026				Kondisi Akhir RPD
							2023	2024	2025	2026	
3	T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IT.3. PDRB adh Berlaku	Triliun	22,85	23,61	24,40	25,21	26,02	26,83	26,83
			IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,0	5,15	5,69	5,81	5,98	5,98
			IS.17. PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	31,56	32,46	33,40	34,35	35,33	36,26	36,26
			IS.18. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	10,213	9,86	10,424	10,531	10,639	10,748	10,748
			IS.19. Indeks Gini	Poin	0,414	0,39	0,390	0,380	0,370	0,360	0,360
		S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.20. Inflasi	%	1,17	2,00	2,47	2,65	2,83	2,96	2,96
			IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	7,02	7,35	7,18	6,84	6,53	6,53
			IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	7.573,28	-	8.002,90	8.283,45	8.564,01	8.844,56	8.844,56
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni		IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Poin	-	-	70,53	74,48	78,96	83,62	83,62
			IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan	poin	-	-	59,23	62,05	66,87	73,67	73,67



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Capaian RPD Tahun 2023-2026				Kondisi Akhir RPD
							2023	2024	2025	2026	
berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas		IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni	poin	-	-	15,88	31,77	48,57	65,36	65,36
			IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	poin	58,71	100	91,07	94,74	97,57	100	100
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	poin	100	100	100	100	100	100	100
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;		IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin		74,40	57,93	58,15	58,37	58,59	58,59
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah	%	77,86	83,45	99	99	100	100	100
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	98	98,5	99	99,5	99,5
5	T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/Poin	CC (57,58)	61-70 (B)	CC (57,58- 60,00)	CC (57,58- 60,00)	B (60,01- 65,00)	B (60,01- 65,00)	B (60,01- 65,00)
		S11. Meningkatnya kualitas layanan publik	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Baik (83,32)	Baik (77-88)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (85,80 - 88,30)	Baik (85,80 - 88,30)	Baik 85,80 - 88,30



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Capaian RPD Tahun 2023-2026				Kondisi Akhir RPD
							2023	2024	2025	2026	
		dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.31. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)	Inovatif (52,43)	Sangat Inovatif (60,01)	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif (62,01)
			IS.32. Indeks SPBE	Kategori/Poin	Baik (2,68)	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)	Baik (3,0)	Baik (3,1)	Baik (3,2)	Baik (3,2)
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	BB (70,81)	81-90 (A)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,83	3	3	3	3	3	3

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional, sehingga pembangunan dapat saling bersinergi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.

Untuk lebih lengkapnya tentang keselarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan RPD Kota Tasikmalaya dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 5.2.
Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	<p>S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.1. Angka Kemiskinan (%) ➢ IS.2. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%) 	<p>Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Penduduk Miskin (%) ➢ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 	<p>Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:
T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	<p>S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) ➢ IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) ➢ IS.5. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) 	<p>Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rata-Rata lama sekolah (tahun) ➢ Harapan Lama Sekolah (tahun) 	<p>Terpenuhinya layanan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun) ➢ Harapan Lama Sekolah (Tahun) ➢ Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) ➢ Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%) ➢ Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%) ➢ Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya ➢ Nilai rata-rata hasil PISA ➢ Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%) ➢ Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%)
	<p>S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) ➢ IS.7. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) 	<p>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Angka Harapan Hidup (tahun) 	<p>Terpenuhinya layanan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ➢ Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) ➢ Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%) ➢ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) ➤ Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ➤ Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) ➤ Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) ➤ Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ➤ Eliminasi malaria (kab/kota) ➤ Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) ➤ Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) ➤ Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) ➤ Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) ➤ Persentase rumah sakit terakreditasi (%) ➤ Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) ➤ Persentase puskesmas tanpa dokter (%) ➤ Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) ➤ Persentase obat memenuhi syarat (%) ➤ Persentase makanan memenuhi syarat (%)
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ➤ IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) ➤ IS.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) 	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin) ➤ Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen) 	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) ➤ Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan	Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) ➤ IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) ➤ IS.13. Persentase Pelestarian Kebudayaan (%) <p>S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.14. Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%) ➤ IS.15. Indeks Resiko Bencana (Point) 	Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Pembangunan Pemuda (Poin) Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Pembangunan Kebudayaan Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan ➤ Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya dan prestasi olahraga
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7.Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ➤ IS.17. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) ➤ IS.19. Indeks Gini (point) ➤ IS.20. Inflasi (%) 	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatanpangan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Skor PolaPanganHarapan(SPPH) (Poin) ➤ Nilai TukarPetani (Poin) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif <ul style="list-style-type: none"> ➤ KontribusiPariwisata Terhadap PDRB (%) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) ➤ Lajupertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasio kewirausahaan nasional (%) ➤ Kontribusi UMKM terhadap PDB (%) ➤ Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) ➤ Proporsi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%) ➤) Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%) ➤ Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit) ➤ Pertumbuhan wirausaha (%) ➤ Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra)



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ➤ IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun) 	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah) ➤ Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%) 	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertumbuhan PDB pertanian (%) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%) ➤ Pertumbuhan PDB industri pengolahan Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) ➤ Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) ➤ Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) ➤ Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.23. Persentase kemantapan jalan (%) ➤ IS.24. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) ➤ IS.25. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) ➤ IS.26. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%) 	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Desa Membangun (poin) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan) 	Meningkatnya konektivitas wilayah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Panjang jalan baru yang terbangun (Km) ➤ Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) ➤ Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
		<p>Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Penggunaan Air (Poin) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) ➤ Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga) ➤ Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga) ➤ Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) ➤ Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) ➤ Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)
	<p>S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) ➤ IS.28. Persentase Pengelolaan Sampah (%) ➤ IS.29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) 	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin) ➤ Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 	<p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Kualitas Udara (IKU) ➤ Indeks Kualitas Air (IKA) ➤ Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) ➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) <p>Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi) ➤ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)
T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	<p>S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) 	<p>Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori) 	<p>Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik* ➤ Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran	Sasaran/Indikator Sasaran
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) ➢ IS.32. Indeks SPBE (Point) ➢ IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) ➢ IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) ➢ IS.35. Nilai Evaluasi LPPD (kategori) ➢ IS.36. Tingkat Maturitas SPIP (level) 	<p>Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik <p>Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ➢ Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

Tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 mengacu pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, berikut keselarasan antara Tujuan dan sasaran RPD dengan misi RPJPD.

Tabel 5.3.

Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Misi
T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.1. Angka Kemiskinan (%) ➢ IS.2. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%) 	Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) ➢ IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) ➢ IS.5. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) 	Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya..
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) ➢ IS.7. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) 	Misi 7 : Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Misi
	<p>S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ➢ IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) ➢ IS.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) 	Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
	<p>S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) ➢ IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) ➢ IS.13. Persentase Pelestarian Kebudayaan (%) <p>S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.14. Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%) ➢ IS.15. Indeks Resiko Bencana (Point) 	Misi 2 : Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	<p>S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ➢ IS.17. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) ➢ IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) ➢ IS.19. Indeks Gini (point) ➢ IS.20. Inflasi (%) 	Misi 3 : Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
	<p>S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ➢ IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun) 	Misi 3 : Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	<p>S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.23. Persentase kemantapan jalan (%) ➢ IS.24. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) ➢ IS.25. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) ➢ IS.26. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%) 	Misi 6 : Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.



RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025
Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Misi
	<p>S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) ➢ IS.28. Persentase Pengelolaan Sampah (%) ➢ IS.29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) 	Misi 7 : Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.
T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	<p>S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) ➢ IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) ➢ IS.32. Indeks SPBE (Point) ➢ IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) ➢ IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) ➢ IS.35. Nilai Evaluasi LPPD (kategori) ➢ IS.36. Tingkat Maturitas SPIP (level) 	Misi 5 : Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.



Selain itu, dalam menentukan strategi pembangunan daerah dirumuskan melalui pendekatan :

1. Mempertahankan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik saat ini agar dipertahankan, dijaga dan terus dijalankan;
2. Melanjutkan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik agar terus dijalankan dan dilakukan pengembangan agar lebih baik lagi;
3. Reorientasi/inovasi, artinya harus dapat merumuskan dan menyusun program kegiatan baru yang sifatnya terobosan, inovatif yang dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mendukung, artinya terus memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan pemerintah baik bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi jawa barat dalam rangka sinergitas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang telah dan proyeksi yang akan terjadi dimasa mendatang. Analisis pengaruh lingkungan yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Penggunaan metode SWOT dalam penentuan strategi lebih dikarenakan mudah dipahami, sederhana dan banyak digunakan oleh pelaku pembangunan di Indonesia.

Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT digambarkan sebagaimana tabel berikut :

INTERNAL	<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
	<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threat (Ancaman)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemegang regulator dan kebijakan 2. Regulasi yang ada cukup memadai dalam menjalankan pemerintahan 3. Anggaran yang cukup tersedia baik yang bersumber dari APBD kota, provinsi dan pusat 4. Sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM aparatur yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas 2. Pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang belum optimal 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (<i>e-government</i>) belum optimal 4. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal 5. Belum optimalnya implementasi refomasi birokrasi

Gambar 6.1.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT



Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa SWOT serta memperhatikan analisis kondisi, permasalahan dan isu strategis, maka strategi umum pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, melalui jaminan dan perlindungan sosial yang terintegrasi berbasis data terpadu, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang berkarakter, cerdas, sehat dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan merata dengan meningkatkan produktivitas pertanian, usaha dan industri mikro, kecil dan menengah, mengembangkan pariwisata perkotaan, meningkatkan iklim penanaman modal dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan, perumahan dan permukiman, yang aman, nyaman, sehat, inklusif dan berkelanjutan serta sesuai rencana penataan ruang;
5. Mempercepat pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi berbasis oleh teknologi informasi

Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi pembangunan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan strategi meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan masyarakat miskin, sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penangulangan kemiskinan;
2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan strategi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi;
3. Sasaran 3 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan budaya sehat, peningkatan sumber daya manusia kesehatan serta meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
4. Sasaran 4 meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender dengan strategi meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
5. Sasaran 5 yaitu meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah dengan strategi meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
6. Sasaran 6 yaitu meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan startegi meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan;



7. Sasaran 7 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa, meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif serta meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah;
8. Sasaran 8 yaitu meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja dengan strategi meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja
9. Sasaran 9 yaitu meningkatnya layanan infrastuktur kota yang berkualitas dengan strategi meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi serta meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat
10. Sasaran 10 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan
11. Sasaran 11 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Terjadinya pandemik covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemik covid-19 telah mengakibatkan



terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya baik aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 dan dampaknya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2023-2026.

Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang berkembang diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 6.1.
Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, 3. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; dan 3. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam bidang kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha mikro dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah</p>	<p>pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</p> <p>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p>
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	<p>1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan.</p> <p>2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</p> <p>3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</p> <p>4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</p>
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	<p>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</p> <p>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama air minum dan air limbah yang layak.</p> <p>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	<p>1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</p>
T.5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis	<p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	teknologi informasi;	teknologi infomasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<p>memadai .</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD yang dijabarkan dalam RKPD pada setiap tahun yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan
(Tema Pembangunan)

Arah KebijakanPembangunan			
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini untuk membangun sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan sehingga terbangun keselarasan pelaksanaan pembangunan antara Kota Tasikmalaya dengan pembangunan provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Keselarasan startegi dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.3.
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, Sinergitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin 3. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan social 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas	Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	masyarakat	pendidikan berbasis teknologi informasi		berkualitas	2. Peningatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat	pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah 2. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah 3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 3. eningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah 5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama	1. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi		kesehatan 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	1. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	1. Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan gender	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif,	1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 2. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak.	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah 3. anak untuk memastikan anak menikmati haknya 4. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 5. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda			pekerja migran dari kekerasan dan TPPO
5	Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah 2. Melestarikan kearifan local dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam jumlah objek pemajuan kebudayaan	1. Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 2. Melestarikan kearifan local dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam jumlah objek pemajuan kebudayaan	1. Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 2. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan	1. Peningkatan kualitas pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya	1. Meningkatkan peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif 2. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat 3. Meningkatkan Pelestarian, pengakuan atas seni dan budaya lokal	1. Peningkatan kualitas pemuda 2. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; 3. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan; 4. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia			<p>pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; 6. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; 7. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan 8. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga. 9. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>royong, dan kerja sama antarwarga</p> <p>10. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat</p> <p>11. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif</p> <p>12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia</p> <p>13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan</p>
6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan	1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat 2. Meningkatkan Penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam	1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Memperkuat moderasi beragama untuk	1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan	1. Meningkatkan penanganan pelanggaran perda 2. Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta	<p>1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;</p> <p>2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan</p>



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	kehidupan masyarakat	mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,	pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	ekonomi umat	3. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan	kelompok rentan lainnya; 3. Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan 4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri; 5. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 6. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 7. Penyelarasan relasi agama dan budaya 8. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 9. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
7	Meningkatnya pertumbuhan dan	1. Meningkatkan kualitas dan	1. Meningkatkan perdagangan	1. Penguatan kewirausahaan,	1. Peningkatan pembinaan dan	1. Mengembangkan klaster industri,	1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta	dalam negeri dan luar negeri 2. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 3. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan pembinaan dan	kemitraan dan pemanfaatan teknologi 2. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam daerah luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional 3. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing 4. Meningkatkan ketersediaan, akses, distruksi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi yang beragam	kecil dan usaha menengah besar; 2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; serta 5. meningkatkan nilai tambah usaha sosial. 6. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 7. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; 8. meningkatkan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah			fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif		produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; 9. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta 10. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. 11. mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; 12. meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; 13. meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta
8	Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal 2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja	1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar 2. Mengembangkan incubator Bisnis	1. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta
9	Meningkatnya layanan infratruktur kota	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem	1. Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang	1. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok	1. perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	<p>yang berkualitas</p> <p>dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</p> <p>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>	<p>jaringan infrastruktur transfortasi</p> <p>2. Mengembangkan sistem jaringan transfortasi yang handal dan modern</p> <p>3. Meningkatkan kuaitas lingkungan permukiman</p> <p>4. penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan</p> <p>5. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</p>	<p>melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan</p> <p>2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan</p> <p>3. meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan</p> <p>4. Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan</p>	<p>keselamatan berlalulintas.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.</p> <p>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>	<p>2. Membanguan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial</p> <p>3. Mengembangkan sistem jaringan massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman terjangkau dan antar moda</p> <p>4. Mengembangkan prasarana transfortasi Darat,LAut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis</p> <p>5. Meningktakan pengelolaan limbah domestic</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan kawasan permukiman</p> <p>7. Meningkatkan tertib tata kelola pertnahan</p>	<p>kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala</p> <p>2. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas</p> <p>3. Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (Major Project); ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transfortasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan</p>	



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
				aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.			<ul style="list-style-type: none"> 4. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan Pengembangan sistem layanan panggilan darurat, Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR), 5. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah; 6. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 8. Pengembangan sistem insentif dan disincentif

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							<p>dalam penyediaan perumahan;</p> <p>9. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.</p> <p>10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan</p> <p>11. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi</p> <p>12. mengembangkan sistem perumahan publik</p>
10	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	6. Meningkatkan Pengelolaan DAS, konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati berserta ekosistemnya	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara</p> <p>2. Meningkatkan kualitas tutupan hutan dan lahan</p> <p>3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang</p>	<p>1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>

No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
							4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
11	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan	1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan	1. Penguatan implementasi manajemen ASN 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja 4. Transformasi pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai . 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah	1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government 2. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan	1. penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional; 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi; 3. Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 4. pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem



No	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026		RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024	RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026	RPJMD Provinsi 2018-2023	RPJMN 2019-2024
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah			untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah		inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.



6.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan isu strategis, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya :
 - a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin;
 - b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 - d. Pemberdayaan keluarga miskin;
 - e. Beasiswa bagi mahasiswa dari rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, diantaranya :
 - a. Pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - b. Pembinaan keluarga dan ketahanan remaja;
 - c. Penyediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. Penyediaan sanitasi keluarga yang layak.
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
 - a. Peningkatan kompetensi pencari kerja;
 - b. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan;
 - c. Peningkatan produksi tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, ternak dan ikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
 - f. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri.
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan dengan prioritas :
 - a. Penyelesaian jalan lingkar utara;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - c. Pengembangan sarana dan Prasarana air minum;
 - d. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - e. Penataan kawasan permukiman kumuh;
 - f. Pembangunan dan reabilitasi gedung pelayanan publik;
 - g. Penyelesaian revisi rencana tata ruang.
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi dan Pemilu serta Pemilukada, dengan prioritas:
 - a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
 - b. Percepatan implementasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
 - c. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
 - d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 harus selaras dengan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Berikut tabel keselarasan antara progam prioritas RPD dengan program prioritas RPJMN.



Tabel 6.4.
Keselarasan Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026

Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026	Prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
1. Penanggulangan Kemiskinan	P4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan; PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	P1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah P5 Reformasi Sistem Pendidikan Pemajuan Kebudayaan P9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara P8 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	P2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi P3 Penguatan Sistem ketahanan Pangan Berkelanjutan P11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026	Prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	P10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	P7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.



6.3. Program Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan harus diimplementasikan melalui Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program perangkat daerah.

Untuk lebih rinci program daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah

No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan social	IT.1. Angka kemiskinan(%)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan(%)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUMKM Perindag
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local	IT.2. Indeks Pembangunan Manusia (Poin)		



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (poin) IS.10. Indeks Pembangunan Gender (poin)	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Anak
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat Provinsi (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat Provinsi (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		IS.15. Indeks Resiko Bencana (Kategori/poin)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3	T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	IT.3. PDRB adh Berlaku (Triliun Rupiah)		
	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.17. PDRB Perkapita (Juta rupiah)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan
		IS.19. Indeks Gini (Poin)	Program Pendidikan Dan Latihan	Dinas KUKM Perindustrian dan



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Perkoperasian	Perdagangan
	IS.20. Inflasi (%)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Program pengawasan Keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Miliar Rupiah)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan (poin)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan	Dinas Pekerjaan



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Umum dan Tata Ruang
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah (%)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)		
	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin/Kategori)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		IS.32. Indeks SPBE (Kategori/Poin)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
		IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (Opini)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori/Poin)	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		IS.35. Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			Program Pemerintahan Dan	Sekerariat



No	Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah	Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Kesejahteraan Rakyat	Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekerariat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan

6.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai pelaksanaan SPM tersebut di Kota Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.6.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	SPM PENDIDIKAN			
	pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	Dinas Pendidikan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	
			Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	
	Pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	
2	SPM KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular	
3	SPM PEKERJAAN UMUM			
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase KK yang berakses SPALD	
4	SPM PERUMAHAN			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	
5	SPM KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM			
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran K3	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan wilayah manajemen kebakaran	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
6	SPM SOSIAL			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	



6.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs disusun program pembangunan untuk mendukung pencapainnya. Berikut disajikan program dalam rangka pencapaian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 6.7.
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals (SDGs)

TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1 TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]					
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1	Percentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		1.3.1.(C)	Percentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas	1.4.1.(a)	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(b)	Percentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas LH
		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanganan Bencana	BPBD
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanganan Bencana	BPBD
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1.5..a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
1.5..a .	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.5.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		1.5. a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
2	TANPA KELAPARAN				
2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas KP3



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.a	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas KP3
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3
2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP3



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas KP3
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA				
3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.1.1*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.2.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.3.5.	Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.4.2.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3.8.2.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1*	Percentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.a.1*	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Percentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.b.1. (a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan	3.b.1.(a)	Percentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.c.1*	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS				
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.6.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Percentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.6.1.(b)	Percentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Percentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
5 KESETARAAN GENDER					
5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A
		5.2.2.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5.5.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBP3A
5.6.	Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBP3A
5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak				
6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUTR



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUTR
		6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR	
		6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR	
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
		6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
		6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
		6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUTR
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas KUMKM Perindag



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUMKM Perindag
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUMKM Perindag
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
8.5.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
8.6	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.9.	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8.10.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUMKM Perindag
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				
9.1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
9.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda
9.c.	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
10	Berkurangnya Kesenjangan				
10.1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Program Pengembangan UMKM Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag



TUJUAN/TARGET	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUMKM Perindag
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas KUMKM Perindag
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas KUMKM Perindag
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP3
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP3
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas KP3
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porabudpar
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porabudpar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Porabudpar
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perikanan	Dinas KP3
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUMKM Perindag
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP3
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perikanan	Dinas KP3
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUMKM Perindag
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
10.3.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	kebijakan tersebut.	10.3.1 .(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
10.4.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan				
11.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
		11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
		11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perwaskim
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Program Perhubungan	Dinas Perhubungan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
11.3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA
11.5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
11.6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
11.7.	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
11.b.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
12	Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				
12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).	Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH
12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
13	Penanganan Perubahan Iklim				
13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap baha terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
15	Ekosistem Daratan				
15.1.	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH
15.2.	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH					
16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP	
	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP	
	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP	
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPOLPP	
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksplorasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A	
	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBP3A	
16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA	
16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan	16.6.1.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
di semua tingkat.		16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Progam Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
		16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
		16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
16.10 .	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				
17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
		17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo



TUJUAN/TARGET		INDIKATOR		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
17.18 .	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Percentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	BAPPELITBANGDA
17.19 .	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2. (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
17.19 .	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		17.19.2. (d)	Percentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2023 - 2026

NO.	URAIAN	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
1	Pendapatan	1.882.903.338.000	1,9288E+12	1.975.316.424.000	2.022.402.651.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1.882.903.338.000	1.928.801.165.000	1.975.316.424.000	2.022.402.651.000
	Dikurangi :				
4	Belanja pegawai	826.651.354.000	826.651.354.000	826.651.354.000	826.651.354.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.024.751.984.000	1.090.649.811.000	1.137.165.070.000	1.184.251.297.000

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, serta unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah, dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah dan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah.

Jumlah program operasional yang pada perangkat daerah sebanyak 170 program, yang terdiri dari 1 program untuk operasional kesekretariatan yang berada pada seluruh perangkat daerah dan 169 program yang terbagi pada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini :

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Kota Tasikmalaya				1.950.359.056.795		2.027.885.375.335		2.043.233.456.890		2.092.352.293.455		5.041.494.459.475				
	Urusan Pendidikan				572.214.810.000		572.114.810.000		575.214.810.000		588.214.810.000		588.214.810.000		2.307.759.240.000		
	Dinas Pendidikan				572.214.810.000		572.114.810.000		575.214.810.000		588.214.810.000		588.214.810.000		2.307.759.240.000		
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	0 %	51,85 %	5.320.139.900	51,90 %	5.320.139.900	51,95 %	5.370.139.900	52,01 %	5.370.139.900	52,01 %	21.380.559.600			Dinas Pendidikan	
		Persentase PAUD Terakreditasi B	0 %	35,76 %	10.394.603.650	35,79 %	10.394.603.650	35,83 %	10.394.603.650	35,87 %	10.394.603.650	35,87 %	41.578.414.600				
		Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	0 %	67,38 %	46.635.704.000	67,45 %	46.560.704.000	67,52 %	49.255.704.000	67,59 %	62.255.704.000	67,59 %	204.707.816.000				
		Persentase SD Terakreditasi A	0 %	60,26 %	55.514.180.000	60,32 %	55.489.180.000	60,38 %	55.564.180.000	60,44 %	55.564.180.000	60,44 %	222.131.720.000				
		Persentase SMP Terakreditasi A	0 %	58,19 %	35.978.305.000	58,25 %	35.978.305.000	58,31 %	36.008.305.000	58,37 %	36.008.305.000	58,37 %	143.973.220.000				
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum	0 %	100 %	25.099.000	100 %	25.099.000	100 %	50.099.000	100 %	50.099.000	100 %	150.396.000	Dinas Pendidikan			
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Capaian Kualitas Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar	0 %	51,45 %	375.527.220	51,50 %	375.527.220	51,55 %	375.527.220	51,61 %	375.527.220	51,61 %	1.502.108.880	Dinas Pendidikan			
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	0 %	25,03 %	25.000.000	25,05 %	25.000.000	25,08 %	50.000.000	25,10 %	50.000.000	25,10 %	150.000.000	Dinas Pendidikan			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	417.946.251.230	100 %	417.946.251.230	100 %	418.146.251.230	100 %	418.146.251.230	100 %	1.672.185.004.920	Dinas Pendidikan			
	Urusan Kesehatan				413.010.514.000		412.922.409.000		420.013.191.000		425.744.419.000		1.671.690.533.000				
	Dinas Kesehatan				413.010.514.000		412.922.409.000		420.013.191.000		425.744.419.000		1.671.690.533.000				
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Faskes dengan SIK terinteraksi	0 Persen	100 Persen	161.871.200	100 Persen	161.871.200	100 Persen	258.088.200	100 Persen	358.088.200	100 Persen	939.918.800			Dinas Kesehatan	
		Cakupan Kinerja Layanan P2P	0 Persen	100 Persen	637.812.000	100 Persen	637.812.000	100 Persen	802.812.000	100 Persen	802.812.000	100 Persen	2.881.248.000				
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	0 Persen	70,9 Persen	3.112.880.000	78 Persen	3.112.880.000	88 Persen	3.295.880.000	100 Persen	3.295.880.000	100 Persen	12.817.520.000				
		Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	0 Persen	25,1 Persen	1.969.659.000	34,6 Persen	1.969.659.000	43,3 Persen	2.819.659.000	52,0 Persen	2.819.659.000	52,0 Persen	9.578.636.000				
		Cakupan penelitian kesehatan	0 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	60.000.000				
		Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk.Kota yang diberi ijin	0 Persen	100 Persen	505.698.000	100 Persen	505.698.000	100 Persen	531.517.000	100 Persen	531.517.000	100 Persen	2.074.430.000				
		Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	0 Persen	100 Persen	14.835.257.900	100 Persen	14.835.257.900	100 Persen	14.835.257.900	100 Persen	14.955.257.900	100 Persen	59.461.031.600				
		Indeks Keluarga Sehat	0 Poin	0,4 Poin	100.000.000	0 Poin	100.000.000	0 Poin	100.000.000	1 Poin	100.000.000	1 Poin	400.000.000				
		Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	0 Persen	100 Persen	2.421.431.000	100 Persen	2.421.431.000	100 Persen	2.421.431.000	100 Persen	2.421.431.000	100 Persen	9.685.724.000				
		Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	0 Persen	82,0 Persen	19.178.859.000	84 Persen	19.178.859.000	86 Persen	19.178.859.000	88 Persen	19.278.859.000	88 Persen	76.815.436.000				
		Rasio Faskes terhadap penduduk	0 Persen	1,1 Persen	94.266.822.635	1,1 Persen	44.178.717.635	1,1 Persen	49.378.717.635	1,1 Persen	54.378.717.635	1,1 Persen	242.202.975.540				
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	0 Persen	91 Persen	154.998.000	94 Persen	154.998.000	97 Persen	209.962.000	100 Persen	209.962.000	100 Persen	729.920.000	Dinas Kesehatan			
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	0 Persen	77 Persen	341.300.000	80 Persen	341.300.000	83 Persen	446.300.000	87 Persen	446.300.000	88 Persen	1.575.200.000	Dinas Kesehatan			
01.02.05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	0 Persen	25 Persen	1.163.181.000	50 Persen	1.163.181.000	75 Persen	1.163.181.000	100 Persen	1.247.181.000	100 Persen	4.736.724.000	Dinas Kesehatan			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	274.145.744.265	100 Persen	324.145.744.265	100 Persen	324.556.526.265	100 Persen	324.883.754.265	100 Persen	1.247.731.769.060	Dinas Kesehatan			
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				254.241.921.000		259.341.921.000		298.541.921.000		315.041.921.000		320.424.194.000				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				254.241.921.000		259.341.921.000		298.541.921.000		315.041.921.000		320.424.194.000				

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	0 %	25 %	47.173.350.000	25 %	48.324.350.000	25,10 %	49.424.350.000	25,20 %	50.774.350.000	25,20 %	195.696.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0 %	71 %	1.137.800.000	80 %	1.167.800.000	61 %	1.287.800.000	71 %	1.797.800.000	71 %	5.391.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	0 %	18,10 %	22.159.900.000	19,19 %	23.709.900.000	20,27 %	26.959.900.000	21,36 %	26.959.900.000	21,36 %	99.789.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	0 %	66,77 %	58.469.666.000	68,08 %	59.469.666.000	72,48 %	69.219.666.000	80,03 %	71.269.666.000	80,03 %	258.428.664.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	0 %	32,46 %	21.671.000.000	49,12 %	19.536.000.000	65,79 %	35.195.000.000	82,46 %	45.936.000.000	82,46 %	122.338.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	0 %	16,67 %	14.025.000.000	50 %	14.025.000.000	66,67 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	28.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	0 %	42,37 %	200.000.000	42,37 %	135.000.000	42,37 %	160.000.000	42,37 %	180.000.000	42,37 %	675.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	0 %	25 %	51.313.000.000	50 %	51.162.000.000	75 %	62.462.000.000	100 %	63.012.000.000	100 %	227.949.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	0 %	56,67 %	12.331.651.000	57,26 %	15.231.651.000	58,01 %	19.031.651.000	58,79 %	20.181.651.000	58,79 %	66.776.604.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	0 %	61,63 %	12.491.446.000	62,05 %	13.291.446.000	62,48 %	21.191.446.000	62,92 %	21.291.446.000	62,86 %	68.265.784.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	0 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	140.000.000	100 %	140.000.000	100 %	480.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang perangkat daerah	0 %	9,78 %	13.169.108.000	29,34 %	13.189.108.000	58,68 %	13.445.108.000	97,80 %	13.474.108.000	97,80 %	53.277.432.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				34.079.231.000		33.029.231.000		37.579.231.000		40.079.231.000		138.854.724.000		
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				34.079.231.000		33.029.231.000		37.579.231.000		40.079.231.000		138.854.724.000		
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang ditangani Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	0 %	100 %	510.000.000	100 %	410.000.000	100 %	410.000.000	100 %	1.910.000.000	100 %	3.240.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	0 %	25 %	9.800.000.000	50 %	9.800.000.000	75 %	10.800.000.000	100 %	8.800.000.000	100 %	39.200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 %	20,00 %	12.322.431.000	40,00 %	11.147.431.000	70,00 %	13.697.431.000	100 %	15.177.431.000	100 %	52.344.724.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 %	1,36 %	2.000.000.000	2,63 %	2.325.000.000	3,89 %	2.325.000.000	5,15 %	2.325.000.000	5,15277696 %	8.975.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	5.886.800.000	100 %	5.886.800.000	100 %	5.886.800.000	100 %	5.906.800.000	100 %	23.567.200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				25.330.461.000		25.730.461.000		26.030.461.000		26.430.461.000		113.594.844.000		
	Satuan Polisi Pamong Praja				15.894.752.000		16.394.752.000		16.394.752.000		16.594.752.000		65.279.008.000		
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86	93 %	175.000.000	94 %	240.000.000	95 %	215.000.000	96 %	215.000.000	96 %	845.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Presentase PPNS Yang di Bina	0 %	80 %	25.000.000	81 %	45.000.000	82 %	45.000.000	83 %	45.000.000	83 %	160.000.000		
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	80	100 %	3.813.600.000	100 %	4.114.600.000	100 %	3.915.600.000	100 %	3.916.600.000	100 %	15.760.400.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	11.881.152.000	100 %	11.995.152.000	100 %	12.219.152.000	100 %	12.418.152.000	100 %	48.513.608.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9.435.709.000		9.335.709.000		9.635.709.000		9.835.709.000		48.315.836.000		
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana, Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	0 Persen	100 Persen	2.005.000.000	100 Persen	1.915.000.000	100 Persen	1.954.000.000	100 Persen	2.125.000.000	100 Persen	7.999.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	0 Persen	86 Persen	550.000.000	86 Persen	540.000.000	86,5 Persen	788.000.000	86,5 Persen	807.000.000	86,5 Persen	2.685.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 Persen	100 Persen	6.880.709.000	100 Persen	6.880.709.000	100 Persen	6.893.709.000	100 Persen	6.903.709.000	100 Persen	27.558.836.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Urusan Sosial				17.790.059.000		18.290.059.000		19.640.059.000		20.175.059.000		75.895.236.000		
	Dinas Sosial				17.790.059.000		18.290.059.000		19.640.059.000		20.175.059.000		75.895.236.000		
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	0 Persen	100 Persen	3.550.000.000	100 Persen	4.050.000.000	100 Persen	4.360.000.000	100 Persen	4.360.000.000	100 Persen	16.320.000.000	Dinas Sosial	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	0 Persen	100 Persen	5.955.000.000	100 Persen	5.955.000.000	100 Persen	6.025.000.000	100 Persen	6.025.000.000	100 Persen	23.960.000.000	Dinas Sosial	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	0 Persen	100 Persen	275.000.000	100 Persen	275.000.000	100 Persen	275.000.000	100 Persen	425.000.000	100 Persen	1.250.000.000		
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Aktif	0 Persen	100 Persen	1.850.000.000	100 Persen	1.850.000.000	100 Persen	1.850.000.000	100 Persen	1.850.000.000	100 Persen	7.400.000.000	Dinas Sosial	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	350.000.000	100 Persen	1.100.000.000	Dinas Sosial	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	5.910.059.000	100 Persen	5.910.059.000	100 Persen	6.880.059.000	100 Persen	7.165.059.000	100 Persen	25.865.236.000	Dinas Sosial	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar														
	Urusan Tenaga Kerja				6.911.973.000		6.911.973.000		7.561.973.000		7.761.973.000		29.147.892.000		
	Dinas Tenaga Kerja				6.911.973.000		6.911.973.000		7.561.973.000		7.761.973.000		29.147.892.000		
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	0 %	4 %	100.000.000	5 %	80.000.000	8 %	100.000.000	12 %	100.000.000	12 %	380.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0 %	5 %	685.000.000	6 %	705.000.000	7 %	1.075.000.000	8 %	1.125.000.000	8 %	3.590.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0 %	27 %	415.000.000	29 %	415.000.000	31 %	525.000.000	33 %	525.000.000	33 %	1.880.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan)	0 %	54,25 %	450.000.000	54,50 %	450.000.000	54,75 %	500.000.000	55 %	500.000.000	55 %	1.900.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	5.261.973.000	100 %	5.261.973.000	100 %	5.361.973.000	100 %	5.511.973.000	100 %	21.397.892.000	Dinas Tenaga Kerja	
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				44.310.139.000		44.310.139.000		44.960.139.000		45.160.139.000				
	Urusan Ketahanan Pangan				2.100.000.000		2.200.000.000		2.050.000.000		1.800.000.000		62.838.400.000		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				2.100.000.000		2.200.000.000		2.050.000.000		1.800.000.000		36.494.200.000		
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	0 Unit	1 Unit	300.000.000	2 Unit	400.000.000	1 Unit	250.000.000	0 Unit	-	4 Unit	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	0 %	110,7 %	1.350.000.000	110,8 %	1.350.000.000	110,9 %	1.350.000.000	111 %	1.350.000.000	111 %	5.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	0 %	15 %	300.000.000	15 %	300.000.000	20 %	300.000.000	20 %	300.000.000	20 %	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	0 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Urusan Kelautan dan Perikanan				8.044.200.000		8.400.000.000		8.900.000.000		8.400.000.000		47.268.400.000		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				8.044.200.000		8.400.000.000		8.900.000.000		8.400.000.000		37.664.200.000		
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	0 Ton	10000 Ton	7.094.200.000	10100 Ton	7.450.000.000	10200 Ton	7.950.000.000	10300 Ton	7.450.000.000	10300 Ton	29.944.200.000		
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan Produksi produk hasil olahan perikanan	0 Kg/Kap/Tahun	22,25 Kg/Ka p/Tahun	-	22,5 Kg/Kap /Tahun	-	22,75 Kg/Ka p/Tahun	-	23 Kg/Kap/T ahun	-	23 Kg/Kap/Tahun	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Urusan Pertanian				34.165.939.000		33.710.139.000		34.010.139.000		34.960.139.000		136.886.356.000		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				34.165.939.000		33.710.139.000		34.010.139.000		34.960.139.000		136.846.356.000		
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak Produksi Hortikultura dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan	0 %	1 %	2.250.000.000	1 %	2.250.000.000	1 %	2.454.200.000	1 %	3.250.000.000	1 %	10.204.200.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka Produksi Hasil peternakan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	0 Ton	10350 Ton	1.000.000.000	10400 Ton	1.000.000.000	10450 Ton	1.500.000.000	10500 Ton	1.500.000.000	10500 Ton	5.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	0 %	100 %	620.000.000	100 %	620.000.000	100 %	620.000.000	100 %	620.000.000	100 %	2.480.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	0 %	75 %	200.000.000	75 %	200.000.000	75 %	200.000.000	75 %	200.000.000	75 %	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	0 izin	3 izin	40.000.000	3 izin	40.000.000	3 izin	40.000.000	3 izin	40.000.000	12 izin	160.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	0 %	4,5 %	1.250.000.000	5 %	1.000.000.000	5 %	1.000.000.000	5 %	1.000.000.000	19,5 %	4.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	20.405.939.000	100 %	19.300.139.000	100 %	19.295.939.000	100 %	19.245.939.000	100 %	78.247.956.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Urusan Lingkungan Hidup				36.198.881.000		33.298.881.000		37.198.881.000		37.398.881.000		144.642.524.000		
	Dinas Lingkungan Hidup				36.198.881.000		33.298.881.000		37.198.881.000		37.398.881.000		144.095.524.000		
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah; Persentase Penanganan Sampah	0 %	27; 72 %	15.068.000.000	28; 71 %	13.838.000.000	30; 70 %	15.108.000.000	30; 70 %	15.050.000.000	30; 70 %	59.064.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	0 %	100 %	400.000.000	100 %	100.000.000	100 %	450.000.000	100 %	200.000.000	100 %	1.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara	0 Point; Point	53,70; 80 Point; Point	850.000.000	53,75; 80,5 Point; Point	750.000.000	53,80; 81 Point; Point	685.000.000	53,85; 81,5 Point; Point	685.000.000	53,85; 81,5 Point; Point	2.970.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola; Indeks Kualitas Lahan	0 %;point	100;24,360 %;point	2.500.000.000	100;24,360 %;point	1.400.000.000	100;24,360 %;point	3.675.000.000	100;24,360 %;point	3.675.000.000	100;24,360 %;point	11.250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	0 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan diawasi Implementasinya	0 %	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	0 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	16.960.881.000	100 %	16.790.881.000	100 %	16.860.881.000	100 %	17.368.881.000	100 %	67.981.524.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				11.477.332.000		11.477.332.000		11.677.332.000		11.877.332.000		10.882.935.000		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				11.477.332.000		11.477.332.000		11.677.332.000		11.877.332.000		9.782.935.000		
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	0 %	97 %	760.000.000	98 %	705.000.000	98,5 %	755.000.000	99 %	780.000.000	99 %	3.000.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	0 %	99,03 %	630.000.000	99,07 %	610.000.000	99,10 %	630.000.000	99,13 %	635.000.000	99,13 %	2.505.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 %	100 %	667.500.000	100 %	682.500.000	100 %	578.750.000	100 %	518.750.000	100 %	2.447.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	0 %	100 %	22.500.000	100 %	22.500.000	100 %	22.500.000	100 %	45.000.000	100 %	112.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	9.397.332.000	100 %	9.457.332.000	100 %	9.691.082.000	100 %	9.898.582.000	100 %	38.444.328.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				18.713.405.000		18.713.405.000		18.913.405.000		19.113.405.000		76.036.620.000		
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.880.000.000		1.895.000.000		2.021.000.000		1.921.000.000		6.495.000.000		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.880.000.000		1.895.000.000		2.021.000.000		1.921.000.000		6.495.000.000		
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase capaian PUG SKPD yang Responsif Gender	0 persen	100 persen	170.000.000	100 persen	195.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	765.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	0 persen	100 persen	805.000.000	100 persen	830.000.000	100 persen	830.000.000	100 persen	830.000.000	100 persen	3.295.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	0 persen	100 persen	75.000.000	0 persen	-	100 persen	100.000.000	0 persen	-	100 persen	175.000.000		
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus	0 persen	100 persen	220.000.000	100 persen	225.000.000	100 persen	226.000.000	100 persen	226.000.000	100 persen	897.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pembinaan Lembaga yang Peduli dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)	0 persen	100 persen	190.000.000	100 persen	195.000.000	100 persen	195.000.000	100 persen	195.000.000	100 persen	775.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus anak	0 persen	100 persen	420.000.000	100 persen	450.000.000	100 persen	470.000.000	100 persen	470.000.000	100 persen	1.810.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				16.833.405.000		16.818.405.000		16.892.405.000		17.192.405.000		69.541.620.000		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				16.833.405.000		16.818.405.000		16.892.405.000		17.192.405.000		67.736.620.000		
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	0 Dokumen	1 Dokumen	695.950.000	1 Dokumen	525.950.000	1 Dokumen	535.950.000	1 Dokumen	835.950.000	1 Dokumen	2.593.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Persentase Kepesertaan KB MKJP	0 persen	100 persen	5.468.643.000	100 persen	5.543.643.000	100 persen	5.553.643.000	100 persen	5.553.643.000	100 persen	22.119.572.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02.14.03	BERENCANA (KB)	Persentase Kepesertaan Unmet Need	0 persen	13,5 persen	- 13,25 persen	-	13 persen	-	12,75 persen	-	12,75 persen	-	-	Berencana, Pemberdayaan	
02.14.04	PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Anggota BKB yang ber-KB	0 persen	82,53 persen	4.995.960.000	83,03 persen	4.995.960.000	83,53 persen	5.005.960.000	84,03 persen	5.005.960.000	84,03 persen	20.003.840.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Cakupan Anggota BKL yang ber KB	0 persen	74,97 persen	- 75,47 persen	-	75,97 persen	-	76,47 persen	-	76,47 persen	-	-	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Cakupan Anggota BKR yang ber KB	0 persen	76,61 persen	- 77,11 persen	-	77,61 persen	-	78,11 persen	-	78,11 persen	-	-	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 persen	100 persen	5.672.852.000	100 persen	5.752.852.000	100 persen	5.796.852.000	100 persen	5.796.852.000	100 persen	23.019.408.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Urusan Perhubungan				48.520.499.000		48.522.499.000		48.722.499.000		48.922.499.000		198.937.996.000		
	Dinas Perhubungan				48.520.499.000		48.522.499.000		48.722.499.000		48.922.499.000		194.687.996.000		
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	0 %	57,14 %	7.435.000.000	58,93 %	7.985.000.000	60,71 %	7.935.000.000	62,50 %	7.935.000.000	62,50 %	31.290.000.000	Dinas Perhubungan	
		Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	0 %	77,32 %	3.655.000.000	78,32 %	1.755.000.000	79,82 %	1.555.000.000	81,82 %	1.455.000.000	81,82 %	8.420.000.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 persen	100 persen	37.430.499.000	100 persen	38.782.499.000	100 persen	39.232.499.000	100 persen	39.532.499.000	100 persen	154.977.996.000	Dinas Perhubungan	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				18.007.775.000		18.007.775.000		18.207.775.000		18.407.775.000		72.631.100.000		
	Urusan Komunikasi dan Informatika				17.307.775.000		17.207.775.000		17.577.775.000		17.582.775.000		69.676.100.000		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				17.307.775.000		17.207.775.000		17.577.775.000		17.582.775.000		69.676.100.000		
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	0 %	Informatif (80%) %	1.000.000.000	Informatif (81%) %	1.060.000.000	Informatif (82%) %	1.085.000.000	Informatif (83%) %	1.105.000.000	Informatif (83%) %	4.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	0 %	100 %	1.000.000.000	100 %	1.060.000.000	100 %	1.085.000.000	100 %	1.105.000.000	100 %	4.250.000.000		
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0 %	60 %	9.845.000.000	65 %	9.900.000.000	70 %	9.830.000.000	75 %	10.050.000.000	75 %	39.625.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	6.462.775.000	100 %	6.247.775.000	100 %	6.662.775.000	100 %	6.427.775.000	100 %	25.801.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Urusan Statistik				300.000.000		300.000.000		270.000.000		350.000.000		1.220.000.000		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				300.000.000		300.000.000		270.000.000		350.000.000		1.220.000.000		
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	270.000.000	100 %	350.000.000	100 %	1.220.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Urusan Persandian				400.000.000		500.000.000		360.000.000		475.000.000		1.735.000.000		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				400.000.000		500.000.000		360.000.000		475.000.000		1.735.000.000		
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	0 %	41 %	400.000.000	41,50 %	500.000.000	42 %	360.000.000	42,50 %	475.000.000	42,50 %	1.735.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				34.173.315.000		34.173.315.000		36.423.315.000		36.623.315.000		141.393.260.000	-	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah,				19.954.550.000		19.954.550.000		20.704.550.000		20.904.550.000		81.518.200.000		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				19.954.550.000		19.954.550.000		20.704.550.000		20.904.550.000		81.518.200.000		
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	0 %	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	60.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi aktif	0 %	1 %	700.000.000	1 %	700.000.000	1 %	700.000.000	1 %	700.000.000	4 %	2.800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	0 %	6 %	350.000.000	6 %	350.000.000	6 %	350.000.000	6 %	350.000.000	24 %	1.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kompeten	0 %	25 %	300.000.000	25 %	300.000.000	25 %	550.000.000	25 %	550.000.000	100 %	1.700.000.000		
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	0 %	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	25 %	500.000.000	100 %	2.000.000.000		
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	0 %	2 %	1.100.000.000	2 %	1.100.000.000	2 %	1.100.000.000	2 %	1.100.000.000	8 %	4.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	0 %	5 %	600.000.000	5 %	600.000.000	5 %	850.000.000	5 %	850.000.000	20 %	2.900.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
														-	
0,09518519	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.400.000.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	16.039.550.000	100 %	16.039.550.000	100 %	16.289.550.000	100 %	16.489.550.000	100 %	64.858.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Urusan Perdagangan				10.768.765.000		10.768.765.000		11.768.765.000		11.768.765.000		45.075.060.000		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				10.768.765.000		10.768.765.000		11.768.765.000		11.768.765.000		45.075.060.000		
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	0 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	0 %	70 %	7.903.765.000	80 %	7.903.765.000	90 %	8.653.765.000	100 %	8.653.765.000	100 %	33.115.060.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	0 %	40 %	190.000.000	40 %	190.000.000	40 %	190.000.000	40 %	190.000.000	40 %	760.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	0 %	1 %	1.550.000.000	1 %	1.550.000.000	1 %	1.550.000.000	1 %	1.550.000.000	4 %	6.200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertera sah	0 %	80 %	425.000.000	80 %	425.000.000	80 %	475.000.000	80 %	475.000.000	80 %	1.800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	0 %	10 %	550.000.000	10 %	550.000.000	10 %	750.000.000	10 %	750.000.000	10 %	2.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Urusan Perindustrian				3.450.000.000		3.450.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		14.800.000.000		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				3.450.000.000		3.450.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		14.800.000.000		
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	0 %	5 %	2.950.000.000	5 %	2.950.000.000	5 %	3.450.000.000	5 %	3.450.000.000	20 %	12.800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	0 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	0 %	5 %	350.000.000	5 %	350.000.000	5 %	350.000.000	5 %	350.000.000	20 %	1.400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
													-		
	Urusan Penanaman Modal				9.418.374.000		9.418.374.000		9.918.374.000		10.318.374.000		39.073.496.000		
	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu				9.418.374.000		9.418.374.000		9.918.374.000		10.318.374.000		39.073.496.000		
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	0 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	800.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	0 miliar	1242 miliar	350.000.000	1304 miliar	350.000.000	1369 miliar	350.000.000	1430 miliar	350.000.000	1501 miliar	1.400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	0 %	100 %	1.150.000.000	100 %	1.150.000.000	100 %	1.100.000.000	100 %	1.100.000.000	100 %	4.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	0 %	100 %	419.695.000	100 %	419.695.000	100 %	399.695.000	100 %	399.695.000	100 %	1.638.780.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	0 %	25 %	25.000.000	25 %	25.000.000	25 %	25.000.000	25 %	25.000.000	100 %	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	0 %	75 %	75.000.000	75 %	75.000.000	75 %	75.000.000	75 %	75.000.000	75 %	300.000.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	7.198.679.000	100 %	7.198.679.000	100 %	7.768.679.000	100 %	8.168.679.000	100 %	30.334.716.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
													-		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				21.635.454.000		21.435.454.000		21.985.454.000		27.185.454.000		92.241.816.000		
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				17.173.144.600		16.639.190.000		17.240.580.000		23.290.580.000		74.343.494.600		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				17.173.144.600		16.639.190.000		17.240.580.000		23.290.580.000		74.343.494.600		
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	0 %	29,67 %	1.430.000.000	30,77 %	1.306.200.000	31,87 %	1.471.200.000	32,97 %	1.505.200.000	32,97 %	5.712.600.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	0 %	34,15 %	8.709.120.000	36,59 %	8.240.980.000	39,02 %	8.749.980.000	41,46 %	14.983.220.000	41,46 %	40.683.300.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	7.034.024.600	100 %	7.092.010.000	100 %	7.019.400.000	100 %	6.802.160.000	100 %	27.947.594.600	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	Urusan Kebudayaan				2.269.487.258		2.521.390.000		2.835.000.000		1.950.000.000		9.575.877.258		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				2.269.487.258		2.521.390.000		2.835.000.000		1.950.000.000		9.575.877.258		
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	0 %	63,73 %	1.040.392.258	68,63 %	1.417.295.000	73,53 %	1.660.000.000	78,43 %	950.000.000	78,43 %	5.067.687.258	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	0 %	25 %	979.095.000	25 %	979.095.000	25 %	1.050.000.000	25 %	875.000.000	100 %	3.883.190.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	0 %	25 %	50.000.000	25 %	25.000.000	25 %	25.000.000	25 %	25.000.000	100 %	125.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	0 %	46,15 %	200.000.000	53,85 %	100.000.000	61,54 %	100.000.000	69,23 %	100.000.000	69,23 %	500.000.000		
	Urusan Pariwisata				2.192.822.142		2.274.874.000		1.909.874.000		1.944.874.000		8.322.444.142		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				2.192.822.142		2.274.874.000		1.909.874.000		1.944.874.000		8.322.444.142		
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0 %	59,18 %	444.521.142	61,22 %	555.000.000	63,27 %	180.000.000	65,31 %	205.000.000	65,31 %	1.384.521.142	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	0 Orang	443505 Orang	258.427.000	542625 Orang	430.000.000	641746 Orang	465.000.000	740866 Orang	475.000.000	2368742 Orang	1.628.427.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 %	53,33 %	1.489.874.000	56,67 %	1.289.874.000	60,00 %	1.264.874.000	63,33 %	1.264.874.000	63,33 %	5.309.496.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
														-	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				7.439.714.000		7.439.714.000		7.639.714.000		7.839.714.000		30.358.856.000		
	Urusan Perpustakaan				7.034.714.000		7.034.714.000		7.164.714.000		7.334.714.000		28.568.856.000		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				7.034.714.000		7.034.714.000		7.164.714.000		7.334.714.000		28.568.856.000		
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan	5,53 %	4,42%	65.000.000	4,42%	65.000.000	4,42%	69.000.000	4,42%	70.000.000	17,68%	269.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
		Persenatse kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan		38,00%	895.000.000	39,00%	860.000.000	40,00%	952.500.000	41,00%	965.000.000	41,00%	3.672.500.000		
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	0 %	23,81 %	5.000.000	26,19 %	40.000.000	23,81 %	5.000.000	26,19 %	50.000.000	100 %	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	6.069.714.000	100 %	6.069.714.000	100 %	6.138.214.000	100 %	6.249.714.000	100 %	24.527.356.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
	Urusan Kearsipan				405.000.000		405.000.000		475.000.000		505.000.000		1.790.000.000		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				405.000.000		405.000.000		475.000.000		505.000.000		1.790.000.000		
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	0 %	37,48 %	175.000.000	47,24 %	175.000.000	55,98 %	205.000.000	60,00 %	210.000.000	60,00 %	765.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	0 %	77,78 %	230.000.000	86,11 %	230.000.000	91,67 %	270.000.000	100,00 %	295.000.000	100,00 %	1.025.000.000		
	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan				148.511.552.000		148.511.552.000		152.911.552.000		153.111.552.000		603.046.208.000		
	Sekretariat Daerah				81.909.434.000		81.909.434.000		84.309.434.000		84.509.434.000		332.637.736.000		
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	0 %	100 %	26.601.273.300	100 %	26.601.273.300	100 %	26.697.773.300	100 %	26.651.273.300	100 %	106.551.593.200	Sekretariat Daerah	
		Persentasi Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	0 %	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	715.000.000	100 %	650.000.000	100 %	2.665.000.000		
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	0 %	100 %	1.093.478.000	100 %	1.093.478.000	100 %	1.202.825.800	100 %	1.094.478.000	100 %	4.484.259.800		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indek Kematangan UKPBJ	0 Level	3 Level	1.732.500.000	4 Level	1.732.500.000	5 Level	1.732.500.000	5 Level	1.732.500.000	5 Level	6.930.000.000	Sekretariat Daerah	
		Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0 %	100 %	1.265.000.000	100 %	1.265.000.000	100 %	1.563.900.000	100 %	1.295.000.000	100 %	5.388.900.000		
		Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	0 %	100 %	1.504.000.000	100 %	1.504.000.000	100 %	1.504.000.000	100 %	1.504.000.000	100 %	6.016.000.000		

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian IKM Perangkat Daerah Setda	0 %	BAIK	188.000.000	BAIK	188.000.000	BAIK	188.000.000	BAIK	188.000.000	BAIK	752.000.000	Sekretariat Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Setda		A	529.000.000	A	529.000.000	A	604.000.000	A	644.000.000	A			
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	48.346.182.700	100 %	48.346.182.700	100 %	50.101.434.900	100 %	50.750.182.700	100 %	197.543.983.000	Sekretariat Daerah	
	Sekretariat DPRD				66.602.118.000		66.602.118.000		68.602.118.000		68.602.118.000		270.408.472.000		
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD	0 %	100 %	1.694.364.400	100 %	1.694.364.400	100 %	1.694.364.400	100 %	1.694.364.400	100 %	6.777.457.600	Sekretariat DPRD	
		Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	0 %	100 %	3.822.364.094	100 %	3.822.364.094	100 %	3.822.364.094	100 %	4.822.364.094	100 %	16.289.456.376		
		Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD	0 %	100 %	8.867.222.590	100 %	8.867.222.590	100 %	8.867.222.590	100 %	9.867.222.590	100 %	36.468.890.360		
		Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	0 %	100 %	4.492.416.800	100 %	4.492.416.800	100 %	4.492.416.800	100 %	4.492.416.800	100 %	17.969.667.200		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	47.725.750.116	100 %	47.725.750.116	100 %	49.725.750.116	100 %	47.725.750.116	100 %	192.903.000.464	Sekretariat DPRD	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				16.694.034.000		16.194.034.000		16.752.934.000		16.773.234.000		66.414.236.000		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan				15.544.034.000		14.844.034.000		15.302.934.000		15.523.234.000		61.214.236.000		
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				15.544.034.000		14.844.034.000		15.302.934.000		15.523.234.000		61.214.236.000		
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/ RPJMD	0 Persen	100 Persen	1.165.000.000	100 Persen	1.270.500.000	100 Persen	1.407.000.000	100 Persen	1.533.000.000	100 Persen	5.375.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berpredikat minimal baik	0 Persen	80 Persen	353.400.000	83 Persen	387.093.000	86 Persen	425.801.000	90 Persen	468.404.000	90 Persen	1.634.698.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Prosentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	0 Persen	100 Persen	1.393.500.000	100 Persen	1.440.121.000	100 Persen	1.549.460.000	100 Persen	1.636.830.000	100 Persen	6.019.911.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	12.632.134.000	100 Persen	11.746.320.000	100 Persen	11.920.673.000	100 Persen	11.885.000.000	100 Persen	48.184.127.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan				1.150.000.000		1.350.000.000		1.450.000.000		1.250.000.000		5.200.000.000		
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				1.150.000.000		1.350.000.000		1.450.000.000		1.250.000.000		5.200.000.000		

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Innovation Government Award (IGA)	0 Buah	10 Buah	450.000.000	11 Buah	450.000.000	12 Buah	450.000.000	13 Buah	450.000.000	55 Buah	1.800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	0 Persen	85 Persen	700.000.000	90 Persen	900.000.000	95 Persen	1.000.000.000	100 Persen	800.000.000	100 Persen	3.400.000.000		
								-				-		-	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan				52.801.255.795			53.463.679.335		59.561.138.890		60.183.747.455		226.009.821.475	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				28.802.296.000			29.042.774.000		33.918.288.000		34.018.951.000		125.782.309.000	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0 %	100 %	14.562.550.000	100 %	14.803.028.000	100 %	19.453.542.000	100 %	19.554.205.000	100 %	68.373.325.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	0 %	100 %	1.900.000.000	100 %	1.900.000.000	100 %	2.050.000.000	100 %	2.050.000.000	100 %	7.900.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	12.339.746.000	100 %	12.339.746.000	100 %	12.414.746.000	100 %	12.414.746.000	100 %	49.508.984.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
													-		
	Badan Pengelola Pendapatan				23.998.959.795			24.420.905.335		25.642.850.890		26.164.796.455		100.227.512.475	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian PAD bukan pajak daerah	0 %	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	255.000.000	Badan Pendapatan Daerah	
		Capaian Pajak Daerah	0 %	100 %	4.426.023.078	100 %	4.473.532.475	100 %	5.075.166.869	100 %	5.122.801.266	100 %	19.097.523.688		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	19.512.936.717	100 %	19.882.372.860	100 %	20.502.684.021	100 %	20.976.995.189	100 %	80.874.988.787	Badan Pendapatan Daerah	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaiuan, Pendidikan dan Pelatihan				15.661.669.000			15.661.669.000		16.661.669.000		16.761.669.000		64.746.676.000	
	Badan Kepegawaiuan, Pengembangan Sumber Daya Manusia				15.661.669.000			15.661.669.000		16.661.669.000		16.761.669.000		64.746.676.000	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	0 %	100 %	1.250.000.000	100 %	1.300.000.000	100 %	1.450.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	5.500.000.000	Badan Kepegawaiuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Persentase capaian pelayanan kepegawaiuan	0 %	100 %	358.000.000	100 %	359.000.000	100 %	360.000.000	100 %	364.000.000	100 %	1.441.000.000		
		Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan peranannya disiplin	0 %	100 %	577.000.000	100 %	602.000.000	100 %	632.000.000	100 %	657.000.000	100 %	2.468.000.000		
		Persentase PNS yang terpatakannya kompetensinya	0 %	7 %	1.125.000.000	12 %	1.150.000.000	18 %	1.399.000.000	25 %	1.400.000.000	35 %	5.074.000.000		
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	0 %	17 %	2.140.000.000	18 %	2.040.000.000	19 %	2.290.000.000	20 %	2.290.000.000	20 %	8.760.000.000	Badan Kepegawaiuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	10.211.669.000	100 %	10.210.669.000	100 %	10.530.669.000	100 %	10.550.669.000	100 %	41.503.676.000	Badan Kepegawaiuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan				16.386.617.000			16.386.617.000		16.686.617.000		16.686.617.000		66.146.468.000	
	Inspektorat				16.386.617.000			16.386.617.000		16.686.617.000		16.686.617.000		66.146.468.000	
	PROGRAM PENVRI FNUGARAN	Level Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	0 level	2 level	264.043.067	2 level	267.543.066	3 level	269.209.732	3 level	269.209.732	3 level	1.070.005.597		
		Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	0 level	2 level	264.043.067	2 level	267.543.066	3 level	269.209.732	3 level	269.209.732	3 level	1.070.005.597		
		Level Pemenuhan Elemen praktik Pengelolaan SDM	0 level	2 level	264.043.067	2 level	267.543.070	3 level	269.209.740	3 level	269.209.740	3 level	1.070.005.617		

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
06.01.02	PROGRAM PENGETAHUAN DAN KETAHANAN PENGAWASAN	Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	0 level	2 level	264.043.067	2 level	267.543.066	3 level	269.209.732	3 level	269.209.732	3 level	1.070.005.597	Inspektorat	
		Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	0 level	2 level	264.043.066	2 level	267.543.066	3 level	269.209.732	3 level	269.209.732	3 level	1.070.005.596		
		Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	0 level	2 level	264.043.066	2 level	267.543.066	3 level	269.209.732	3 level	269.209.732	3 level	1.070.005.596		
		% Penanganan kasus	0 %	100 %	349.460.700	100 %	350.000.000	100 %	355.000.000	100 %	355.000.000	100 %	1.409.460.700		
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	0 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	200.000.000	Inspektorat	
		Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	0 level	3 level	839.280.900	3 level	841.616.600	3 level	1.187.741.600	3 level	1.187.741.600	3 level	4.056.380.700		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	13.563.617.000	100 %	13.539.742.000	100 %	13.478.617.000	100 %	13.478.617.000	85,80 - 88,30 (baik) point / Kategori	54.060.593.000	Inspektorat	
	Pemerintahan Umum Kewilayah				110.413.119.000		110.413.119.000		123.014.059.000		124.923.759.000		468.764.056.000		
	Kecamatan Cihideung				9.685.065.000		9.685.065.000		10.870.465.000		11.054.865.000		41.295.460.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	0 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	106.000.000	100 Persen	110.000.000	100 Persen	416.000.000	Kecamatan Cihideung	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 Persen	100 Persen	2.986.100.000	100 Persen	2.986.100.000	100 Persen	3.938.850.000	100 Persen	4.046.530.000	100 Persen	13.957.580.000	Kecamatan Cihideung	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Cihideung	0 Persen	100 Persen	80.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	82.000.000	100 Persen	83.000.000	100 Persen	325.000.000	Kecamatan Cihideung	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 Persen	100 Persen	107.000.000	100 Persen	107.000.000	100 Persen	114.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	453.000.000	Kecamatan Cihideung	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	6.411.965.000	100 %	6.411.965.000	100 %	6.629.615.000	100 %	6.690.335.000	100 %	26.143.880.000	Kecamatan Cihideung	
	Kecamatan Cipedes				8.879.136.000		8.879.136.000		9.890.486.000		10.060.886.000		276.000.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 %	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	121.000.000	100 %	121.000.000	100 %	392.000.000	Kecamatan Cipedes	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	100 %	2.585.900.000	100 %	2.585.900.000	100 %	3.383.550.000	100 %	3.414.800.000	100 %	11.970.150.000	Kecamatan Cipedes	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	240.000.000	Kecamatan Cipedes	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 %	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	122.000.000	100 %	117.000.000	100 %	447.000.000	Kecamatan Cipedes	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	6.054.236.000	100 %	6.054.236.000	100 %	6.203.936.000	100 %	6.348.086.000	100 %	24.660.494.000	Kecamatan Cipedes	
	Kecamatan Tawang				9.377.906.000		9.377.906.000		10.477.456.000		10.654.956.000		39.888.224.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	0 %	100 %	97.000.000	100 %	97.000.000	100 %	110.000.000	100 %	111.000.000	100 %	415.000.000	Kecamatan Tawang	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	0 %	100 %	2.701.900.000	100 %	2.701.900.000	100 %	3.595.750.000	100 %	3.671.750.000	100 %	12.671.300.000	Kecamatan Tawang	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	0 %	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	82.000.000	100 %	324.000.000	Kecamatan Tawang	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	100 %	95.000.000	100 %	95.000.000	100 %	106.500.000	100 %	112.000.000	100 %	408.500.000	Kecamatan Tawang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	6.404.006.000	100 %	6.404.006.000	100 %	6.583.206.000	100 %	6.678.206.000	100 %	26.069.424.000	Kecamatan Tawang	
	Kecamatan Indihiang				10.350.569.000		10.350.569.000		11.526.809.000		11.711.409.000		43.939.356.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	0 %	100 %	78.624.000	100 %	75.624.000	100 %	101.073.776	100 %	103.843.608	100 %	359.165.384	Kecamatan Indihiang	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	100 %	82.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	70.000.000	100 %	302.000.000	Kecamatan Indihiang	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	100 %	165.000.000	100 %	153.000.000	100 %	168.000.000	100 %	148.000.000	100 %	634.000.000	Kecamatan Indihiang	
07.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	0 %	100 %	2.959.900.000	100 %	3.050.386.328	100 %	3.979.497.559	100 %	4.101.190.980	100 %	14.090.974.867	Kecamatan Indihiang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	0 %	100 %	7.065.045.000	100 %	7.001.558.672	100 %	7.198.237.665	100 %	7.288.374.412	100 %	28.553.215.749	Kecamatan Indihiang	
	Kecamatan Kawalu				13.662.733.000		13.662.733.000		15.192.633.000		15.405.333.000		57.923.432.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0 Kegiatan	2 Kegiatan	180.000.000	2 Kegiatan	180.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	140.000.000	8 Kegiatan	600.000.000	Kecamatan Kawalu	
07.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0 kegiatan	4 kegiatan	3.982.070.000	4 kegiatan	3.982.070.000	4 kegiatan	5.461.950.000	4 kegiatan	5.435.930.000	16 kegiatan	18.862.020.000	Kecamatan Kawalu	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban Lingkungan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	80.000.000	2 Kegiatan	80.000.000	2 Kegiatan	120.000.000	2 Kegiatan	122.500.000	2 Kegiatan	402.500.000	Kecamatan Kawalu	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 Kegiatan	15 Kegiatan	260.000.000	15 Kegiatan	260.000.000	15 Kegiatan	330.000.000	15 Kegiatan	402.500.000	60 Kegiatan	1.252.500.000	Kecamatan Kawalu	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	9.160.663.000	100 %	9.160.663.000	100 %	9.180.683.000	100 %	9.304.403.000	100 %	36.806.412.000	Kecamatan Kawalu	
	Kecamatan Cibeureum				13.235.686.000		13.235.686.000		14.679.986.000		14.885.986.000		56.037.344.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0 Kegiatan	2 Kegiatan	75.200.000	2 Kegiatan	75.200.000	2 Kegiatan	104.632.000	2 Kegiatan	110.992.000	2 Kegiatan	366.024.000	Kecamatan Cibeureum	
07.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	95 %	3.531.200.000	100 %	3.531.200.000	100 %	4.779.640.000	100 %	4.875.040.000	100 %	16.717.080.000	Kecamatan Cibeureum	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi Peningkatan Keamanan dan Keteriban Lingkungan di Wilayah Kecamatan Cibeureum	0 %	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	420.000.000	Kecamatan Cibeureum	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	165.000.000	1 Kegiatan	180.000.000	1 Kegiatan	645.000.000	Kecamatan Cibeureum	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	9.374.286.000	100 %	9.374.286.000	100 %	9.525.714.000	100 %	9.614.954.000	100 %	37.889.240.000	Kecamatan Cibeureum	
	Kecamatan Tamansari				11.614.359.000		11.614.359.000		12.969.059.000		13.167.959.000		49.365.736.000		

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	0 %	100 %	101.330.000	100 %	126.330.000	100 %	131.000.000	100 %	132.410.000	100 %	491.070.000	Kecamatan Tamansari	
07.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	95 %	3.459.920.000	100 %	3.479.920.000	100 %	4.628.120.000	100 %	4.722.320.000	100 %	16.290.280.000	Kecamatan Tamansari	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	82.000.000	100 %	324.000.000	Kecamatan Tamansari	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	148.000.000	100 %	148.000.000	100 %	562.000.000	Kecamatan Tamansari	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	7.840.109.000	100 %	7.795.109.000	100 %	7.979.939.000	100 %	8.083.229.000	100 %	31.698.386.000	Kecamatan Tamansari	
	Kecamatan Mangkubumi				12.166.624.000		12.166.624.000		13.522.624.000		13.721.624.000		51.577.496.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	0 %	100 %	125.560.000	100 %	127.500.000	100 %	130.000.000	100 %	130.000.000	100 %	513.060.000	Kecamatan Mangkubumi	
07.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	100 %	3.596.440.000	100 %	3.614.440.000	100 %	4.572.270.000	100 %	4.666.550.000	100 %	16.449.700.000	Kecamatan Mangkubumi	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Mangkubumi	0 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	400.000.000	Kecamatan Mangkubumi	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 %	100 %	236.000.000	100 %	241.000.000	100 %	256.000.000	100 %	281.000.000	100 %	1.014.000.000	Kecamatan Mangkubumi	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	0 %	100 %	8.108.624.000	100 %	8.083.684.000	100 %	8.464.354.000	100 %	8.544.074.000	100 %	33.200.736.000	Kecamatan Mangkubumi	
	Kecamatan Bungursari				11.363.402.000		11.363.402.000		12.630.002.000		12.821.602.000		48.178.408.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	0 %	100 %	137.500.000	100 %	127.500.000	100 %	128.500.000	100 %	108.500.000	100 %	502.000.000	Kecamatan Bungursari	
07.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat desa & kelurahan	0 %	100 %	3.008.380.000	100 %	3.008.380.000	100 %	4.173.600.000	100 %	4.309.200.000	100 %	14.499.560.000	Kecamatan Bungursari	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 %	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	320.000.000	Kecamatan Bungursari	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	100 %	154.000.000	100 %	154.000.000	100 %	162.500.000	100 %	162.500.000	100 %	633.000.000	Kecamatan Bungursari	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	7.983.522.000	100 %	7.993.522.000	100 %	8.085.402.000	100 %	8.161.402.000	100 %	32.223.848.000	Kecamatan Bungursari	
	Kecamatan Purbaratu				10.077.639.000		10.077.639.000		11.254.539.000		11.439.139.000		42.848.956.000		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	0 %	100 %	101.000.000	100 %	101.000.000	100 %	101.000.000	100 %	101.000.000	100 %	404.000.000	Kecamatan Purbaratu	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	200.000.000	Kecamatan Purbaratu	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	100 %	109.500.000	100 %	109.500.000	100 %	109.500.000	100 %	109.500.000	100 %	438.000.000	Kecamatan Purbaratu	

Kode	Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 %	100 %	2.536.000.000	100 %	2.536.000.000	100 %	3.667.000.000	100 %	3.743.450.000	100 %	12.482.450.000	Kecamatan Purbaratu	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	7.281.139.000	100 %	7.281.139.000	100 %	7.327.039.000	100 %	7.435.189.000	100 %	29.324.506.000	Kecamatan Purbaratu	
	Urusan Pemerintahan Umum				16.416.953.000			92.116.953.000		17.416.953.000		17.616.953.000		143.567.812.000	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				16.416.953.000			92.116.953.000		17.416.953.000		17.616.953.000		143.567.812.000	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0 %	100 %	175.000.000	100 %	175.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	0 %	100 %	225.000.000	100 %	225.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	0 %	100 %	550.000.000	100 %	550.000.000	100 %	650.000.000	100 %	750.000.000	100 %	2.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang dibina	0 %	100 %	3.215.535.000	100 %	78.315.535.000	100 %	2.915.535.000	100 %	2.915.535.000	100 %	87.362.140.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perisetase Ormas yang dibina	0 %	71 %	8.554.500.000	71 %	9.104.500.000	71 %	9.454.500.000	71 %	9.454.500.000	71 %	36.568.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	0 %	100 %	3.696.918.000	100 %	3.746.918.000	100 %	3.946.918.000	100 %	3.946.918.000	100 %	15.337.672.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2023– 2026.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPD adalah IKU Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8.1.
Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	TAHUN				Target Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	73,31	73,95	73,95	74,28	74,62	74,96	74,96
	Indeks Pendidikan	Point	69,12	68,50	70,04	70,51	70,99	71,49	71,49
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,70	9,76	9,89	10,02	10,16	10,16
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,54	13,50	13,52	13,53	13,55	13,55
	Indeks Kesehatan	Point	80,52	81,65	80,88	81,06	81,25	81,44	81,44
	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	73,15	72,57	72,69	72,81	72,94	72,94
	Indeks Daya Beli	Point	70,78	59,63	71,40	71,72	72,03	72,34	72,34
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	10,213	9,86	10,424	10,531	10,639	10,748	10,748
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	31,56	32,46	33,40	34,35	35,33	36,26	36,26
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun RP	22,85	23,61	24,40	25,21	26,02	26,83	26,83
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,0	5,15	5,69	5,81	5,98	5,98
5.	Inflasi	%	1,17	2,00	2,47	2,65	2,83	2,96	2,96
6.	Indeks gini	Point	0,414	0,39	0,390	0,380	0,370	0,360	0,360
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,20	0,71	0,61	0,51	0,41	0,41
8.	Tingkat Kemiskinan	%	13,13	11,50	12,33	11,33	10,73	10,20	10,20
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	7,02	7,35	7,18	6,84	6,53	6,53

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target				
						2023	2024	2025	2026	Target Akhir Periode RPD
1	Angka kemiskinan	(%)	Persentase Angka Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,13	11,50	12,33	11,33	10,73	10,20	10,20
2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	poin	capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial	100	100	90	90	92	94	94
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	Persentase Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9,70	9,76	9,89	10,02	10,16	10,16
4	Harapan Lama Sekolah	Poin	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,46	13,54	13,50	13,52	13,53	13,55	13,55
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	poin	capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan	69,12	100	72	75	77	79	79
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	72,34	73,15	72,57	72,69	72,81	72,94	72,94
7	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	poin	capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan	48,09	100	75	80	85	90	90
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,81	0,20	0,71	0,61	0,51	0,41	0,41
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	62,96	60,00	60,10	60,20	60,30	60,30
10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,54	91,84	91,94	92,04	92,24	92,24

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target				
						2023	2024	2025	2026	Target Akhir Periode RPD
11	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	poin	capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	98,47	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, dan dikeluarkan oleh BNPB	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)				
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,0	5,15	5,69	5,81	5,98	5,98
14	PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	Persentase PDRB Per kapita berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	31,56	32,46	33,40	34,35	35,33	36,26	36,26
15	Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	Pengeluaran Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	10,213	9,86	10,424	10,531	10,639	10,748	10,748
16	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,39	0,390	0,380	0,370	0,360	0,360
17	Inflasi	%	Inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,00	2,47	2,65	2,83	2,96	2,96
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7,66	7,02	7,35	7,18	6,84	6,53	6,53
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7.573,28	-	8.002,90	8.283,45	8.564,01	8.844,56	8.844,56
20	Indeks kemantapan jalan	Poin	Indeks dari Jalan dalam kondisi mantap/total panjang jalan x 100%	-	-	59,23	62,05	66,87	73,67	73,67

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target				
						2023	2024	2025	2026	Target Akhir Periode RPD
21	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	Indeks dari kawasan permukiman layak huni/ total kawasan permukiman x 100%	-	-	15,88	31,77	48,57	65,36	65,36
22	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	poin	capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58,71	100	91,07	94,74	97,57	100	100
23	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	capaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat/jumlah total SPM bidang Bidang Perumahan rakyat	100	100	100	100	100	100	100
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$		74,40	57,93	58,15	58,37	58,59	58,59
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persenatse sampah yang dikelola+persentase sampah pengurungan	77,86	83,45	99	99	100	100	100
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Baik (83,32)	Baik (77-88)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (85,80 - 88,30)	Baik (85,80 - 88,30)	Baik 85,80 - 88,30
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Indeks inovasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)	Inovatif (52,43)	Sangat Inovatif (60,01)	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif (62,01)
28	Indeks SPBE	Kategori/Poin	Capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	Baik (2,68)	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)	Baik (3,0)	Baik (3,1)	Baik (3,2)	Baik (3,2)
29	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB	BB (70,81)	81-90 (A)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target				
						2023	2024	2025	2026	Target Akhir Periode RPD
31	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Sangat Tinggi	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi				
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP	2,83	3	3	3	3	3	3

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA								
					2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,15	5,69	5,81	5,98	5,98				
1.2.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,97	4,59	5,86	6,53	7,28	7,28				
1.3.	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,91	3,71	4,60	5,53	6,41	6,41				
1.4.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,28	0,45	0,56	0,62	0,68	0,68				
1.5.	Laju inflasi Kota (%)	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,47	2,65	2,83	2,96	2,96				
1.6.	• Indeks Gini (point)	point	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,390	0,380	0,370	0,360	0,360				
1.7.	• Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point)	point	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	73,95	73,95	74,28	74,62	74,96	74,96				
1.7.1	• Indeks Kesehatan	point	Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	80,52	80,88	81,06	81,25	81,44	81,44				
1.7.2	• Indeks Pendidikan	point	Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS	69,12	70,04	70,51	70,99	71,49	71,49				
1.7.3	• Indeks Daya Beli	point	Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	70,78	71,40	71,72	72,03	72,34	72,34				
Fokus Kesejahteraan Masyarakat													
1.	Pendidikan												
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Point	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9,76	9,89	10,02	10,16	10,16				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,6	8,2	7,7	7,3	7,3
2.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8	286,5	269,1	251,7	251,7
2.3.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100		84	86	88	90	90
2.4.	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	14,8	13,8	12,8	11,8	11,8
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	25,77	25,78	25,79	25,80	25,81	25,81
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	89,78	89,79	89,80	89,82	89,83	89,83
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	78,64	78,65	78,66	78,68	79,25	79,25
1.4	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100		72	75	77	79	79
1.6	Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (...%)	%	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik	51,45	51,55	51,65	51,85	51,89	51,89

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
1.7	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD	n/a	35,76	35,79	35,83	35,87	35,87
1.8	Persentase SD Terakreditasi A	%	Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD	n/a	60,26	60,32	60,38	60,44	60,44
1.9	Persentase SMP Terakreditasi A	%	Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP	n/a	58,19	58,25	58,31	58,37	58,37
1.10	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan	n/a	51,85	51,90	51,95	52,01	52,01
1.11	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	Jumlah Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	n/a	67,38	67,45	67,52	67,59	67,59
1.12	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100	100	100	100	100	100
1.13	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	51,45	51,45	51,50	51,55	51,61	51,61
1.14	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi	30	25,03	25,05	25,08	25,10	25,10
2.	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,4	8,2	7,7	7,3	7,3
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8	286,5	269,1	251,7	251,7
2.3	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	14,8	13,8	12,8	11,8	11,8
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat	65,58	75	80	85	90	90
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat		75	80	85	90	90
2.6	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata capaian SPM PM dan PTM		75	80	85	90	90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	
2.7	Indeks Keluarga Sehat			0,16	0,30	0,40	0,50	060	0,60
2.8	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jmlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah tenaga kesehatan dikali 100	88,1	91	94	97	100	100
2.9	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	66,60	77	80	83	87	87
2.10	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Keluarga ner-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	25,77	25,78	25,79	25,90	26,81	25,81
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / total panjang jalan dan jembatan * 100%	52,88	53,49	57,34	64,43	74,75	74,75
3.2	Prosentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	rosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)		32,86	47,86	61,19	76,19	76,19
3.3	Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100%		25	50	75	100	100
3.4	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%)		100	100	100	100	100
3.5	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan *100%	68,25	68,66	73,69	83,35	97,63	97,63
3.6	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase	17,01	18,10	19,19	20,27	21,36	21,36
3.7	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung)	15,79 (18 gedung)	32,46	49,12	65,79	82,46	82,46

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
3.8	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100%		16,67	50,00	66,67	100,00	100,00
3.9	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%)		42,37	42,37	42,37	42,37	42,37
3.10	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th)		25	50	75	100	100
3.11	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100%		61,62	62,03	62,45	62,86	62,86
3.12	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100%		56,67	57,26	58,01	58,79	58,79
3.13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		90	80	61	71	71
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
4.1	Persentase Perumahan yang Layak huni	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3		25	50	75	100	100
4.2	Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan reklokasi program yang ditangani terhadap target	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)		2,42	4,84	8,47	12,09	12,09
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (9081 unit)		9,24	18,55	30,60	42,64	42,64
4.5	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	100	100	100	100	100	100
4.6	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
4.7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3		25	50	75	100	100
4.8	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani		20	40	70	100	100
4.9	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)		8,56	17,24	28,65	40,07	40,07
4.10	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit)		1,36	2,63	3,89	5,15	5,15
5.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Presentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan	%	Jumlah pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	80	100	100	100	100	100
5.2	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	86	93	94	95	96	96
5.3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan Keindahan (K3)	%	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan/jumlah gangguan x 100%	80	100	100	100	100	100
5.4	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100%	86	93	94	95	96	96
5.5	Presentase PPNS yang dibina	%	Jumlah PPNS yang dibina/jumlah total PPNS x 100%		80	81	82	83	83

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
5.6	Indeks Katahanan Daerah	Poin	Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0,34	0.34	0.35	0.35	0.36
5.7	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran		86	86	86,50	86,50
5.8	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana/ Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> x 100%	100	100	100	100	100
5.9	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana /Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> x 100%	100	100	100	100	100
5.10	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi/ Perkiraaan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i> x 100%	100	100	100	100	100
5.11	'Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Poin	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	86	86	86	86,50	86,50
6.	Sosial							
6.1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Data PPKS X 100		10	10.5	11	11.5
6.2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/Jumlah Data DTKS X 100		78	79	79.5	80
6.3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100		100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
	alam dan korban bencana sosial								
6.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	Jumlah PSKS yang diberdayakan/Jumlah Data PSKS X 100		25	25	25	25	100
6.5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan X 100	100	100	100	100	100	100
6.6	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Geladangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target X 100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target X 100	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase PSKS Aktif	%	Jumlah PSKS aktif/Target X 100	100	100	100	100	100	100
6.10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP X 100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
7.	Tenaga Kerja								
7.1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100 %	53,75	54,23	54,50	54,75	55,00	55,00
7.2	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	3,61	4,98	5,56	6,92	8,30	8,30
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di	0	4	5	8	12	12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
	daerah		kabupaten/kota x 100%					
7.4	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	24,96	27	29	31	33
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,84	91,86	91,88	91,90
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	60,00	60,10	60,20	60,30
8.3	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100	100	100	100	100	100
8.4	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Poin	Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak	756	758	760	800	800
8.5	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender	Person	Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender / Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100	20	100	100	100	100
8.7	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Person	Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x 100	100	100	100	100	100
8.8	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Person	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100	100	100
8.9	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	Person	Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100	100	100	100	100	100
8.10	Persentase Penanganan Kasus Anak	Person	Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
9.	Ketahanan Pangan								
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	91,3	91,4	91,5	91,6	91,7	91,7
9.2	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	unit	Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	0	1	2	1	0	4
9.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	110,6	110,7	110,8	110,9	111	111
9.4	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	Persentase Angka Kecukupan Protein	124,9	125	125,5	126	126,5	126,5
9.5	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (%)	%	Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga	10,3	15	15	20	20	20
9.6	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	100	100	100	100	100	100
10.	Pertanahan								
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	100	100	100	100	100
11.	Lingkungan Hidup								
11.1	Indeks kualitas Air	poin	IPj=[√(Ci/Lij) ² M + (Ci/Lij) ² A]/2	65,75	53,7	53,75	53,80	53,85	53,85
11.2	Indeks kualitas Udara	Poin	IKU = 100 - [(50/0,9 x leu - 0,1)]	83,45	80,00	80,50	81,00	81,50	81,50
11.3	Persentase Penanganan Sampah	%	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	-	72	71	70	70	70
11.4	Persentase Pengurangan Sampah	%	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	-	27	28	30	30	30
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100%	92	94	95	96	97	97

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
12.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	100	100	100	100	100
12.3	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	96,1	98	98,5	99	99,5
12.4	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	99	93	95	96	97
12.5	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	100	100	100	100	100
12.6	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Data kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan/2*100%	100	100	100	100	100
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
13.1	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	82,03	82,53	83,03	83,53	84,03
13.2	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	76,11	76,61	77,11	77,61	78,11
13.3	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	74,47	74,97	75,47	75,97	76,47
13.4	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	1	1	1	1
13.5	Persentase Kepersertaan KB MKJP	Persen	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	336,15	100	100	100	100
13.6	Persentase Kepersertaan Un Meet Need	Persen	Unmeet need (ingin anak ditungu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	14	13,50	13,25	13,00	12,75
14.	Perhubungan							
14.1	Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	66,09	67,23	68,62	70,27	72,16

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
14.2	Persentase Layanan Lalu Lintas Bekeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	58,93	61,07	63,21	65,36	67,50	67,50
14.3	Persentase Angkutan Lalu Lintas Bekeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan	76,82	77,32	78,32	79,82	81,82	81,82
15.	Komunikasi dan Informatika								
15.1	Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	2,68	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
15.2	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3diselenggaraan oleh Komisi Informasi	80	80	81	82	83	83
15.3	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	60	60	65	70	75	75
15.4	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria/indikator untuk kualifikasi predikat keterbukaan informasi dan komunikasi publik.. Penilaian : PPID 10%, SLIP 20%, Berkala 30%, Setiap Saat 20%, Serta Merta 20%	N/A	Informatif (80%)	Informatif (81%)	Informatif (82%)	'Informatif (83%)	'Informatif (83%)
16.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	63	64	65	66	67	67
16.2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mikro x 100%	2	2	2	2	2	8
16.3	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100%	100	100	100	100	100	100
16.4	persentase koperasi aktif	%	Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x 100%	1	1	1	1	1	4
16.5	Persentase Koperasi Sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100%	2	6	6	6	6	24
16.6	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah	25	25	25	25	25	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
			SDM koperasi yang dibina x 100%					
16.7	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/Jumlah total koperasi aktif x 100%	25	25	25	25	25
16.8	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x 100%	2	2	2	2	2
16.9	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100%	5	5	5	5	5
17.	Penanaman Modal							
17.1	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Rp./Milyar	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	1.242	1.304	1.369	1.430	1.501
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	0	20	20	20	20
17.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	0,13	1	1	1	1
17.5	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100%	0	25	25	25	25
17.6	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100%	80	100	100	100	100
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	3,30	2,20	3,30	4,40	5,49
18.2	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100	N/A	34,15	36,59	39,02	41,46
18.3	Persentase OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	28,57	29,67	30,77	31,87	32,97
18.4	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga *	60,00	34,15%	36,59	39,02	41,46

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
	Provinsi		100					
19.	Statistik							
19.1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3 Kelompok Data : Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum.	100	100	100	100	100
19.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	100	100	100	100	100
20.	Persandian							
20.1	Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	40,00	41,00	41,50	42,00	42,50
20.2	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100	41,00	41,00	41,50	42,00	42,50
21.	Kebudayaan							
21.1	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100	57,97	63,73	68,63	73,53	78,43
21.2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	57,97	63,73	68,63	73,53	78,43
21.3	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	20,23	25	25	25	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	50,00	25	25	25	25	100
21.5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	35,38	46,15	53,85	61,54	69,23	46,15
22.	Perpustakaan								
22.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100%	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
22.2	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina /Jumlah Perpustakaan yang yang seharusnya dibina X 100%	5,53	4,42	4,42	4,42	4,42	17,68
22.3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	N/A	38	39	40	41	41
22.4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan /Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstra X 100%	N/A	23,81	26,19	23,81	26,19	100
23.	Kearsipan								
23.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	51,58	52,43	53,26	54,06	55,31	55,31
23.2	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, dengan kategori:	23,96	44,80	56,39	66,54	69,96	69,96

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
			a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)					
23.3	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan X 100%	63,89	77,78	86,11	91,67	100
23.4	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian X 100%	21,45	37,48	47,24	55,98	60
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	9.990,39	10.000	10.100	10.200	10.300
1.2	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	312,78	300	310	320	330
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi dibagi jumlah pendudukn	22,95	22,25	22,5	22,75	23
2	Pariwisata							
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah occupancy hotel	483.569	443.505	542.625	641.746	740.866
2.2	Persentase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	%	Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100%	55,10	59,18	61,22	63,27	65,31

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	
2.3	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif	46,15	53,33	56,67	60,00	63,33	63,33
3	Pertanian								
3.1	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
3.2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Jumlah populasi ternak tahun n – Jumlah populasi ternak tahun n-1/jumlah populasi ternak n-1 x 100	-1,59	1	1	1	1	1
3.3.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	85.384	85.500	86.000	86.500	87.000	87.000
3.4	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	5.834	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	Produksi padi/luas panen hektar	62,9	62,9	63	63	63	63
3.6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10.347	10.350	10.400	10.450	10.500	10.500
3.7	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi	100	100	100	100	100	100
3.8	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha) dibagi Luas Area Terkena Bencana	73,56	75	75	75	75	75
3.9	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tani x 100	4,35	4,5	5	5	5	5
3.10	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	izin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	0	3	3	3	3	12
4.	Perdagangan								
4.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	(PDRB sector perdagangan n – PDRB sector perdagangan n-1)/ PDRB sector Perdagangan n-1 x 100 %	2,97	4,59	5,86	6,53	7,28	7,28
4.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	(Nilai eksport tahun n – nilai ekspor tahun n-1)/ nilai ekspor tahun n-1 x 100 %	2	2	2	2	2	2

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
4.3	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	100	100	100	100	100
4.4	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	70	70	80	90	100
4.5	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100%	40	40	40	40	40
4.6	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah IKM keseluruhan x 100%	10	10	10	10	40
4.7	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi eksport/Jumlah total pelaku usaha x 100%	1	1	1	1	4
4.8	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	80	80	80	80	80
5.	Perindustrian							
5.1	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100%	2	4	4	4	16
5.2	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	5	5	5	5	20
5.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	100	100	100	100	100
5.4	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100%	5	5	5	5	20
Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan								
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
1.1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	10,69	11,00	11,25	11,50	11,75
1.2	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik	Kategori	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	38,89	40,00	45,00	50,00	55,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
1.3	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkat	Kategori	Nilai LPPD dari Kemendagri	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.4	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	100	100	100	100	100	100
1.5	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	%	Hasil Evaluasi dari LKPP		40	50	60	70	70
1.6	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	%	Capaian IKK Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat X 100%	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100%	100	100	100	100	100	100
1.8	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	Produk Hukum Daerah yang Diundangkan/ Jumlah Target x 100%	100	100	100	100	100	100
1.9	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	"Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Meningkat X 100% Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan"	100	100	100	100	100	100
1.10	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
1.11	Indek Kematangan UKPBJ	%	Dihitung oleh LKPP		3	4	5	5	5
1.12	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	100	100	100	100	100	100
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	25,17	25,20 - 25,30	25,30 - 25,40	25,40 - 25,50	25,50 - 25,60	25,50 - 25,60
1.2	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	17,58	17,65 - 17,85	17,85 - 18,00	18,00 - 18,15	18,15 - 18,30	18,15 - 18,30
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja	%	Jumlah indicator kinerja daerah berpredikat minimal	N/A	80	83	86	90	90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
	Utama Daerah berpredikat minimal baik		baik/jumlah indicator kinerja daerah x 100%					
2	Keuangan							
2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPini	Opini BPK atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100%	100	100	100	100	100
2.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/standar x 100%	100	100	100	100	100
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Capaian pajak tahun berkenaan /capaian pajak tahun lalu (n-1) x 100%	14,06	2,31	7,82	13,32	18,83
2.5	Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD tahun berkenaan /capaian PAD tahun lalu (n-1) x 100%	59,35	-1,24	-1,06	-0,85	-0,67
2.6	Capaian Pajak Daerah	%	Capaian Pajak Daerah/target x100%	100	100	100	100	100
2.7	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD bukan Pajak Daerah/target x100%	100	100	100	100	100
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Indeks Merit Sistem	Poin	Indeks Merit Sistem	120,5/ Buruk	175/ Kurang	225/ Kurang	250/ Baik	275/ Baik
3.2	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	ASN yang diangkat sesuai dengan formasi/Jumlah ASN x 100%	100	100	100	100	100
3.3	Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	capaian pelayanan kepegawaian/jumlah layanan kepegawaian x 100%	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2021	2023	2024	2025	2026	Periode Akhir RPD
3.4	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	PNS yang terpetakan kompetensinya/jumlah PNS x 100%	7	12	18	25	35	35
3.5	Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	100	100	100	100	100	100
3.6	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100%	%	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100%		17	18	19	20	20
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100%	80	85	90	95	100	100
4.2	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	9	10	11	12	13	13
5	Unsur Pengawasan Pemerintahan								
5.1	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	capaian kapabilitas APIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.2	Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level	Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.3	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	level 3	level 3	level 3
5.4	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	level 3	level 3	level 3
5.5	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	level 3	level 3	level 3
5.6	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	level 3	level 3	level 3
6.	Unsur Kewilayahan								
6.1	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.2	Persentase Penanganan Gangguan	%	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			
				2021	2023	2024	2025	2026
	Keamanan dan Ketertiban UmumLingkungan		ditangani/jumlah gangguan x 100%					
6.3	Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang"	%	Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang"/ jumlah kelurahan x 100%	100	100	100	100	100
6.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100
6.6	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100
6.7	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100
7.	Urusan Pemerintahan Umum							
7.1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100	100
7.2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dikeluarkan oleh KPU	-	-	86,50	-	-
7.3	Persentase ormas yang aktif	%	Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100%	64	65	66	67	68
7.4	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100	100	100
7.5	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100	100	100
7.6	Persentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100%	63	64	65	66	67
7.7	Persentase parpol yang dibina	%	Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100%	100	100	100	100	100
7.8	Persentase ormas yang dibina	%	Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100%	71	71	71	71	71

Tabel 8.4.
Rencana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4	5	6		7		8		9		10	11		
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Indeks pencapaian SPM Bidang Pendidikan		Tuntas Pratama (72)		Tuntas Pratama (75)		Tuntas Pratama (77)		Tuntas Pratama (79)		Tuntas Pratama (79)			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SD			1.145.425.000		1.145.425.000		1.145.425.000		1.145.425.000		4.581.700.000		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SMP			482.707.000		482.707.000		482.707.000		482.707.000		1.930.828.000		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana PAUD			371.868.000		371.868.000		371.868.000		371.868.000		1.487.472.000		
		Jumlah		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.000.000.000			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan		Tuntas Pratama (75)		Tuntas Madya (80)		Tuntas Madya (85)		Tuntas Utama (90)		Tuntas Utama (90)			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Sesuai Standar			2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		9.685.724.000		
		Jumlah		2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		2.421.431.000		9.685.724.000			



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	Indeks pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum		Tuntas Utama (91,07)		Tuntas Utama (94,74)		Tuntas Utama (97,57)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Dinas PUPR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum			3.550.000.000		5.975.000.000		8.700.000.000		9.100.000.000		27.325.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase KK yang berakses SPALD			10.445.000.000		9.170.000.000		8.920.000.000		8.970.000.000		37.505.000.000		
		Jumlah		13.995.000.000		15.145.000.000		17.620.000.000		18.070.000.000		64.830.000.000			
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat	Indeks pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Dinas Perawaskin	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang ditangani			880.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		3.880.000.000		6.920.000.000		
		Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani											-		
		Jumlah		880.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		3.880.000.000		6.920.000.000			
5	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas														
		Indeks pencapaian SPM Sub BidangTrantibum		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Tuntas Paripurna (100)		Satpol PP	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang di selesaikan			327.900.000		327.900.000		327.900.000		327.900.000		1.311.600.000		
		Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Penanggulangan Bencana			Tuntas Utama (91)		Tuntas Utama (92)		Tuntas Utama (93)		Tuntas Utama (94)		Tuntas Utama (94)		



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	6		7		8		9		10	11		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana			2.240.742.200		1.915.000.000		1.954.000.000		2.125.000.000		8.234.742.200	BPBD	
		Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran		Tuntas Madya (87)		Tuntas Madya (88)		Tuntas Madya (89)		Tuntas Utama (90)		Tuntas Utama (90)			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)			620.000.000		540.000.000		788.000.000		2.725.000.000		4.673.000.000	BPBD	
6	Urusan pemerintahan bidang Sosial			Tuntas Utama (90)		Tuntas Utama (90)		Tuntas Utama (92)		Tuntas Utama (94)		Tuntas Utama (94)		Dinas Sosial	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			3.550.000.000	100%	4.050.000.000	100%	4.360.000.000	100%	4.360.000.000	100%	16.320.000.000		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial			275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	425.000.000	100%	1.250.000.000		
		Jumlah													



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-3026.

RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya dan RTRW Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen RPD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing
3. RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMD) Kota Tasikmalaya setelah adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.



Semoga RPD ini, dapat menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tasikmalaya sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF